TERIMA DUBES GUATEMALA: BAMSOET DORONG PENINGKATAN KERJASAMA EKONOMI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

EDISI NO.06/TH.XV/JUNI 2021

PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI TENGAH PANDEMI COVID-19

ISSN 0854-6371

06 **Refleksi** Waspadai Dampak Pergerakan Pemudik

16 **Nasional** Peringatan Hari Lahir ke-76 Pancasila, 1 Juni 2021

39 **Selingan** Akibat Tulisan Soewardi (Ki Hadjar Dewantara)

62 **Sosialisasi** PPHN Diperlukan untuk Menyatukan Visi Kebangsaan

1-4 CVR JUN.pmd 1 1/1/2003, 2:44 AM

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

1-4 CVR JUN.pmd 2 1/1/2003, 2:44 AM

MEDIA INFORMASI
DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INI BARU
INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

Peringatan
HARI LAHIR KE-76 PANCASILA, 1 JUNI 2021

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

INI BARU INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

1-4 CVR JUN.pmd 4 1/1/2003, 2:44 AM

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA

Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19

Kunci keberhasilan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah adalah semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, petugas kebersihan, hingga para siswa dan orangtua harus patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

16 Nasional

Peringatan Hari Lahir ke-76 Pancasila, 1 Juni 2021

62 Sosialisasi

Kunjungan Kerja Ketua MPR ke Kabupaten Pelalawan, Riau

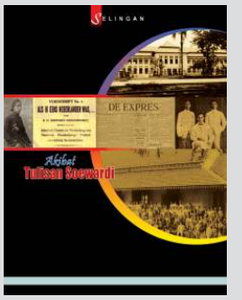

39 SELINGAN

Akibat Tulisan Soewardi

76 Profil

Syarif A. Alkadrie

Pengantar Redaksi 04

Perspektif 06

Kolom 28

Gema Pancasila 36

Rehal 38

Aspirasi Masyarakat 47

Varia MPR 68

Wawancara 70

Figur 72

Ragam 74

Dari Rumah Kebangsaan 80

Rehal 82

COVER

Edisi No.06/TH.XV/Juni 2021

Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

1/1/2003, 1:14 AM

Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19

MULAI tahun ajaran baru pada Juli 2021, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mengizinkan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM). Keputusan pemerintah ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Pembukaan sekolah dan penyelenggaraan PTM itu dibolehkan setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan maupun operator sekolah, petugas kebersihan, dan pegawai tata usaha, telah mendapatkan vaksin Covid-19 secara lengkap. Selain itu, sekolah harus memenuhi berbagai persyaratan, terutama menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyebutkan, beberapa alasan mengapa pemerintah membolehkan sekolah untuk menyelenggarakan PTM. Menurut Nadiem, sudah selama satu tahun lebih sekolah-sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui sistem dalam jaringan (Daring). Namun, ternyata, penutupan sekolah selama satu tahun karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak lain, yaitu anak putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan terjadinya kekerasan pada anak.

Sebenarnya, sejak awal 2021, pemerintah sudah membolehkan PTM di sekolah secara terbatas. Namun, baru sekitar 22% sekolah di Indonesia, dari sekitar 646 ribu institusi pendidikan, yang mengggelar PTM terbatas. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia jauh tertinggal. Sekitar 85% negara-negara di Asia Pasifik sudah lebih dulu membuka sekolah dan menggelar PTM pada masa pandemi Covid-19 ini.

Dalam uji coba sejak awal 2021, beberapa daerah sudah membuka sekolah dan menggelar PTM dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat itu, antara lain pembatasan jumlah peserta didik dalam satu kelas, waktu pertemuan yang lebih singkat, mengukur suhu tubuh saat memasuki sekolah, menyediakan tempat cuci tangan, harus ada surat izin dari orangtua, dan sebagainya. Pada kenyataannya, ada beberapa sekolah yang kembali tutup karena ditemukan kasus Covid-19 baik pada tenaga pendidik maupun peserta didik.

Memang perlu diingat bahwa membuka sekolah atau menggelar PTM di masa pandemi Covid-19 ini cukup riskan. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda bakal berakhir. Bahkan, belum bisa dipastikan apakah pandemi Covid-19 sudah melewati titik puncak. Pasalnya, tidak terlihat tanda-tanda pandemi ini mulai melandai. Malah, belakangan di beberapa daerah, kasus positif Covid-19 menunjukkan kenaikan.

Sekadar catatan, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mendekati 1,9 juta kasus dengan kematian sebesar 52 ribu dan kasus sembuh sebesar 1,7 juta kasus (data per 1 Juni 2021).

Untuk itu, menyongsong tahun ajaran baru 2021 dengan pembelajaran tatap muka di institusi pendidikan di Indonesia, semua pihak harus bersinergi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satgas Covid-19, pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat. Institusi kesehatan pun harus siaga dengan menyiapkan tes Covid-19, serta menyediakan fasilitas atau sarana kesehatan.

Kunci mengurangi risiko pembukaan sekolah adalah dengan konsisten menaati 3 M, menyiapkan lingkungan sekolah yang sehat, merotasi siswa, dan membatasi jam tatap muka, serta testing dan tracing bila ada kasus Covid-19 untuk mencegah penularan virus. Jangan sampai pembukaan sekolah justru melahirkan kluster baru dalam penyebaran Covid-19. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Ma'ruf Cahyono
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Yana Indrawan, Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Budi Muliawan
KOORDINATOR REPORTASE
Ario Setiawan
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Sucipto, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Bayu Nugroho, Yenita Revi, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Amiruddin, Anggun Permana, Armansyah
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

03-07 JUN.pmd 4 1/1/2003, 1:14 AM

ILUSTRASI: SUSTHANTO

03-07 JUN.pmd 5 1/1/2003, 1:14 AM

Amati dan Waspadai Dampak Pergerakan 1,5 juta Pemudik

LAYAK dan sepantasnya memberi apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah menunjukkan semangat kerjasama dalam menanggapi larangan mudik lebaran yang lalu. Kesediaan puluhan juta orang untuk tidak mudik merupakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah menghindari gelombang kedua pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Tanggapan sangat positif dari masyarakat atas larangan mudik lebaran tahun ini memang layak diapresiasi. Kendati sudah banyak warga perkotaan disuntik vaksin corona, jutaan orang masih mau menahan diri untuk tidak mudik. Dari perkiraan awal 17 juta orang yang nekad akan melakukan perjalanan mudik – menurut hasil survei Kementerian Perhubungan — tercatat hanya 1,5 juta orang yang pulang kampung sepanjang periode larangan mudik lebaran.

Apresiasi juga layak diberikan kepada semua petugas di lapangan, utamanya jajaran kepolisian, TNI, dan polisi pamong praja di semua daerah, yang telah bekerja keras melakukan penyekatan.

Dalam situasi normal, potensi jumlah pemudik bisa mencapai 33 juta orang. Tahun 2019, jumlah pemudik mencapai 23 juta orang. Tahun 2020, saat puasa Ramadan dan lebaran dirayakan di tengah pandemi Covid-19, jumlah pemudik turun drastis, mendekati 99%, dibanding periode libur lebaran 2019.

Catatan jumlah pemudik lebaran 2021 ini tidak hanya menunjukkan kemauan masyarakat bekerjasama, tetapi juga menjelaskan dua aspek lainnya. Pertama, masyarakat menyadari bahwa potensi penularan Covid-19 masih tinggi. Gambaran mengerikan di India, serta gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di sejumlah negara di Asia menjadi acuan banyak orang. Seperti diketahui, Singapura, Malaysia dan beberapa kota di Jepang harus lockdown lagi karena jumlah kasus Covid-19 cenderung meningkat.

Kedua, dengan tidak berlebaran di kampung halaman, warga perkotaan secara tidak langsung menunjukkan keinginan mereka melindungi orang tua dan kerabat dari kemungkinan tertular Covid-19 yang mungkin saja dibawa warga perkotaan. Kampung halaman atau desa dengan demikian tetap bersih dari virus corona. Artinya, pilihan tidak mudik oleh belasan atau puluhan juta orang itu menjadi bagian tak terpisah dari upaya bersama memutus rantai penularan Covid-19.

Kini, setelah periode libur lebaran berakhir, kerja sama masyarakat dengan pemerintah — dalam bentuk ketaatan semua orang pada protokol kesehatan (prokes) — masih harus dilanjutkan. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan bersama, perkembangan pandemi Covid-19 pada tingkat global masih memprihatinkan. Sejumlah negara, termasuk tetangga Indonesia, harus menerapkan lockdown lagi untuk merespons gelombang kedua pandemi Covid-19. Fakta ini harus menjadi faktor pendorong bagi semua elemen

masyarakat Indonesia untuk terus bertahan pada posisi waspada. Siapa pun harus konsisten menerapkan prokes.

Sejumlah fakta dan kecenderungan terkini patut digarisbawahi oleh masyarakat dan pemerintah agar setiap orang makin paham mengapa waspada Covid-19 menjadi keharusan yang tak bisa ditawar. Mengacu pada tragedi di India, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengingatkan bahwa tahun kedua pandemi atau 2021, menjadi tahun yang lebih mematikan dibanding tahun pertama 2020.

Karena virus corona varian B.1.617 lebih ganas dan menyebabkan begitu banyak kematian di India, WHO menjadikan varian B.1.617

03-07 JUN.pmd 6 1/1/2003, 1:14 AM

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

berstatus varian perhatian global atau variant of concern. Hingga jelang pertengahan Mei 2021, varian B.1.617 telah menyebar ke 49 negara. Kalau puluhan negara dimaksud lengah dan tidak konsisten menerapkan prokes, varian B.1.617 bisa memicu krisis global.

Ada empat varian virus corona yang masuk dalam daftar untuk diamati dengan sangat serius. Selain varian B.1.617, tiga varian lainnya adalah B.1.1.7 yang pertama kali terdeteksi di Inggris, Varian B.1.351 yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, dan Varian P.1 yang pertama kali terdeteksi di Brasil. Semua elemen masyarakat diingatkan untuk tetap waspada dan taat prokes, karena tiga varian virus corona dalam daftar variant of concern itu sudah masuk Indonesia yang dibawa oleh turis asing. Masing-masing adalah varian B.1.1.7, varian B.1.351 dan varian B.1.617. Fakta ini sudah dikonfirmasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sekali lagi, tentang akibat lengah atau tidak peduli prokes di masa pandemi Covid-19, gambaran eksesnya adalah potret India hari-hari ini. Jumlah pasien yang mencapai 25,7 juta dengan total kematian 286.952 (data worldometer per 19 Mei 2021) menyebabkan situasi pandemi di sana menjadi sulit dikendalikan. Sedih dan pilu menyelimuti begitu banyak keluarga di negara itu karena ratusan jenasah tidak bisa mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya/ Banyak jenasah tidak bisa dimakamkan atau dikremasi, tetapi hanya diambangkan di sungai.

Sungguh, apa yang terjadi di India harus menjadi pelajaran. Maka, bersama pemerintah, semua elemen masyarakat harus berupaya dengan sungguh-sungguh agar pandemi Covid-19 di dalam negeri sekarang ini tidak memicu tragedi seperti di India. Ingat bahwa beberapa varian virus corona, termasuk varian B.1.617 yang lebih mematikan itu, sudah masuk Indonesia.

Seberapa besar dampak dari pergerakan 1,5 juta pemudik pada periode libur lebaran 2021 terhadap perkembangan penularan Covid-19 tentu saja harus diamati dan juga diwaspadai. Dari 1,5 juta itu, telah dilakukan tes covid-19 terhadap 77.068 pemudik sejak 15 Mei 2021 atau pada periode arus balik. Hasilnya, didapatkan 264 pemudik positif Covid-19. Sebelum berlakunya periode larangan mudik, atau sejak 22 April 2021, juga dilakukan tes acak terhadap 6.724 pemudik. Dari jumlah itu, sekitar 4.000-an pemudik terkonfirmasi positif. Data ini memberi gambaran yang lebih dari cukup tentang adanya potensi penularan dari pergerakan para pemudik.

Karena itu, meningkatkan kewaspadaan sangatlah beralasan. Selain di Jawa, semua pemerintah daerah dan masyarakat di pulau Sumatera juga didorong untuk lebih antisipatif. Laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 bahwa hampir seluruh wilayah di Pulau Sumatera masuk dalam zona merah dan oranye Covid-19 tentu saja harus disikapi dengan cermat.

Sebagian besar masyarakat terbukti prihatin dengan perkembangan Covid-19, sehingga banyak yang tidak mudik. Kewaspadaan, kepedulian dan Inisiatif warga pada sejumlah pemukiman di Jakarta dan Tangerang patut diapresiasi. Pada sejumlah pemukiman terpampang spanduk pernyataan menolak pemudik yang kembali tanpa membawa atau menunjukkan Surat Bebas Covid-19. Menjadi sangat produktif jika semua orang pun selalu patuh pada prokes. ❑

03-07 JUN.pmd 7 1/1/2003, 1:14 AM

Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kunci keberhasilan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah adalah semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, petugas kebersihan, hingga para siswa dan orangtua harus patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

PEMERINTAH akhirnya mengumumkan pembukaan sekolah-sekolah di Indonesia setelah selama setahun lebih ditutup akibat pandemi Covid-19. Sekolah-sekolah atau institusi pendidikan diizinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Pembukaan atau PTM di institusi pendidikan dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli 2021. Keputusan pemerintah tentang PTM tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, menyebutkan, pemerintah mengizinkan PTM secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sudah mendapat dua dosis suntikan vaksin Covid-19. “Setelah guru dan tenaga pendidik semuanya telah divaksin maka sekolah wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan,” katanya saat memberikan keterangan pers terkait pengumuman pemerintah tentang PTM pada Selasa, 30 Maret 2021.

Nadiem mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 kepada pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas. Vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku di semua jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal dan non-formal, serta pendidikan keagamaan. Pada tahap pertama, vaksinasi diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), sekolah dasar, sekolah luar biasa dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan.

Tahap selanjutnya, vaksinasi diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sederajat. Sedangkan pada tahap ketiga, vaksinasi ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi. “Target kami hingga akhir Juni, vaksinasi Covid-19 bagi lima juta pendidik dan tenaga kependidikan sudah selesai, sehingga pada tahun ajaran baru 2021/2022 atau pada minggu kedua dan ketiga Juli, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan,” kata Nadiem.

Kebijakan membuka kembali sekolah dengan PTM terbatas diambil dengan beberapa alasan. *Pertama*, sekolah-sekolah di Indonesia sudah terlalu lama ditutup sejak pandemi Covid-19 merebak pada

08-15 JUN.pmd 8 1/1/2003, 1:46 AM

Maret 2020. Dengan kata lain, pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga sudah berlangsung lama. Penutupan sekolah selama setahun lebih karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak negatif, yaitu anak putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan kekerasan pada anak.

Kedua, Indonesia tertinggal dibanding negara-negara lain yang telah membuka sekolah dan menyelenggarakan PTM. Indonesia termasuk dalam empat negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan PTM secara penuh. Sementara 23 negara lainnya di kawasan tersebut sudah melaksanakan PTM, termasuk Vietnam, Cina, Kamboja, dan Laos. Hampir 85% dari negara-negara di Asia Pasifik yang kembali membuka sekolah dengan PTM. Indonesia relatif tertinggal dibanding negara-negara lain di kawasan itu.

Ketiga, berdasarkan hasil riset, kelompok usia 3 – 18 tahun memiliki risiko infeksi Covid-19 dan tingkat mortalitas yang sangat rendah. Berdasarkan data UNICEF dan WHO, anak di bawah usia 18 tahun juga berisiko rendah dalam menularkan virus Corona kepada sekitarnya. Alasan itulah yang mendorong banyak negara di dunia telah membuka sekolah dengan PTM, meskipun memiliki kasus infeksi Covid-19 yang tinggi.

Sebenarnya, sejak Januari 2021, pemerintah daerah sudah memberikan izin untuk PTM secara terbatas, jika sekolah memenuhi syarat protokol kesehatan. Kebijakan ini tidak bersifat wajib, tetapi tergantung pada masing-masing pemerintah daerah. Pada kenyataannya, hanya sekitar 22% sekolah di Indonesia, dari sekitar 646 ribu institusi pendidikan, yang menggelar PTM terbatas. Banyak pemerintah daerah yang masih enggan untuk membuka sekolah di daerahnya.

Adapun standarisasi bagi sekolah yang akan memulai kegiatan PTM adalah menyediakan sarana sanitasi dan kebersihan, meliputi toilet bersih dan layak, sarana mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menyediakan cairan desinfektan. Standarisasi selanjutnya adalah pihak sekolah harus memiliki akses fasilitas kesehatan yang mumpuni. Berikutnya, sekolah harus menetapkan aturan wajib masker dan memiliki thermogun.

Hal terakhir yang harus dipersiapkan sekolah adalah memetakan warga terdampak Covid-19 yang berada dalam satuan pendidikan. Kemudian mendapat persetujuan dari pihak komite sekolah atau wali murid. “Orangtua boleh memilih, apakah mereka nyaman anaknya ke sekolah atau tidak. Jadi, ujung-ujungnya keputusan ada di orangtua. Tetapi sekolah wajib memberikan opsi PTM terbatas ketika vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan sudah rampung,” kata Nadiem.

Kualitas Turun

Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad setuju dengan keputusan pemerintah yang memberikan izin kepada sekolah untuk menggelar PTM secara

08-15 JUN.pmd 9 1/1/2003, 1:46 AM

Fadel Muhammad

terbatas, dengan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Sekolah-sekolah juga harus memenuhi syarat untuk menyelenggarakan PTM terbatas. "Saya rasa akan baik. Saya setuju jika pemerintah mengizinkan sekolah kembali dibuka dan menyelenggarakan PTM secara terbatas," katanya kepada *Majelis*.

Fadel beralasan, dalam jangka panjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan terus-menerus akan berdampak buruk. "Jika sistem pembelajaran jarak jauh terlalu lama dilakukan maka akan berdampak buruk pada anak didik. Contohnya, adanya kekhawatiran akan terjadi learning loss atau menurunnya kompetensi belajar di kalangan siswa," ujar Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

"Memang pada awalnya, kebijakan pemerintah untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau sistem online (daring atau dalam jaringan) adalah untuk meminimalisir potensi penyebaran pandemi ke sekolah-sekolah dan menjaga anak-anak didik kita. Namun, pada perkembangannya, ternyata penyebaran pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Banyak kalangan mulai dari pakar pendidikan sampai pemerhati anak khawatir terjadinya *learning loss*," imbuhnya.

Fadel Muhammad mengakui, PJJ yang dilakukan terlalu lama bisa memberikan dampak buruk, yaitu menurunnya kualitas pendidikan. "Banyak pakar dan pemerhati pendidikan yang khawatir dengan dampak yang akan terjadi kepada anak didik selama pandemi. Saya pribadi juga sangat khawatir, sebab pandemi sudah terlalu lama. Pasti ada kecenderungan menurunnya kualitas pendidikan di masa pandemi," tandasnya.

Anggota MPR dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, juga menyambut positif rencana pemerintah untuk kembali membuka sekolah dan mengadakan PTM pada bulan Juli 2021 dalam tahun ajaran 2021/2022. "Saat ini kita semua tidak mau kehilangan satu generasi emas karena pandemi Covid-19. Siswa telah kehilangan waktu berharga karena tidak adanya PTM," katanya kepada *Majelis*.

Selain potensi kehilangan satu generasi, ada dampak lainnya akibat tidak adanya PTM di sekolah. Syaiful Huda mencatat beberapa kasus akibat tidak adanya PTM. "Saya mencatat kasus-kasus karena tidak adanya PTM selama hampir 1,5 tahun ini, yaitu banyak pelajar yang beralih menjadi pekerja dan meningkatnya angka pernikahan dini. Jika hal ini tidak mendapat perhatian serius, saya takut akan muncul masalah lain yang lebih ekstrim dan merugikan kita sebagai warga negara," papar Ketua Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan.

Syaiful Huda juga sependapat bahwa mutu pendidikan sebelum dan sesudah Covid-19 tentu berbeda. Pada prinsipnya ada tiga elemen transfer keilmuan dalam pendidikan, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan). "PJJ hanya mengakomodir satu prinsip, yaitu kognitif. Sehingga bisa dipastikan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia menurun," katanya.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, juga setuju dengan pembukaan kembali sekolah untuk PTM. "Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuka sekolah dengan PTM terbatas. Tidak boleh ada larangan," katanya kepada *Majelis*.

Dia mengingatkan agar sekolah mematuhi skema dan panduan tentang PTM dari pemerintah, seperti jumlah siswa yang mengikuti PTM dibatasi, dan lainnya. Dia juga meminta Satgas Covid-19 mengawasi sekolah dalam menjalankan protokol kesehatan. "Sebelum membuka PTM, para guru dan pegawai sekolah harus sudah divaksin. Dan, yang paling penting adalah membentuk Satgas Covid-19 untuk proses PTM," tambahnya.

Dede Yusuf juga meyakini kualitas dan produktivitas di sektor pendidikan menurun. "Ada education loss pada 2020 – 2021 karena belajar-mengajar di sekolah hilang. Bahkan, siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA, diberikan kelulusan. Sebenarnya bukan diluluskan tetapi relaksasi. Angka kelulusan tidak menjadi patokan," papar anggota Komisi X DPR ini.

Kluster Sekolah

Namun, persoalan krusialnya adalah ada kekhawatiran PTM secara terbatas di masa pandemi Covid-19 berisiko tinggi menimbulkan kluster sekolah. Pasalnya, Indonesia masih berada di urutan atas dalam kasus Coivd-19, terbanyak di Asia Tenggara. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sudah mendekati angka 1,9 juta (data per awal Juni 2021). Indonesia pun menempati urutan pertama dalam jumlah terbanyak kasus meninggal karena Covid-19, yaitu mencapai 52 ribu lebih. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, Indonesia menempati jumlah kasus terbanyak kedua setelah India.

Fadel Muhammad tidak menampik potensi munculnya kluster baru. Karena itu, dia

Dede Yusuf

08-15 JUN.pmd 10 1/1/2003, 1:46 AM

mengharapkan adanya sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, pakar pendidikan, dan masyarakat untuk mencari upaya menghindari potensi kluster tersebut. “Daerah-daerah lain pun kami dorong untuk terus melakukan upaya-upaya luar biasa untuk menekan penyebaran pandemi ini agar aktivitas masyarakat, termasuk sekolah, kembali normal,” kata mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Syaiful Huda juga mengaku cukup khawatir apabila pembukaan sekolah ini menimbulkan kluster baru Covid-19. Namun, belajar dari beberapa negara yang sudah berhasil menerapkan PTM, dia yakin, kekhawatiran itu bisa hilang. Kunci keberhasilannya adalah semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, petugas kebersihan, hingga para siswa harus patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. “Sekolah dan keluarga harus memberikan informasi tentang status kesehatan setiap siswa. Jika ada siswa yang kurang sehat maka sebaiknya tidak diikutsertakan dalam

Syaiful Huda

PTM,” katanya.

Agar PTM bisa berjalan baik dan berhasil, Fadel Muhammad menyebutkan beberapa langkah yang mesti dilakukan. Langkah pertama, adalah melihat lebih dulu peningkatan penyebaran pandemi. Jika pandemi sudah mulai menurun, landai, maka pembelajaran tatap muka bisa segera dilakukan dengan secara bertahap. Sebagian siswa bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, dan sebagian lagi tetap melakukan pembelajaran di rumah secara online. Kedua, semua ini harus secara terus-menerus dipantau dan dievaluasi.

Syaiful Huda juga memberi catatan. Pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek, Kemenkes, Pemprov, dan Pemkab/Kota, harus terus berkoordinasi untuk meramu kebijakan yang menunjang pelaksanaan PTM, termasuk aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk pengadaan alat protokol Kesehatan.

Kedua, memaksimalkan kerjasama dengan Satgas Covid-19 di Kabupaten/Kota terkait dengan status Covid-19 di setiap kecamatan mampu membuat analisas dan menyajikan data akurat mengenai kesiapan belajar tetap. Ketiga, diperlukan peran orangtua dalam mempersiapkan PTM dengan mengajarkan dan mencontohkan penggunaan masker, handsanitizer, dan kebiasaan mencuci tangan, serta memastikan anaknya tidak pergi ke tempat umum setelah dari sekolah. ❑

DER/EFP/BSC

Skema dan Panduan Pembelajaran Tatap Muka

PEMERINTAH menyatakan, pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas sudah dapat dimulai dalam tahun ajaran baru, Juli 2021. PTM terbatas ini digelar setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai Juni 2021.

PTM terbatas ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Covid-19. Berikut skema dan panduan PTM yang akan dimulai Juli 2021.

Pertama, untuk SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI dan program kesetaraan, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas.

Kedua, untuk SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB, dan SMLB, MALB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

Ketiga, untuk PAUD jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

Keempat, pembagian rombongan belajar untuk hari dan jam sekolah tatap muka terbatas ditentukan oleh satuan pendidikan. Semuanya mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

Kelima, masker yang digunakan adalah masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Jika memakai masker kain, maka digunakan setiap empat jam atau sebelum empat jam saat sudah lembab atau basah. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer). Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, seperti salaman atau cium tangan serta menerapkan etika batuk atau bersin.

Keenam, warga sekolah harus memiliki kondisi medis sehat. Jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol. Selain itu, tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

Ketujuh, selama masa transisi dua bulan pertama, kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan atau minuman dengan menu gizi seimbang. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler sama seperti kantin, tidak diperbolehkan dalam masa transisi dua bulan pertama. Namun, tetap disarankan melakukan aktivitas fisik di rumah masing-masing.

Kedelapan, kegiatan selain pembelajaran di lingkungan sekolah tidak dibolehkan selama dua bulan masa transisi. Kegiatan tersebut misalnya, seperti orangtua yang menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas. Sedangkan, pertemuan orangtua – peserta didik, pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan seperti guru kunjung, diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. ❑

08-15 JUN.pmd 11 1/1/2003, 1:46 AM

Pembelajaran Tatap Muka Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Belajar dari pengalaman negara lain, diperlukan kerjasama semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satgas Covid-19, sekolah, dan masyarakat) dan kesiapan jajaran kesehatan, baik dalam menyediakan tes Covid-19 dan sarana kesehatan sebelum memulai pembelajaran tatap muka di sekolah.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEJAK pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda dunia, berawal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, sejumlah negara di dunia melakukan pembatasan sosial dalam berbagai kegiatan. Tujuan pembatasan sosial ini adalah untuk menekan atau memutus mata rantai penyebaran virus. Tak mengherankan jika pandemi Covid-19 ini membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor pendidikan. Ratusan negara terpaksa menutup sekolah-sekolah selama masa pandemi Covid-19 sebagai langkah menekan penyebaran virus Corona.

Pada Agustus 2020, Badan PBB untuk pendidikan dan kebudayaan atau UNESCO melansir sebuah data tentang pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Menurut UNESCO, lebih dari satu miliar peserta didik di dunia terkena imbas dari penutupan sekolah di berbagai negara. Jumlah itu setidaknya setara dengan 65% pelajar di dunia yang terkena dampak. Dan, pada saat itu, setidaknya 105 negara masih menutup sekolah-sekolah.

Belakangan UNESCO mencatat sejumlah negara sudah membuka sekolah-sekolah dengan persyaratan sangat ketat (data Agustus 2020). Negara-negara itu, antara lain Jepang, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam, Laos, Timor Leste, Turkmenistan, Israel, Siprus, Botswana, Burundi, Nigeria, Belarus, Kroasia, Perancis, Austria, Swiss, Estonia, Swedia, Denmark, Norwegia, Uruguay, Ekuador, Nikaragua, Islandia, dan Greenland.

Ambil contoh Jepang. Pada Mei 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEXT) di Negeri Matahari Terbit itu memberikan izin pembukaan sekolah sejak 1 Juni 2020. Sebelumnya, MEXT menutup sekolah-sekolah di Jepang sejak 2 Maret 2020. Untuk membuka sekolah, MEXT telah mengeluarkan pedoman tentang cara untuk menghindari faktor-faktor yang dapat memunculkan infeksi Corona.

Lain lagi dengan Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan telah membuka sekolah pada 20 Mei 2020 untuk SMA, dan pada 3 Juni 2020 untuk SD dan SMP. Tetapi, hanya beberapa hari setelah dibuka, kasus Covid-19 merambah di antara siswa di Seoul. Merebaknya kembali Covid-19 ini membuat pemerintah Negeri Gingseng itu kembali menutup dan menunda pembukaan sekolah. Untuk sekolah yang masih dibuka, protokol kesehatan diberlakukan secara ketat, seperti pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, mewajibkan siswa memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Beberapa sekolah mengatur siswa untuk masuk secara bergantian pada hari yang berbeda, sedangkan sisanya belajar secara daring.

Contoh lainnya adalah Taiwan. Negara ini merupakan salah satu negara yang masih membuka sekolah di tengah wabah Covid-19. Pada 30 Maret 2020, Taiwan menjadi salah negara dari enam negara di dunia yang masih membuka sekolah. Meski sekolah tetap dibuka, Taiwan menerapkan protokol kesehatan dengan pemeriksaan suhu tubuh, dan aturan menggunakan masker.

Di negara pertama kali ditemukan virus Corona, yaitu Tiongkok, sekolah tatap muka sudah dibuka pada Agustus 2020. Sekolah dibuka secara bertahap, dimulai dari tingkat

08-15 JUN.pmd 12 1/1/2003, 1:46 AM

sekolah dasar hingga menengah. Beberapa sekolah dasar dan menengah di Beijing, misalnya, sudah memulai semester baru pada 29 Agustus 2020. Jumlah siswa yang bersekolah sekitar 590 ribu siswa. Sekolah-sekolah di Tiongkok juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sebelum masuk ke kelas, para siswa harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Di setiap lantai gedung sekolah tersedia peralatan cuci tangan. Selain itu, terdapat pula garis kuning sejauh satu meter dan tanda lainnya yang dilukis di lantai untuk mengingatkan siswa agar menjaga jarak. Sekolah juga memberikan secara cuma-cuma tas yang di dalamnya terdapat masker, handuk kertas yang sudah steril, dan kartu nama.

Di negara Asia Tenggara, Thailand menjadi negara yang membuka kembali sekolah tatap muka pada Juli 2020 setelah ditutup sejak pertengahan Maret 2020. Sekolah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh hingga memasang bilik darurat untuk jarak sosial di ruang kelas. Bahkan, Menteri Pendidikan Thailand, Nataphol Teepsuwan, pada Agustus 2020 menyebutkan semua sekolah diizinkan beroperasi tanpa batasan kapasitas atau aturan jarak sosial. Pusat Covid-19 negara itu pun setuju dengan pelonggaran aturan protokol kesehatan itu.

Beberapa negara lain juga telah membuka sekolah-sekolah pada Januari 2021 di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Pembukaan sekolah-sekolah itu mempertimbangkan keselamatan siswa dan guru, dan banyak persyaratan lainnya. Agaknya Indonesia perlu belajar dari negara lain yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah di tengah pandemi Covid-19.

Penerapan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) di Finlandia mungkin bisa menjadi contoh. Di Finlandia, sejak pandemi Covid-19, para siswa hanya mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah hanya dua bulan saja. Sejak pertengahan Mei 2020, anak-anak sekolah dasar kembali ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pemerintah Finlandia mengambil keputusan untuk membuka sekolah setelah melakukan kajian, riset, dan penelitian. Pihak sekolah melakukan perencanaan secara detil setelah mendapat arahan dari pemerintah daerah. Negara kecil Finlandia dengan populasi yang berjumlah 5,5 juta ini taat terhadap arahan pemerintah dalam menghadapi Covid-19. Lembaga Kesehatan Finlandia (THL) secara terus-menerus memberikan data terbaru mengenai perkembangan situasi secara nasional dan masing-masing daerah. Data dan informasi Satgas Covid-19 Finlandia ini sangat membantu masyarakat secara langsung, termasuk memberikan arahan kepada warga agar melakukan karantina mandiri selama 14 hari setelah berpergian dari luar negeri.

Apa yang bisa diadaptasi dan ditiru dari Finlandia dalam menyelenggarakan PTM di sekolah? Siswa hanya bertemu dengan guru dan teman-teman satu kelasnya saja. Mereka tidak bertemu dengan teman dari kelas lain. Saat istirahat dan berada di halaman yang luas pun, para siswa tidak diperkenankan bertemu teman dari kelas lain. Caranya, waktu istirahat diatur sedemikian rupa sehingga setiap kelas berbeda-beda. Mereka tidak saling berkontak fisik. Apabila terjadi kasus siswa terkena Covid-19 maka karantina hanya berlaku di kelas tersebut bukan ke kelas lainnya.

Untuk makan siang, pihak kantin sekolah membawakan makanan ke kelas masing-masing. Setelah selesai, peralatan makan dibawa kembali ke luar kelas. Di sekolah hanya guru dan siswa yang diperkenankan masuk. Sedangkan orangtua dan pihak luar tidak diizinkan masuk. Penjemputan hanya dilakukan di halaman sekolah. Semua pertemuan orangtua dan guru atau rapat-rapat sekolah dilakukan secara daring.

Aktivas hobi dan olahraga mengikuti prokol yang sama dengan kegiatan sekolah. Mereka hanya bertemu dengan teman satu kelompoknya. Jika ada yang terdeteksi virus Corona, penanganan dilakukan hanya pada kelompok itu saja. Siswa yang bersangkutan akan menjalankan karantia dan diberi kesempatan untuk melakukan tes Covid-19 di rumah sakit atau sarana kesehatan terdekat. Walaupun hasilnya negatif, siswa dan kelompoknya tetap menjalani karantina selama 10 hari dan melakukan pembelajaran jarak jauh (daring).

Negara-negara Eropa Utara, seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia, memiliki kebijakan yang sama dengan Finlandia. Siswa hanya bertemu dengan teman sekelasnya saja dan diatur waktu makan, istirahat, dan pulang untuk meminimalkan kontak.

Belajar dari pengalaman negara lain, maka diperlukan kerjasama antarsemua pihak dan kesiapan jajaran kesehatan, baik dalam menyediakan tes Covid-19 dan sarana kesehatan apabila pembelajaran tatap muka di sekolah dimulai. ❑

BSC *(dari berbagai sumber)*

08-15 JUN.pmd 13 1/1/2003, 1:46 AM

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Fadel Muhammad Wakil Ketua MPR RI

Jika Terus Menerus Daring, Kompetensi Belajar Anak Bisa Menurun

PEMERINTAH memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas dan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pembelajaran tatap muka itu akan dimulai pada tahun ajaran baru, Juli 2021. Keputusan untuk membuka sekolah ini diambil setelah semua pendidikan dan tenaga kependidikan, seperti guru, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sudah mendapat dua dosis suntikan vaksin Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa keputusan untuk pembelajaran tatap muka terbatas itu diambil karena penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung lama. Menurut Nadiem, penutupan sekolah karena pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih telah menimbulkan banyak dampak terhadap pendidikan, seperti anak putus sekolah, penurunan capaian belajar, hingga terjadinya kekerasan pada anak di rumah.

Sebenarnya, sejak Januari lalu, beberapa pemerintah daerah telah memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan berbagai syarat dan ketentuan, terutama berada di zona hijau dan memenuhi protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka itu tidak bersifat wajib. Namun, pada kenyataannya hanya sedikit sekolah yang melangsungkan pembelajaran tatap muka.

Menyongsong pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah mulai tahun ajaran baru, Juli 2021, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad. Berikut perbincangan Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD yang juga seorang guru besar di bidang ekonomi, terutama usaha kecil menengah dan koperasi. Petikannya.

Pemerintah membolehkan sekolah untuk mengadakan kembali belajar mengajar secara tatap muka mulai tahun ajaran baru pada Juli 2021 tentu dengan berbagai persyaratan. Bagaimana pendapat Bapak tentang keputusan dari pemerintah ini?

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama setahun lebih ini memang membawa dampak yang sangat luas. Dampak pandemi Covid-19 bukan hanya di sektor perekonomian saja, membuat sektor ekonomi lumpuh, tetapi juga berdampak pada sektor lainnya, seperti sektor pendidikan nasional.

Memang pada awalnya, kebijakan pemerintah untuk melakukan pendidikan jarak jauh atau sistem *online* (daring atau dalam jaringan) adalah untuk meminimalisir potensi penyebaran pandemi ke sekolah-sekolah dan menjaga anak-anak didik kita. Namun, pada perkembangannya ternyata penyebaran pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Banyak kalangan, mulai dari pakar pendidikan sampai pemerhati anak, khawatir. Sebab, jika sistem pembelajaran jarak jauh terlalu lama dilakukan maka akan berdampak buruk pada anak didik.

Contohnya, adanya kekhawatiran akan terjadi learning loss atau menurunnya kompetensi belajar di kalangan siswa. Nah, keputusan pemerintah yang memberikan izin atau kembali membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka, saya rasa akan baik. Saya setuju mengingat dampak buruk jangka panjang itu kalau terus-menerus dilakukan pembelajaran jarak jauh.

08-15 JUN.pmd 14 1/1/2003, 1:46 AM

Apakah tidak dikhawatirkan (masih terbuka kemungkinan) terjadi kluster baru Covid-19 di sekolah (sekalipun sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah), mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia belum bisa dikatakan mereda. Bagaimana tanggapan Bapak?

Ya, tentu karena penyebaran Covid masih ada, maka potensi munculnya kluster baru bisa saja terjadi. Di sinilah diperlukan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, pakar pendidikan, serta masyarakat. Sinergi itu untuk melakukan upaya bagaimana caranya agar pembelajaran tatap muka berhasil dan menghindari potensi kluster baru.

Saat saya berbincang dengan Gubernur Bali, mereka sangat optimistis bisa menjadikan wilayahnya aman dan menjadi zona hijau dengan percepatan program vaksinasi kepada 70% masyarakat Bali. Untuk itu, mereka butuh sekitar 6 juta doksin vaksin melalui Kemenkes.

Selain itu, pemerintah Bali juga sangat ketat dalam melakukan kampanye dan realisasi protokol kesehatan. Saya rasa, dengan kerja keras bisa menjadikan wilayah mereka aman dari pandemi. Ekonomi yang sempat lumpuh akan bangkit kembali. Demikian juga dengan sistem pembelajaran secara tatap muka akan dibuka lagi karena aman. Tetapi, tetap dengan pemantauan dan evaluasi yang ketat juga.

Daerah-daerah lain pun kami dorong untuk terus melakukan upaya-upaya luar biasa untuk menekan penyebaran pandemi ini agar aktivitas masyarakat, termasuk sekolah, kembali normal

Bagaimana pandangan Bapak mengenai pendidikan selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih. Apakah ada kecenderungan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia menurun selama pandemi?

Tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak pakar dan pemerhati pendidikan yang khawatir dengan dampak yang akan terjadi kepada anak didik selama pandemi. Saya pribadi juga sangat khawatir, sebab pandemi sudah terlalu lama. Pasti ada kecenderungan menurunnya kualitas pendidikan di masa pandemi. Saya sendiri memiliki lembaga pendidikan yang saya awasi betul jangan sampai anak didik terdampak buruk akibat pandemi ini.

Intinya, kita semua menjaga agar jangan sampai pandemi ini menyebabkan kualitas anak didik kita yang merupakan generasi muda penerus kepemimpinan bangsa menjadi generasi yang tidak unggul. Kualitas pendidikan selama pandemi ini kita harus jaga bersama.

Para siswa pun sudah merasa ingin kembali merasakan suasana sekolah setelah setahun lebih berada di rumah. Bagaimana Bapak melihat keinginan anak kembali bersekolah?

Ya, sudah tentu ada semacam kebosanan, jenuh, dan ingin bersekolah seperti sediakala, bertemu teman-teman dan guru belajar bersama, bermain. Keinginan mereka wajar. Tapi, saya lihat, pemerintah memang sedang berusaha keras, sebab jangan sampai membuka kembali pembelajaran tatap muka malah membuka penyebaran pandemi baru yang lebih luas.

Apa kelebihan dan kekurangan belajar secara daring dan belajar dengan tatap muka. Apakah dengan belajar tatap muka, para guru dan siswa bisa lebih serius dan intens dalam belajar mengajar?

Tentu saja semuanya memiliki keunggulan dan potensi keburukan jika tidak dikelola dengan baik. Kelebihan belajar daring akan menekan potensi penyebaran pandemi. Kekurangan belajar jarak jauh atau secara online itu pasti akan membutuhlan perangkat pendukung yang baik, seperti laptop atau HP dan juga internet yang bagi sebagian masyarakat itu sangat mahal, bahkan ada yang tidak mampu. Ini yang mesti dipikirkan. Kekurangan lainnya adalah minimnya interaksi psikologis antarguru dan murid yang banyak didapat saat belajar tatap muka.

Apa masukan dari Bapak agar belajar tatap muka pada masa pandemi ini bisa berjalan efektif, efisien, dan mencapai sasaran?

Pertama, langkah yang mesti dilakukan adalah melihat lebih dulu peningkatan penyebaran pandemi. Jika pandemi sudah mulai menurun landai maka pembelajaran tatap muka bisa segera dilakukan dengan secara bertahap. Sebagian siswa bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, dan sebagian lagi tetap melakukan pembelajaran di rumah secara online. *Kedua,* semua ini harus secara terus-menerus dipantau dan dievaluasi. ❑

08-15 JUN.pmd 15 1/1/2003, 1:46 AM

Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kebersamaan Gotong Royong dan Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan Hari Kelahiran Pancasila sebagai momentum untuk membangun kembali kebersamaan, gotong royong, serta optimisme rasa kebangsaan di tengah pandemi Covid-19. Gotong royong dan optimisme rasa kebangsaan di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan akan membawa Indonesia menjadi lebih tangguh dan lebih maju.

"Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, pada 76 tahun lalu, telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara gotong royong. Sikap gotong royong yang merupakan pengejawantahan dari sila Pancasila harus terus ditumbuhkembangkan seluruh elemen bangsa agar Indonesia mampu segera terbebas dari pandemi Covid-19," ujar Bamsoet usai mengikuti Upacara Hari Kelahiran Pancasila secara daring di Jakarta, Selasa (1/6/21).

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ini dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor. Mengenakan pakaian adat Aceh, Bamsoet didaulat membaca Teks Pancasila. Sementara Ketua DPR RI, Puan Maharani, membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Turut hadir antara lain Wakil Presiden, Ma'ruf Amin; Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri; Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno; Ketua DPD, La Nyalla Mattaliti; Ketua MA, Muhammad Syarifuddin; Ketua MK, Anwar Usman; Ketua KY, Mukti Fajar; Ketua BPK, Agung Firman Sampurna; para menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua BPIP dan jajaran BPIP; serta para duta besar negara sahabat yang hadir secara daring.

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai, semangat gotong royong yang digelorakan Bung Karno sangat terasa di tengah-tengah masyarakat selama pandemi Covid-19. Rasa senasib sepenanggungan muncul dengan melakukan berbagai aksi kemanusiaan, membantu sesama yang terkena dampak Covid-19. Rakyat pun mematuhi imbauan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan sebagai bagian untuk bersama memutus mata rantai Covid-19.

"Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 31 Mei 2021, jumlah penderita Covid-19 bertambah sebanyak 102.006 jiwa. Sehingga, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.821.703 jiwa. Dari

16-27 JUN.pmd 16 1/1/2003, 12:39 AM

jumlah tersebut sebanyak 1.669.119 orang dinyatakan sembuh, dan 50.578 orang meninggal dunia," urai Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, per 31 Mei 2021, jumlah penduduk Indonesia yang telah mendapatkan vaksinasi tahap I mencapai 16.413.672 orang. Sementara, vaksinasi tahap II sudah diberikan kepada 10.631.835 orang. Pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi minimal 181.554.465 jiwa untuk mencapai herd immunity.

"Semua pihak harus menyukseskan program vaksinasi pemerintah, khususnya melalui vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong yang dilaksanakan perusahaan bagi para buruh dan karyawan ini merupakan salah satu wujud sifat gotong royong dalam membantu pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini optimistis, keberhasilan program vaksinasi Covid-19 akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4 hingga 5% di akhir tahun 2021.

"Keberhasilan vaksinasi Covid-19 akan menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Selain tetap perlu penerapan protokol kesehatan secara ketat di masyarakat. Ketika herd immunity masyarakat telah terbentuk dengan baik, otomatis roda perekonomian yang terpuruk akibat pandemi bisa kembali tumbuh," pungkas Bamsoet. ❑

16-27 JUN.pmd 17 1/1/2003, 12:39 AM

Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021

Pancasila dan Kemerdekaan Bangsa Indonesia

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PADA hari ini, 1 Juni 2021, bangsa Indonesia, baik dari jajaran pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat luas memperingati hari lahir ke-76 Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni didasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Surat Keputusan Presiden tersebut melengkapi dokumen kenegaraan surat Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2008 tentang Hari Konstitusi yang ditetapkan setiap tanggal 18 Agustus. Sebagai norma dasar (grundnorm) dan sebagai norma fundamental negara (staat- fundamentalnorm), Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, termasuk sumber dari pembentukan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia.

Proses pembentukan Pancasila oleh para Pendiri Bangsa sejak dipidatokan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK dan mengalami perkembangan dalam rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno hingga mencapai konsensus final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang juga diketuai oleh Bung Karno adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, dan menjadi satu tarikan nafas dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan Bung Karno dan didampingi Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia, disebutkan bahwa "….hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."

Teks proklamasi tersebut kemudian ditindaklajuti oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya satu hari setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut, yaitu 18 Agustus 1945, yang langsung memutuskan dan menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, serta menetapkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merdeka di mana di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.

Dengan demikian antara proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka adalah dua peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hal itu ibarat dua sisi mata uang yang saling memberi bentuk dan nilai.

Oleh karena itu, jika saat ini ada pihak-pihak yang mempersoalkan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka berarti sama dengan mempersoalkan kembali proklamasi atau pendirian negara Indonesia merdeka oleh para pendiri bangsa.

Selamat memperingati Hari Lahir ke-76 Pancasila. Jaya dan abadilah Pancasila selama-lamanya.

Jakarta 1 Juni 2021

Dr. Ahmad Basarah,
Wakil Ketua MPR RI/ Ketua DPP PDI Perjuangan/
Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI

16-27 JUN.pmd 18 1/1/2003, 12:39 AM

Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021

PRESIDEN Joko Widodo pada 2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016. Penetapan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan bernilai strategis bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meng-arusutamakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui refleksi yang bersifat tahunan. Bangsa Indonesia diajak untuk merenung-kan kembali aspek filosofis dan historis dari kelahiran Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, serta pedoman hidup bangsa Indonesia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema: "Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh." Tema tersebut sangat relevan apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi hari ini. Harus jujur diakui bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila mulai tergerus. Arus globalisasi yang sangat masif dan masuknya anasir budaya luar yang tidak cocok dengan budaya bangsa menjadi penyebabnya. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika Indonesia menghadapi beragam ancaman yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan. Maka dari itu, refleksi terhadap hari kelahiran Pancasila menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pembelajaran

Refleksi terhadap Hari Lahir Pancasila sejatinya akan menghantarkan bangsa Indonesia pada banyak pembelajaran dan kearifan yang diberikan oleh para pendiri bangsa (founding fathers). Perumusan Pancasila merupakan langkah visioner yang ditempuh oleh para pendiri bangsa yang peduli akan pentingnya sebuah dasar negara sebagai landasan eksistensi dan dinamika Indonesia pasca kemerdekaan. Para pendiri bangsa juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan akan lebih sulit dan kompleks dari sekedar melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah pedoman hidup bagi bangsa dan negara dalam berdinamika ke depan.

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara bukan merupakan sebuah proses yang mudah. Ada banyak dialektika dan perdebatan di dalamnya. Masing-masing perumus Pancasila, yakni Soekarno, Yamin, dan Soepomo, memiliki pandangannya masing-masing. Namun demikian, kearifan dan mekanisme musyawarah yang selalu dikedepankan mampu menuntun para pendiri bangsa tersebut untuk bersepakat bulat dengan merumuskan sila-sila Pancasila seperti yang kita miliki hari ini. Yang menjadi pembelajaran penting dalam proses formulasi tersebut adalah sikap para pendiri bangsa yang mengedepankan dialog dan mencari persamaan ketimbang berdiri di atas perbedaan pandangan dan pendapat masing-masing.

Dalam sekuensi perumusan dasar negara, yakni Mei hingga Agustus 1945, ada pembelajaran penting lainnya yang bisa kita semua renungi. Redaksional sila pertama dalam rumusan dasar negara yang disusun oleh Panitia Sembilan yang lazim disebut sebagai Piagam Jakarta akhirnya dianulir karena hanya merepresentasikan agama tertentu, sedangkan sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan terdiri atas beragam agama dan keyakinan. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan digantikan menjadi _"Ketuhanan Yang Maha Esa"_ merupakan wujud kompromi anak bangsa yang menghargai keberagaman, mengedepankan persatuan dan kesatuan, serta mengindari perpecahan.

Pembelajaran lainnya yang bisa kita semua petik dalam perumusan dasar negara adalah kejelian para pendiri bangsa untuk merumuskan nila-nilai budaya bangsa yang saling terkait dan mendasari satu sama lain sehingga lahirlah sebuah dasar negara dan ideologi yang bersifat holistik, integral, dan komprehensif. Sila pertama Pancasila, menjadi dasar bagi sila kedua, demikian seterusnya. Eksistensi masing-masing sila tidak berdiri sendiri melainkan saling menopang dan melengkapi satu sama lain. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh Pancasila yang juga disebut sebagai _staatsfundamentalnorm_ atau sumber dari segala sumber hukum yang ada.

16-27 JUN.pmd 19 1/1/2003, 12:39 AM

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tantangan Kebangsaan

Proses refleksi dengan menyelami kembali kebajikan-kebajikan yang melekat pada perumusan Pancasila tersebut seyogianya menjadi pijakan bagi segenap bangsa Indonesia saat ini untuk mengaktualiasikan kembali secara murni dan konsisten nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi ancaman dan tantangan kontemporer yang ada. Nilai-nilai Pancasila yang mencakupi nilai religius atau ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai musyawarah mufakat, serta nilai keadilan, harus mewujud dalam sikap tindak manusia Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bagi para perumus kebijakan dan pembuat keputusan, nila-nilai Pancasila sudah selaiknya menjadi nafas dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil agar semata-mata ditujukan bagi kepentingan rakyat.

Tantangan kebangsaan yang dihadapi saat ini sangat relevan sebagai pemantik bagi diaktualisasikannya kembali nilai-nilai luhur Pancasila. Pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian ke jurang resesi pada 2020 menjadi pengingat bagi kita semua agar benar-benar konsisten dalam menerapkan kebijakan ekonomi berbasis Pancasila (Ekonomi Pancasila). Begitu masifnya bencana alam dan musibah yang terjadi di tanah air sepanjang 2021 menjadi pemantik bagi kita semua untuk semakin mempertebal semangat kemanusiaan dengan mengulurkan tangan dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Tingginya intensitas konflik dan kekerasan di Papua menjadi pelecut untuk menggalang kembali semangat persatuan dan kesatuan demi mengukuhkan soliditas anak bangsa.

Perbedaan cara pandang dan kebijakan dalam merespons pandemi COVID-19 antarpemangku kepentingan menjadi tantangan terhadap komitmen untuk mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Demikian juga halnya dengan problematika kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat di era pandemi yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Nilai-nilai Pancasila tidak cukup dipahami secara konseptual saja, tapi juga perlu dikontekstualisasikan dalam laku hidup sehari-hari sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Tanpa aktualisasi, nilai-nilai Pancasila hanya akan bersifat normatif saja, tergerus dan digempur oleh nilai-nilai budaya asing yang masuk ke ruang-ruang publik, terutama menghantam generasi muda yang sangat rentan terpengaruh.

Refleksi terhadap aspek filosofis dan historis Pancasila juga diharapkan mampu menuntun segenap bangsa Indonesia untuk mengarusutamakan Pancasila dalam segenap aktivitas sehari-hari. Kita tentu tak ingin menjadi seperti Amerika Serikat dan Tiongkok yang bersikap ambigu dengan ideologi yang dipegang. Tiongkok misalnya, walaupun secara eksplisit menganut sosialisme/komunisme, tapi tak segan-segan mempraktikkan liberalisme/kapitalisme dalam perdagangan. Amerika Serikat di sisi lain, tak sungkan-sungkan menerapkan kebijakan "Buy American" yang bersifat protektif dan bertentangan dengan prinsip kapitalisme yang dianut. Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak boleh diterapkan secara ambigu seperti kedua negara tersebut. Pancasila harus manunggal dan mewujud dalam setiap pikiran, ucapan, dan sikap tindak manusia Indonesia sehari-hari. Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2021.

Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.,
Wakil Ketua MPR R I Periode 2019-2024

16-27 JUN.pmd 20 1/1/2003, 12:39 AM

Hari Lahir Pancasila

Saling Mawas Diri untuk Selalu di Koridor Pancasila

Wakil Ketua MPR, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, mengatakan bahwa rakyat Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan dasar negara di dunia yang unik, sangat cocok dengan keberagaman bangsa Indonesia yang besar.

PANCASILA, menurut Fadel Muhammad, terbukti mampu mengikat keberagaman bangsa Indonesia dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bertahan hingga saat ini. Untuk itu, tambah Fadel, sebagai anak bangsa sudah semestinya menjaga dan memegang teguh Pancasila yang sudah menjadi jatidiri bangsa, serta menjadikannya sebagai *way of life* dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Fadel Muhammad usai mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual dari Nusa Dua, Bali, yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) dan dihadiri Presiden RI Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara, Selasa (1/6/2021).

Lebih jauh Fadel menekankan, ketika Pancasila terpatri dalam jiwa setiap rakyat, maka bangsa Indonesia akan lebih utuh dan solid sehingga segala upaya untuk membangun negara menuju kesejahteraan bersama akan mudah sekali terwujud.

"Memang dalam melaksanakan Pancasila banyak sekali tantangan dan kendalanya, seperti soal keadilan sosial dan fenomena aksi teroris KKB Papua yang mengancam Persatuan Indonesia. Tapi, saya yakin, Pancasila tak tergoyahkan dan itu sudah terbukti sejak dulu," ujarnya.

Melihat begitu pentingnya Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini mengajak seluruh elemen bangsa, mulai hari ini dan ke depan untuk selalu waspada terhadap segala sesuatu yang berpotensi merusak ideologi negara tersebut.

"Mari kita semua saling mawas diri, saling mengingatkan untuk selalu berada di koridor Pancasila. Tanamkan rasa bangga terhadap Pancasila. Sebab, jika sudah tertanam kuat maka akan muncul rasa cinta yang luar biasa terhadap Pancasila," ujar Fadel, seraya mengucapkan: Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah kepada kita semua. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

16-27 JUN.pmd 21 1/1/2003, 12:39 AM

Diskusi Pancasila dan Tantangan Kebangsaan

Bumikan Nilai-nilai Pancasila dalam Sikap dan Perilaku Keseharian

Perlu membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai roh dan jiwa bangsa Indonesia untuk menjawab berbagai tantangan zaman.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan, tidak bisa dipungkiri di era ini muncul berbagai tantangan terhadap kebangsaan kita, akibat dinamika yang terjadi di berbagai bidang di dunia. “Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, bangsa Indonesia perlu menegaskan jati dirinya lewat pengamalan sejumlah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” ujar Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Pancasila dan Tantangan-Tantangan Kebangsaan, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (2/6).

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM., (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu dihadiri Dr. Otto Gusti Madung (Ketua STFK Ledalero, Maumere, Flores), Mujtaba Hamdi (Direktur Eksekutif Wahid Institute), Dimas Oky Nugroho, Ph.D., (Direktur Eksekutif Akar Rumput Research & Consulting), Gatot Prio Utomo (Ketua Umum NU Circle), dan Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., (Ketua DPP Partai NasDem) sebagai narasumber. Serta Dr. Ngatawi Al-Zastrouw (Budayawan), Dr. Diana Mutiah (Pendidik), dan Nyoman Wiryadinatha (Jurnalis) sebagai penanggap.

Selanjutnya, Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan bahwa Pancasila adalah bagian dari empat konsensus kebangsaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Agar mampu menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, anak bangsa harus mampu membumikan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan perilaku kesehariannya.

Sebagai narasumber, Ketua STFK Ledalero, Maumere, Flores, Otto Gusti Madung mengungkapkan, bangsa Indonesia dewasa ini sedang menghadapi sejumlah tantangan yang dapat membahayakan persatuan bangsa. Tantangan itu, jelas Otto, antara lain adalah radikalisme agama, globalisme ekonomi, kesenjangan sosial, dan korupsi.

Menurut Otto, bangsa Indonesia berada dalam pergaulan global. Karena itu, usaha untuk menghidupi Pancasila sebagai landasan etis kehidupan bangsa harus ditempatkan dalam dialog dengan etika politik global, yakni faham hak-hak asasi manusia.

16-27 JUN.pmd 22 1/1/2003, 12:39 AM

Direktur Eksekutif Wahid Institute, Mujtaba Hamdi berpendapat, dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari 17.441 pulau dan 633 suku bangsa, Pancasila sangat dibutuhkan sebagai perekat dari keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

Menurut Mujtaba, tantangan bangsa saat ini adalah intoleransi dan radikalisme. Berdasarkan survei Wahid Institute, ujarnya, kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjawab tantangan kebangsaan saat ini, cukup tinggi, sekitar 82%. Dengan kondisi tersebut, menurut Mujtaba, penting untuk tetap membuka ruang dikusi terkait pemahaman nilai-nilai kebangsaan, agar tetap memberikan kewarasan berpikir anak bangsa dalam menjawab tantangan yang ada saat ini.

Sementara, Direktur Eksekutif Akar Rumput Research & Consulting, Dimas Oky Nugroho mengungkapkan berdasarkan data BPS 2020, kelompok usia 16-39 tahun tercatat 64 juta orang.

Dengan kondisi itu, jelas Dimas, peran generasi muda sangat besar untuk terlibat aktif dalam proses membangun bangsa di masa datang. Karena itu, tambahnya, nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus benar-benar dipahami oleh generasi muda.

Menurut Dimas, perlu upaya agar generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan yang lebih dalam terkait nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila, bukan sekadar indoktrinasi atau jargon. Tetapi, tegasnya, sebuah sistem yang mampu meningkatkan pemahaman generasi muda sehingga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut.

Untuk itu, katanya lebih lanjut, kita memerlukan kebijakan publik yang konsisten dan keteladanan yang mampu mengakselerasi pemahaman anak bangsa terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa itu.

Ketua Umum NU Circle, Gatot Prio Utomo, mengungkapkan, tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah disintegrasi politik dan sosial, teokratisme, oligarki

dan korupsi. Untuk menjawab tantangan tersebut, jelas Gatot, pembangunan ideologi harus senafas dan sebangun dengan pembangunan karakter anak bangsa.

Ketua DPP Partai NasDem, Atang Irawan menilai globalisasi dan kebencian terhadap Orde Baru berdampak pada pemahaman anak bangsa terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pasca-Orde Baru, jelas Atang, terjadi sejumlah perubahan pola pengajaran Pancasila terhadap generasi muda, yang berdampak konfigurasi materi ajar terkait Pancasila jauh berkurang.

Maka, ujar Atang, wajar bila generasi muda saat ini sangat minim pemahamannya terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kondisi itu, jelasnya, ditambah lagi dengan adanya globalisasi yang memungkinkan cara pandang dari luar bebas masuk ke setiap individu dan memengaruhi cara pandang dan cara berpikir anak bangsa.

Karena itu, Atang berpendapat, harus segera dilakukan pembenahan secara sistematis melalui kebijakan dan sistem pendidikan yang tepat untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan setiap warga negara.

Budayawan, Ngatawi Al-Zastrouw, mengandaikan Pancasila sebagai berlian yang hanya bisa bernilai dan bermanfaat bagi orang paham mengolahnya. Pelaksanaan Pancasila, jelas Zastrouw, memerlukan kebeningan hati, kepekaan rasa dan kelapangan berpikir setiap anak bangsa. ❑

16-27 JUN.pmd 23 1/1/2003, 12:39 AM

Webinar Pancasila

Bamsoet: Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sistem nilai bukanlah sekedar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja, melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan sebagai kebiasaan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, walaupun sejak awal kelahirannya pada 76 tahun yang lalu, Pancasila telah 'ditasbihkan' sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Namun, tidak menutup mata bahwa setelah lebih dari tiga perempat abad masih saja ditemui pandangan yang mempertanyakan, bahkan mengabaikan kehadiran Pancasila. Padahal, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas yang kuat.

Pancasila termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Juga dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

"Sebagai contoh, survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda terhadap responden milenial dari 34 provinsi, mencatat hanya 61% responden merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka. Sementara 19,5% bersikap netral, dan 19,5% lainnya menganggap Pancasila hanya sekedar istilah yang tidak dipahami maknanya," ujar Bamsoet dalam Webinar 'Pancasila sebagai Way of Life dan Sumber Segala Sumber Hukum', secara virtual di Jakarta, Sabtu (29/5/21).

Turut hadir, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman; Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Kaelan; Sestama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kardjono; Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahyangan, Ivan Petrus Sadik; dan Bambang Sadono, host kanal 'Inspirasi untuk Bangsa.'

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, survei LSI tahun 2018 mencatat bahwa dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, masyarakat yang pro terhadap Pancasila mengalami penurunan sekitar 10%, dari 85,2% pada 2005 menjadi 75,3% pada 2018. Bahkan publikasi survei CSIS mencatat sekitar 10% generasi milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain.

Data itu menggambarkan besarnya tantangan menjadikan Pancasila sebagai gagasan dan rujukan berperilaku yang menarik, terutama bagi generasi muda. "Globalisasi dan perkembangan teknologi telah memengaruhi berbagai macam aspek kehidupan umat manusia melalui produk-produk dan gaya hidup yang dikemas dan ditampilkan secara sangat menarik. Daya tarik itu harus dapat dilampaui oleh Pancasila," tandas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini juga menyoroti permasalahan yang tidak kalah penting, menyangkut metode pembelajaran Pancasila di berbagai tingkatan pendidikan. Mengingat Pancasila sebagai sistem nilai, bukanlah sekedar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja, melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan sebagai kebiasaan. "Bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri setiap anak bangsa. Sehingga Pancasila senantiasa menjadi bagian dari kepribadian orang Indonesia," sorot Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengisyaratkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri bangsa, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

"Sebagai sumber dari segala sumber hukum, mengamanatkan bahwa Pancasila adalah inti terdalam dari sumber cita hukum. Segala peraturan perundang-undangan harus selaras, tunduk, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," tegas Bamsoet.

Ironisnya, kata Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, merujuk rekapitulasi perkara pengujian Undang-Undang yang ter-registrasi di Mahkamah Konstitusi sejak 2003 hingga saat ini, terdapat 1.449 perkara yang diajukan ke MK. Dari jumlah perkara yang diajukan tersebut, MK telah membuat 1.401 putusan, di mana sebanyak 269 atau

16-27 JUN.pmd 24 1/1/2003, 12:39 AM

sekitar 19,2% gugatan dikabulkan oleh MK.

"Data itu menunjukkan masih ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Konstitusi. Dan dapat dipastikan, juga bertentangan dengan Pancasila. Karena segala norma hukum yang diatur dalam Konstitusi adalah bersumber dari, dan dijiwai oleh Pancasila," terang Bamsoet. ❑

Target Pertumbuhan Ekonomi

Syarief Hasan: Perlu Roadmap Perekonomian Indonesia

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Kamis, (27/5/2021), pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7% pada kuartal II-2021.

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mendorong pemerintah untuk membuat roadmap perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Pasalnya, pemerintah menyampaikan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi mencapai 7% pada kuartal II-2021 dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah pada Kamis, (27/5/2021)

Syarief Hasan menegaskan, pemerintah harus melakukan kajian yang matang dalam merancang target pertumbuhan ekonomi. "Dari hasil kajian tersebut, pemerintah harus menghadirkan roadmap perekonomian Indonesia pasca hantaman Covid-19, bukan hanya membuat target tinggi yang sangat ambisius", ungkap Syarief Hasan di Jakarta, akhir Mei lalu.

Syarief Hasan mempertanyakan perbaikan ekonomi yang dimaksud tersebut sesuai Rakornas tersebut. "Hingga hari ini, pertumbuhan ekonomi masih minus dan resesi, pengganggguran masih terus bertambah, serta daya beli masyarakat juga masih rendah. Kenyataan tersebut harus diakui oleh pemerintah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pemulihan.", ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun mendorong pemerintah untuk membuat grand desain penyelamatan ekonomi Indonesia. "Pemerintah jangan hanya sekedar membuat target tinggi hingga 7%, lalu melakukan revisi target di tengah jalan, seperti yang terjadi dalam kurun tahun 2020. Sebab, ini menunjukkan kurang realistis dalam pengelolaan negara", tegas Syarief Hasan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Apalagi, potensi pengangguran akan semakin bertambah dengan kebijakan PHK dari beberapa perusahaan dan industri besar di Indonesia. "Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat kebijakan pensiun dini dan pemotongan gaji agar dapat bertahan. Bahkan, supermarket Giant menutup seluruh gerainya karena hantaman pandemi yang berakibat pertambahan jumlah angka pengangguran.", ungkap Syarief Hasan.

Angka itupun menambah data dari Kemenaker RI yang menyebutkan jumlah pengangguran selama pandemi Covid-19 bertambah sebesar 3,05 juta. Bahkan, KADIN menyebutkan lebih dari 6,4 juta pekerja di PHK hingga akhir 2020. Banyaknya PHK ini meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Syarief Hasan mengingatkan, pemerintah mengenai kurva pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Selama hampir dua periode, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai 5.2 %, bahkan sebelum Pandemi Covid-19. Sehingga, rencana pertumbuhan ekonomi di atas 7% tidak realistis dan ambisius apalagi tantangan pandemi Covid-19 yang sangat luar biasa "ungkapnya

Politisi senior Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah tidak hanya membuat kebijakan jangka pendek, tetapi juga kebijakan jangka panjang. "Selama ini pemerintah lebih banyak membuat kebijakan jangka pendek, seperti gelontoran dana untuk instansi dan bantuan langsung. Pemerintah juga harus membuat kebijakan jangka panjang untuk penguatan ekonomi Indonesia, seperti penguatan UMKM hingga evaluasi terhadap pungutan-penguatan yang menghambat ekspor agar ekspor semakin meningkat.", tutup Syarief Hasan. ❑

16-27 JUN.pmd 25 1/1/2003, 12:39 AM

Terima Dubes Guatemala untuk Indonesia

Bamsoet Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI, Bambang Soesatyo, mengajak Duta Besar Guatemala untuk Indonesia, Mr. Jacobo Cuyun, meningkatkan hubungan dagang Guatemala dengan Indonesia. Tren perdagangan kedua negara tumbuh 11,86% selama periode 2014-2018. Nilai perdagangan kedua negara pada 2018 mencapai US$ 50,29 juta di mana Indonesia surplus US$ 48,56 juta, turun sedikit pada 2019 menjadi US$ 42,9 juta dengan Indonesia masih surplus US$ 40,54 juta. Pada 2020, meningkat menjadi US$ 65,98 juta dengan surplus pada Indonesia mencapai US$ 35,92 juta.

"Sebagai sesama negara produsen dan eksportir kelapa sawit, Indonesia dan Guatemala juga dapat bergabung dalam Organisasi CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries), untuk bersama-sama dengan negara anggota lainnya mengembangkan sektor kelapa sawit, termasuk memerangi kampanye negatif tentang kelapa sawit," ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Guatemala untuk Indonesia Jacobo Cuyun, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (27/5/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Indonesia dan Guatemala bisa saling bersinergi membantu pemulihan ekonomi nasional kedua negara yang terdampak pandemi Covid-19. Antara lain melalui peningkatan interaksi pelaku bisnis kedua negara, untuk saling mengenal potensi dan produk unggulan.

"Salah satunya dengan memaksimalkan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama antara KADIN Indonesia dengan CACIF Guatemala (Komite Koordinasi Asosiasi Pertanian, Komersial, Industri dan Keuangan, atau

16-27 JUN.pmd 26 1/1/2003, 12:39 AM

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), yang ditandatangani pada Oktober 2020," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengundang para pebisnis Guatemala berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia dan INA-LAC (Indonesia-Latin American and the Caribbean) Business Forum 2021 yang rencananya diselenggarakan pada Oktober 2021. Meskipun dalam masa pandemi, dua agenda tersebut tetap diselenggarakan secara virtual sebagai bagian usaha Indonesia memperluas akses perdagangan internasional, termasuk ke wilayah Amerika Latin dan Karibia.

"Kita juga mengundang siswa dari Guatemala untuk memanfaatkan program beasiswa dari Pemerintah Indonesia, yaitu Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang untuk program bergelar (S1-S3), serta program non-gelar Darmasiswa. Pada 2013, terdapat satu siswa dari Guatemala yang berpartisipasi dalam program tersebut. Ke depan, jumlahnya harus meningkat, sebagai bagian peningkatan kerjasama pendidikan kedua negara," tandas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, di bidang budaya, kedua negara memiliki peninggalan peradaban nenek moyang yang perlu dilestarikan. Seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Indonesia, serta Tikal Temple di Guatemala. Kedua negara dapat saling bersinergi mengembangkan kerja sama terkait perlindungan dan pemeliharaan atas situs bersejarah tersebut.

"Jumlah kunjungan wisatawan Guatemala ke Indonesia masih kecil, di bawah 1.000 orang/tahun, namun menunjukkan pertumbuhan selama 3 tiga tahun terakhir. Setelah berakhirnya pandemi Covid-19, Indonesia siap menyambut para turis asal Guatemala," pungkas Bamsoet. ❑

16-27 JUN.pmd 27 1/1/2003, 12:39 AM

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Haluan Negara, Pertahanan Nasional, dan Urgensi Percepatan Infrastruktur Teknologi Informasi

KASUS pencurian data pribadi berisi informasi lengkap tentang 279 juta warga negara Indonesia (WNI) hendaknya semakin membangun kesadaran bersama tentang urgensi penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mumpuni. Karena Indonesia sudah dalam era digital, MPR RI memastikan halauan negara sebagai arah dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan akan merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur TIK sebagai prioritas guna mewujudkan dan mendukung ketahanan siber.

Kapasitas dan kapabilitas Infrastruktur TIK Indonesia memang belum mumpuni, karena target pembangunannya masih jauh dari rampung. Oleh pemerintah, pembangunan infrastruktur TIK ditargetkan rampung pada 2032. Kalau rentang waktu penyelesaiannya masih butuh waktu demikian lama, orang awam sekali pun bisa membayangkan gambaran tentang kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TIK nasional saat ini.

Oleh karena kapasitas dan kapabilitasnya yang masih jauh dari memadai, infrastruktur TIK di dalam negeri belum efektif mencegah pembobolan dan pencurian data. Bahkan juga belum mumpuni untuk merespons potensi ancaman atau insiden *malicious software* yang dikenal dengan sebutan malware. Dan, oleh karena faktor terbatasnya kapasitas dan kapabilitas itu pula, masih terjadi kesenjangan digital. Hingga tahun ini, sekitar 12.548 desa atau kelurahan belum mendapatkan akses broadband 4G.

Pencurian dan pembobolan data pribadi bukan cerita atau kasus baru. Pencurian dan jual beli data publik sudah lama berlangsung. Terkesan ada pembiaran sehingga pencurian data itu leluasa dilakukan. Sudah lama pula masyarakat mengeluhkan masalah ini, tetapi respon dari pihak berwenang amat minim, bahkan nyaris tidak ada sama sekali.

Contoh kasus yang masih berlangsung hingga hari ini adalah pembocoran atau penyebarluasan nomor telepon seluler pribadi oleh oknum di sejumlah istitusi layanan publik. Masyarakat mengeluh karena nomor teleponnya begitu sering dijejali dengan iklan, promosi, dan ragam penawaran jasa atau produk lainnya, termasuk maraknya tawaran kredit tanpa agunan (KTA) yang tidak jelas benar latar belakangnya. Tidak pernah ada respons dari pihak berwenang terhadap fakta seperti ini.

Kasus pencurian data pribadi bermuatan informasi lengkap 279 juta WNI itu memang bukanlah yang pertama. Namun, kasus ini menjadi heboh dan viral karena skalanya yang masif dan detail datanya lengkap. Kasus ini menambah panjang daftar pencurian dan penyalahgunaan data publik. Masyarakat tentu masih ingat dengan beberapa kasus sebelumnya.

Misalnya, dalam rentang waktu setahun terakhir saja, ada lima kasus pembocoran atau pencurian data pribadi yang terekspos ke publik. Sebut saja bocornya data pribadi 230 ribu pasien Covid-19 di Indonesia, bocornya 2,3 juta data pribadi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pembocoran 1,2 juta data pribadi konsumen perusahaan e-commerce Bhinneka, 13 juta data pribadi pemilik akun e-commerce Bukalapak, dan bocornya 91 juta data pribadi pemilik akun e-commerce Tokopedia.

Kebocoran data pribadi informasi lengkap 279 juta WNI yang diperjualbelikan secara online di forum hacker Raid Forums tak hanya menyentak publik, tapi juga menampar pemangku kepentingan. Kominfo turun tangan, BPJS Kesehatan ikut mendalami, karena data

28-38 JUN.pmd 28 1/1/2003, 1:09 AM

yang bocor itu identik dengan data milik BPJS Kesehatan.

Bahkan, Bareskrim Mabes Polri pun ikut pula melakukan pengusutan. Persoalannya memang tidak boleh lagi disederhanakan. Sebab, data yang diperjualbelikan itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, bahkan besaran atau nilai gaji.

Terlepas dari institusi mana sumber kebocorannya, kasus ini mengonfirmasi dan juga menyadarkan semua pihak tentang urgensi

percepatan pembangunan infrastruktur TIK. Tanpa infrastruktur TIK yang mumpuni, Indonesia lemah di sektor ini. Karena kapasitas dan kapabilitasnya masih jauh dari memadai, tidak mengherankan jika pembocoran atau pencurian data pribadi akan menjadi peristiwa atau kasus yang berulang.

Kendati pembocoran dan pencurian itu hanya terfokus pada data pribadi milik masyarakat, kasus ini dengan sangat jelas menggambarkan lemahnya ketahanan siber Indonesia. Kasus ini pun mengusik pemikiran banyak orang tentang aspek ketahanan nasional pada era digital sekarang ini. Apa jadinya jika yang bocor dan dicuri itu data-data tentang rahasia negara yang sifatnya sangat sensitif dan bisa membahayakan pertahanan nasional?

Infrastruktur TIK tak sekadar komponen fisik, tetapi juga berbagai komponen perangkat lunak dan jaringan. Urgensinya nyata dan tak terhindarkan ketika semua orang tak lagi bisa mengingkari perubahan zaman, dari yang sebelumnya konvensional atau serba manual harus segera beralih ke serba digital. Semua orang, tanpa kecuali, harus mengikuti percepatan perubahan ini. Konsekuensinya jelas, yakni tertinggal, jika menolak atau terlambat mengikuti perubahan sekarang ini.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, adalah 5,32, atau sudah meningkat dibandingkan dengan 2018 yang 5,07 (dari skala 0"10). Namun, jika dibandingkan negara lain di tahun 2018, IP-TIK Indonesia masih tertinggal di tingkat Asia Tenggara (ASEAN) sekali pun. Indonesia mendapatkan nilai 4,33 dan menduduki peringkat 111 dari 176 negara.

Peringkat Indonesia itu sangat jauh berada di bawah Singapura yang menempati peringkat 18 dunia dengan nilai IP-TIK sebesar 8,05. Brunei Darussalam dan Malaysia masing-masing berada di posisi 53 dengan nilai IP-TIK 6,75 dan posisi 63 dengan IP-TIK 6,38. Tiga negara yang berada di bawah Indonesia adalah Timor Leste, Myanmar, dan Kamboja.

Maka, berpijak pada data terkini, perkembangan global dan derajat kebutuhannya, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali mempercepat pembangunan dan penyediaan infrastruktur TIK yang mumpuni. Manfaat TIK telah menjadi budaya yang tak bisa dipisahkan dari keseharian hidup masyarakat. Karena itu, dari waktu ke waktu, pembangunan infrastruktur TIK harus terus mencatat progres.

MPR RI memastikan bahwa Indonesia tidak akan gagap dalam menanggapi perubahan zaman. Karena itu, dalam Pokok-Pokok Haluan Negara yang saat ini sedang dalam tahap perumusan, akan dimunculkan rekomendasi agar pembangunan infrastruktur TIK harus berkelanjutan. Presiden boleh berganti, tetapi pembangunan infrastruktur TIK boleh terhenti. Karena pemanfaatan dan peruntukannya demikian strategis, infrastruktur TIK Indonesia haruslah mumpuni untuk mendukung ketahanan siber nasional. ❑

28-38 JUN.pmd 29 1/1/2003, 1:09 AM

Pelantikan Rektor UMJ

Hadirkan Kembali PPHN sebagai Bintang Penunjuk Arah

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mencegah negara tanpa arah dengan menghadirkan kembali haluan negara atau Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), pasca 2024.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), sebagai bagian dari amal usaha organisasi Muhammadiyah, menyukseskan agenda nasional menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah bagi kesinambungan sekaligus keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah, khususnya pasca 2024. Sebagaimana sebelumnya bahwa Pengurus Pusat Muhammadiyah mendukung agar MPR RI diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan PPHN.

"Di bawah kepemimpinan Dr. Ma'mun Murod sebagai Rektor UMJ periode 2021-2025, UMJ harus mampu meningkatkan perannya menjawab berbagai tantangan persoalan bangsa ke depan, mencegah negara tanpa arah. Dari mulai tantangan kedaulatan integrasi NKRI, tantangan ekonomi, hingga berbagai tantangan yang menyelimuti dunia pendidikan," ujar Bamsoet saat memberikan sambutan dalam pelantikan Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy, M.Si sebagai Rektor UMJ periode 2021-2025, di Jakarta, Selasa (25/5/21).

Turut hadir Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Zulkifli Hasan; Ketua Fraksi PAN

28-38 JUN.pmd 30 1/1/2003, 1:09 AM

DPR RI, Saleh Daulay; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud, MD.; Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Laksdya TNI Harjo Susmoro; Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir; Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas; dan Kepala LLDIKTI Wilayah III, Agus Setio Budi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, UMJ juga harus mampu meningkatkan prestasi dan inovasi sebagai upaya mewujudkan visi UMJ menjadi universitas yang terkemuka, modern, dan Islami. Visi tersebut sekaligus mengamanatkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai pencetak sumber daya manusia, UMJ tidak hanya memprioritaskan nilai prestasi akademik, tapi lebih dari itu juga mengutamakan nilai-nilai moralitas keagamaan.

"Sebagaimana diamanatkan konstitusi, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek intelektualitas dan aspek spiritualitas dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, selain pandemi Covid-19, Indonesia masih akan menghadapi berbagai dinamika dan tantangan zaman. Menghadapi kondisi itu menuntut peran dan kontribusi dari perguruan tinggi untuk menjadi bagian dari solusi. Sebagai gambaran, merujuk pada laporan yang dirilis oleh UNDP (United Nation Development Programme), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2020 berada di urutan 107 dari 189 negara. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

"Di saat bersamaan, kita dihadapkan pada berbagai lompatan kemajuan zaman yang terasa kian nyata. Ketika kita belum selesai beradaptasi dengan era revolusi industri 4.0, di hadapan kita sudah menunggu era society 5.0. Ketika kita belum sepenuhnya mengadopsi dan menikmati berbagai modernitas dan transformasi digital yang ditawarkan teknologi 4G LTE, kini kita 'dipaksa' untuk mengenal teknologi komunikasi seluler generasi lima atau 5G, sebagai 'peradaban baru' dalam teknologi informasi," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, lompatan kemajuan zaman menghadapkan kita pada dua pilihan, yaitu: beradaptasi dan berinovasi. Kegagalan melakukan dua hal tersebut, akan membuat bangsa Indonesia semakin tertinggal jauh di belakang. Ini adalah pekerjaan rumah bagi segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga perguruan tinggi.

"Saya sangat mendukung berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan penelitian. Namun, saya juga mengingatkan bahwa pada akhirnya, muara dari penyelenggaraan pendidikan harus diabdikan pada kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat," pungkas Bamsoet. ❑

28-38 JUN.pmd 31 1/1/2003, 1:09 AM

Bertemu Rektor UNUD Bali

Haluan Negara Mempercepat Kemajuan Bangsa

MPR terus melakukan kegiatan serap aspirasi dengan menyambangi langsung berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Akhir Mei lalu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyambangi Rektor Universitas Udayana (UNUD) di Bali.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa gagasan munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional bisa mempercepat kemajuan bangsa, terutama dari sisi perekonomian.

Sebab, dengan PPHN, pembangunan nasional akan terarah, berkesinambungan dan merata dari pusat sampai ke daerah, sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila. Tujuan mulia inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Udayana (UNUD) adalah salah satu di antaranya, untuk bersama-sama berupaya keras mewujudkannya.

"Saya sangat berharap civitas akademika UNUD turut berpartisipasi aktif dengan melakukan kajian-kajian ilmiah yang kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa terkait PPHN ini," ujarnya, saat bertemu dengan Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Anak Agung Raka Sudewi, Sp.S (K), di Ruang Pertemuan Rektorat, Jimbaran, Bali, Senin (31/5/2021).

Buah pikir dari akademisi dinilai Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini sangat dibutuhkan, yakni salah satunya untuk menjawab berbagai pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait perlu atau tidaknya PPHN hadir kembali. Ada yang berpendapat, perlu ada haluan negara karena sangat berdampak baik buat rakyat. Namun, ada juga yang mengatakan haluan negara tidak perlu, sebab akan mengubah Undang Undang Dasar.

"Di situlah pentingnya MPR melakukan kegiatan serap aspirasi dengan menyambangi langsung UNUD dan perguruan tinggi lainnya. Masukan yang didapat, diharapkan akan memberikan angin segar di tengah pro kontra tersebut, sehingga akan muncul satu persepsi bersama dalam memahami PPHN," katanya.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini berharap, di ujung tahun 2021, berbagai masukan, pemikiran, dan hasil kajian dari akademisi dan tokoh-tokoh nasional lainnya telah rampung semua diterima MPR dalam bentuk naskah akademis atau bentuk lainnya.

Kemudian pada 2022, MPR bisa langsung membentuk semacam Komite Adhoc, dan masuk tahun 2024, PPHN sudah jadi dan masuk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. "Nanti siapapun yang terpilih menjadi Presiden tinggal melaksanakan PPHN itu secara konsisten," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. Anak Agung Raka Sudewi, Sp.S (K) mengapresiasi langkah MPR RI menggandeng kampus yang dipimpinnya turut serta ambil bagian dalam membahas PPHN. Ke depan, UNUD akan membentuk tim untuk melakukan kajian akademik serta akan diperluas lagi dengan mengajak perguruan tinggi lainnya di Bali.

"PPHN ini semangat dan tujuan awalnya sangat baik, terutama untuk menjadikan pembangunan nasional itu merata sampai ke daerah. Menurut saya, itu harus didukung agar terwujud," ucapnya.

Di sesi akhir, secara resmi Fadel Muhammad menyerahkan bahan-bahan atau dokumen PPHN dan naskah Laporan Kajian PPHN yang dibuat oleh Badan Pengkajian MPR RI kepada Rektor UNUD. ❑

28-38 JUN.pmd 32 1/1/2003, 1:09 AM

Bantuan Sosial Tunai

Harus Lanjut Hingga Pandemi Covid-19 Usai

Tarik ulur kelanjutan Bantuan Sosial Tunai mendapat perhatian berbagai kalangan. Sempat dikabarkan akan selesai pada akhir April, tiba-tiba program BST itu malah dilanjutkan hingga Juni 2021

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengkritisi kebijakan di lapangan terkait Bantuan Sosial Tunai yang tidak lazim. Pasalnya, sekalipun kerap dikritik, Mensos bersikukuh tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai, sehingga berakhir pada akhir April 2021 dengan alasan tak adanya anggaran. Tetapi, tanpa ada pembahasan dengan Komisi VIII DPR sebagai mitra Kemensos, tiba-tiba Kementerian Koordinator PMK membuat keterangan resmi pada Senin (10/5/2021) bahwa program BST dilanjutkan hingga Juni.

Mendapati kabar tersebut, Hidayat menyambut dengan antusias, meski hanya akan berlangsung hingga Juni. Karena sejak dulu Hidayat selalu kengkritisi dan mengusulkan agar program BST dilanjutkan. HNW juga sering mempertanyakan mengapa kebijakan penting dengan anggaran triliunan tersebut tidak pernah disampaikan dan dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI.

Karena itu, Hidayat kembali melayangkan kritik kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, seolah tidak serius membela kepentingan rakyat korban Covid-19. Apalagi, secara berulang Mensos menyebut tidak akan memperpanjang bantuan sosial tunai dengan alasan ketiadaan anggaran. Padahal HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, sudah mengingatkan Mensos bahwa anggaran tersebut tersedia dan dicadangkan oleh Kementerian Keuangan dalam pos anggaran Perlindungan Sosial senilai Rp 157,4 Triliun.

"Menteri Sosial seharusnya malu. Program kerakyatan sangat baik seperti bansos tunai yang ngotot dia hentikan, akhirnya diperpanjang oleh Kemenko PMK, sekalipun tanpa pernah dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI," ujar HNW, dalam keterangannya Sabtu (29/5/2021).

Hidayat yang juga anggota DPR-RI Komisi VIII, mitra kerja Kemensos ini menjelaskan, sejak awal dia telah mengkritik BST tahun 2021 yang hanya dipersiapkan hingga April dengan anggaran sebesar Rp 12 Triliun. Hidayat juga mengusulkan agar BST tetap berlanjut sesudah bulan April. Apalagi setelah melihat geliat perekonomian kuartal I tahun 2021 yang belum kembali normal.

Tidak hanya sampai di situ, HNW juga mendesak agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, melakukan perpanjangan periode BST. Namun, desakan itu tidak mendapat sambutan positif dari Mensos, sehingga menyebabkan kebijakan BST tidak lagi dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR-RI.

"Anehnya, pertengahan Mei tiba-tiba muncul keterangan resmi dari Kemenko PMK, mengumumkan akan melakukan perpanjangan hingga bulan Juni 2021, dengan penyaluran yang dirapel selama dua bulan," ujar HNW lagi.

Kasus ini, menurut HNW, akan jadi preseden buruk dalam proses pengambilan kebijakan, di mana kebijakan nasional yang strategis dan melibatkan APBN triliunan rupiah diambil dan diputuskan tanpa dibahas bersama dengan DPR-RI. Ditambah lagi mekanisme pelaksanaan yang tidak jelas dan persoalan akurasi data yang belum selesai. Karena, menurut Mensos, ada 21 juta DTKS ditidurkan karena masih kontroversial.

"Apakah perpanjangan BST secara diam-diam tersebut merupakan upaya Kemensos agar tidak ada pengawasan dari DPR-RI," kata Hidayat dengan nada tanya.

Hingga Pandemi Usai

Lebih lanjut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini berharap, agar Kemensos betul-betul amanah dalam melaksanakan BST untuk bulan Mei dan Juni ini, dengan memastikan akurasi data penerima manfaat BST, karena data terbarunya masih simpang siur. Meski begitu, Hidayat berharap, BST tidak hanya diperpanjang hingga bulan Juni, namun setidaknya hingga bulan Desember 2021, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran BST hingga akhir tahun sebesar Rp 24 Triliun, menurut HNW, jumlah relatif masih terjangkau, bisa diambil dari alokasi dana cadangan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang hingga Mei 2021 baru terealisasi 24% dari total anggaran Rp 699,43 Triliun.

Apalagi, berdasar rilis Badan Pusat Statistik bulan Februari 2021 terdapat 19,1 juta orang yang terdampak Covid-19 dan tingkat pengangguran masih cukup tinggi di angka 6,26%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2021 juga masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Karena itu, Hidayat menilai, BST sangat penting untuk diteruskan dengan melanjutkan kinerja penyaluran dan

28-38 JUN.pmd 33 1/1/2003, 1:09 AM

efektivitasnya cukup baik dengan realisasi mencapai 98,39%.

"Saya ingatkan Mensos semestinya hal-hal seperti ini dibahas bersama Komisi VIII sebagai mitra Kemensos, agar dasar legalitasnya terpenuhi. Terpenuhi juga akurasi pelaksanaan dan pengawasannya sehingga tidak terulang lagi kasus korupsi Bansos, apalagi dengan data terbaru yang dikoreksi oleh Mensos. Saya mendukung perpanjangan BST bukan hanya hingga Juni, tapi berlanjut sampai Covid-19 benar-benar sirna, dan ekonomi dasar warga telah pulih kembali," pungkas Hidayat. ❑

MBO

Peningkatan Covid-19 Pasca Lebaran

Rerie: Bangkitkan Kesadaran Bersama Jalankan Prokes

Pergerakan orang di masa pandemi selalu saja berdampak pada peningkatan jumlah kasus positif Covid-19. Membangkitkan kesadaran bersama untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan harus jadi program utama para pemangku kepentingan dan masyarakat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengemukakan, data yang menunjukkan ribuan orang terpapar Covid-19 saat arus balik Lebaran tahun ini, sekali lagi menunjukkan bahwa pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain berpotensi meningkatkan penyebaran virus korona.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/6/2021), Rerie – begitu Lestari Moerdijat biasa disapa— menunjuk data Korlantas Polri yang mengungkapkan, selama operasi penyekatan pada arus balik Lebaran tahun ini (15-31 Mei 2021) telah dilakukan swab antigen secara acak terhadap 357.883 orang saat arus balik dan didapati 1.466 kasus positif Covid-19.

Pihak Kepolisian juga mencatat pada rentang arus mudik dan balik pada 12 April 2021hingga 31 Mei 2021 tercatat 3,4 juta kendaraan keluar Jabodetabek dan 3,486 juta kendaraan masuk Jabodetabek.

Menurut Lestari, pernyataan bahwa pergerakan orang berdampak meningkatkan penyebaran Covid-19 langsung terkonfirmasi dengan data meningkatnya jumlah keterisian rumah sakit di sejumlah daerah oleh pasien Covid-19, pasca-Lebaran tahun ini.

Mengutip data Kementerian Kesehatan, tambah Rerie, di beberapa kabupaten/kota saat ini terjadi peningkatan keterisian rumah sakit, seperti di Aceh, sebagian kabupaten/kota di Sumatera Barat, di Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, di daerah Jambi, kemudian sebagian Jawa Tengah, ada juga di Kalimantan Barat, dan sedikit di Sulawesi.

Semua pihak, menurut Rerie, seharusnya belajar dari kasus peningkatan penyebaran Covid-19 yang terjadi pasca-Lebaran tahun lalu.

Dari sejumlah kasus yang pernah terjadi, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, semua elemen bangsa seharusnya memahami bahwa pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain sangat berpotensi menyebarkan virus korona.

Salah satu cara untuk menekan peluang penyebaran virus itu, jelas Rerie, setiap orang harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan dalam berbagai kesempatan.

Menurut Rerie, yang masih menjadi persoalan saat ini adalah upaya membangkitkan kesadaran setiap individu anak bangsa untuk menjalankan protokol kesehatan di berbagai kesempatan.

Berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam membangkitkan kesadaran prokes saat ini, ujar Rerie, adalah sikap masyarakat di sejumlah daerah yang menganggap Covid-19 ini tidak ada, dan berkegiatan tanpa menerapkan prokes. Padahal, tegas Rerie, tanpa persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini, pengendalian penyebaran virus korona di tanah air akan sulit direalisasikan. ❑

28-38 JUN.pmd 34 1/1/2003, 1:09 AM

Diskusi Empat Pilar MPR

Ramadan dan Menjunjung Tinggi Toleransi

Bulan suci Ramadan kesempatan untuk saling menjaga toleransi dan saling menghormati perbedaan.

ANGGOTA MPR Fraksi PKS KH. Bukhori Yusuf, Lc., MA., mengatakan bahwa bulan suci Ramadan 1442 H yang baru saja kita tinggalkan, adalah bulan yang sangat dimuliakan. Untuk menjaga kesucian Ramadan, sangat dibutuhkan toleransi yang tinggi dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk dari mereka yang berbeda keyakinan.

Menurut Bukhori Yusuf, toleransi yang dimaksud adalah saling menghormati. Selama bulan suci Ramadan, baik yang menjalankan ibadah puasa atau yang tidak berpuasa karena perbedaan agama atau umat Islam yang memang ada halangan dan diperkenankan syariat, mesti bersama-sama menjaga sikap di ruang publik.

"Ketika toleransi itu terbangun maka akan menjadi satu perilaku kolektif yang baik, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan nyaman, damai. Perbedaan yang ada menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi sumber pertentangan," ungkap Bukhori, yang berbicara secara virtual dalam acara Diskusi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR bekerjasama dengan dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Senin (12/4/2021).

Diskusi bertema 'Menjaga Toleransi di Bulan Suci Ramadan' itu berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Selain Bukhori Yusuf, juga hadir sebagai narasumber adalah peneliti dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Okky Tirto, M.Hum., dan awak media massa nasional baik cetak, elektronik serta online hadir sebagai peserta.

Untuk membangun toleransi seperti itu, lanjut Bukhori, masyarakat Indonesia mesti menjadikannya sebagai tradisi, keadaban, dan etika yang menjadi sebuah standar hubungan antarsesama manusia Indonesia. Jika berhasil, kata Bukhori, maka akan muncul kehidupan bermasyarakat yang saling memahami.

Negara sendiri, lanjut Bukhori, sangat tegas terhadap persoalan penghormatan kepada pemeluk agama Islam dan agama lainnya, serta menjamin kebebasan beragama tanpa gangguan, yakni melalui UUD NRI Tahun 1945. Pada Pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 jelas memosisikan agama sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bisa dipertentangkan lagi. Dan, ayat 2, menegaskan, negara menjamin kebebasan setiap penduduk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.

Bukhori berharap, semua elemen bangsa hendaknya menjaga toleransi dengan baik. Namun, saat ini pandemi Covid-19 masih melanda, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus, salah satunya dengan pembatasan kegiatan, termasuk ibadah.

Sementara Okky Tirto, peneliti dari Unievresitas Nahdlatul Ulama Indonesia, menegaskan bahwa soal toleransi, bangsa Indonesia sudah matang dipanggang sejarah. Artinya, lanjut Okky, toleransi adalah nyawanya rakyat Indonesia sejak dulu hingga kini. Sebab, walaupun berbeda-berbeda suku, budaya, dan lainnya, saling menghormati selalu ada dalam tradisi.

Okky menunjuk contoh tradisi di suku Abui— yang biasa dikenal suku Barawahing, Barue atau Namatalaki – adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Suku ini memiliki satu semboyan sangat terkenal, yakni: 'Tara Miti Tomi Nuku.' Artinya, meskipun berbeda tapi satu dalam hati. Selain itu, ada pula Pela Gandong di Maluku, dan masih banyak lagi suku yang memiliki semboyan persatuan. Luar biasa dewasanya mereka dalam menghadapi perbedaan.

Intinya, jelas Okky, rakyat Indonesia sudah sangat memahami bagaimana menyikapi perbedaan yang ada, bahkan perbedaan agama. "Sikap mereka biasa saja, tidak ada yang perlu diributkan. Saya rasa toleransi sudah menjadi bibit di negara Indonesia. Kita hanya dituntut untuk selalu menyiramnya dan menjaganya sehingga terus tumbuh kuat sehingga bisa bertahan dari segala gangguan," katanya. ❑

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

28-38 JUN.pmd 35 1/1/2003, 1:09 AM

Warung Makan Rakyat Gratis

Menebar Kebahagiaan di Tengah Kesulitan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ANCAMAN pandemi Covid-19 telah memasuki tahun kedua. Ribuan korban terpapar virus ini. Sebagian besar korban berhasil sembuh dan sehat seperti sediakala. Sebagian lainnya tak terselamatkan, meninggal dunia. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, tapi usaha tersebut belum mampu mengembalikan suasana menjadi normal kembali, seperti kehidupan sebelum corona tiba.

Tak dapat disangkal lagi, pandemi Covid-19 telah merusak sendi-sendi kehidupan. Dampak yang sangat terasa di sektor ekonomi, termasuk usaha pariwisata. Tidak sedikit perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya atau menghentikan sama sekali. Akibatnya, jumlah pengangguran bertambah banyak. Dan, imbasnya, jumlah masyarakat miskin pun meningkat.

Bertambahnya jumlah masyarakat miskin ini berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang kian merosot. Beruntung, pada kondisi seperti ini, masih ada pihak yang mau berbagi, guna membantu atau sedikit mengurangi beban yang dihadapi oleh sebagian masyarakat yang kurang beruntung. Salah satunya, seperti dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kebencanaan, yaitu Sekolah Relawan.

Selama pandemi ini, Sekolah Relawan ini banyak membantu menyediakan kebutuhan makanan pokok untuk masyarakat yang membutuhkan. Bentuknya, antara lain penyediaan makanan kotak, *Free Food Car*, guna penambahan nutrisi bagi tenaga kesehatan hingga warung gratis.

Khusus yang disebut terakhir (warung gratis), Majalah *Majelis* menyempatkan diri menyaksikan dari dekat warung yang terletak di bilangan Jln. Sulawesi Kota Depok, Jawa Barat, itu. Rumah bercat abu-abu di Jln. Sulawesi itu hampir tidak ada bedanya dengan hunian lain di sekitarnya. Hanya saja di tempat tersebut terdapat tempat cuci tangan, serta meja dan bangku yang berjejer yang ditata di bagian teras rumah tersebut.

Kalupun ada yang nampak menyolok hingga tampak berbeda dari rumah lain adalah, di bagian depan rumah ini tertampang plang bertuliskan: *Warung Makan Rakyat Gratis*. Pada pengunjung pun lebih ramai. Penarik ojol (ojek online) tampak datang ke warung ini silih berganti.

Bukan hanya penarik ojol, para pemulung dengan mengajak serta anak-anaknya juga dilayani di sini. Tak terkecuali pula para pengamen. Bahkan, orang-orang dengan kondisi tubuh dan pakaian yang lusuh tak ditolak di warung ini. Wartawan *Majelis* sempat menyaksikan beberapa anak selepas bermain, dalam kondisi basah oleh peluh, mampir di warung ini.

Kehadiran Warung Makan Rakyat Gratis ini bak dewa penolong bagi sebagian warga masyarakat yang kurang atau tidak mampu. Tak sedikit dari mereka hampir saban hari mampir ke warung ini. Dan, bahkan, ada

28-38 JUN.pmd 36 1/1/2003, 1:09 AM

datang sampai dua kali dalam sehari. Itu membuktikan, mereka sangat terbantu dengan hadirnya warung makan rakyat gratis tersebut.

Muhammad Anang, petugas penjaga warung, menyatakan, orang orang yang datang ke warung tersebut berperilaku santun. "Lebih sopan dibanding pengunjung di warung makan lain yang sering antara sesama pembeli tampak acuh tak acuh. Kalau di sini, menurut Anang, mereka tampak saling melempar senyum.

Majelis juga sempat melihat menu yang tersedia di warung gratis tersebut. Laiknya warung makan, di sini tersedia menu seperti ikan, telur, dan ayam. Juga ada tahu dan tempe, serta sayur kacang bersantan. Setiap hari, setidaknya, 300 porsi disiapkan. Namun, jumlah tersebut bisa bertambah, tergantung pengungjung yang datang. "Kalau kurang kami masak lagi, pokoknya kami selalu siap, jika sewaktu-waktu harus menambah jumlah porsi," kata Anang.

Sejak warung ini berdiri pada Juli 2020, kata Anang, banyak warga masyarakat yang sudah mengetahui keberadaan warung makan rakyat ini. Bukan hanya yang mau makan, yang hendak ikut menyumbang pun sudah familiar dengan alamatnya, dan tinggal datang ke tempat tersebut.

Dapat Kemudahan

Menariknya, setelah selesai makan, setiap pengunjung menempatkan piring kotor ditempat yang sudah disediakan. Mereka juga mengambil minum sendiri, lalu menempatkan gelas bekas yang mereka pakai di tempatnya. Tidak seperti warung makan pada umumnya, rata-rata pengunjung bergegas pergi setelah selesai menikmati makanan.

"Di sini kami saling menghargai dan menghormati. Sebuah kebahagiaan bisa berbagi dengan mereka. Apalagi mereka yang datang penuh rasa kekeluargaan dan persaudaraan," ungkap Anang.

Banyak pengalaman diperoleh Anang selama ikut mengelola warung makan rakyat gratis ini. Salah satu yang membuatnya terharu adalah munculnya rasa persaudaraan di antara mereka yang datang ke tempat makan tersebut. "Saya sering disapa oleh orang yang tidak saya kenal, ternyata mereka suka makan di sini. Saya merasa jadi punya banyak saudara," tutur Anang.

Pernah satu hari, kata Anang, dia merasa sangat lelah sehingga tertidur pulas. Ketika bangun, ia kaget melihat banyak yang mengantri hendak makan. Kepada mereka, Anang mengatakan, kenapa tidak dibangunkan. Mereka katakan, tidak tega karena kelihatan sangat lelah, dan memilih menunggu.

Pengakuan serupa juga dirasakan oleh Ali Akbar, penanggung jawab Warung Makan Rakyat Gratis. Menurut Ali, banyak keajaiban yang ia temukan semenjak ikut mendirikan warung makan rakyat tersebut. Salah satunya adalah berbagai kemudahan yang ia rasakan kerap menghampiri.

"Mestinya saya merasa capek karena berbagai pekerjaan yang harus saya lakukan. Tetapi melihat pemulung makan dengan lahap, tukang ojek online yang berterima kasih kepada kita, semua rasa lelah itu hilang dengan sendirinya Dan, yang ada, rasa syukur bisa berbagi dengan mereka," kata Ali. ❑

MBO

28-38 JUN.pmd 37 1/1/2003, 1:09 AM

Buku Karya Irman Gusman

Mendapat Apresiasi dari Ketua MPR

Perjalanan politik mantan Ketua DPD, Irman Gusman, terangkum dalam buku Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman. Buku yang berisi gagasan dan ketegaran Irman Gusman ini mendapat apresiasi dari Ketua MPR.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi peluncuran buku *Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman.* Tidak saja menyajikan berbagai gagasan pemikiran dan wawasan kebangsaan dari seorang Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke-2, Irman Gusman, melainkan juga menjadi saksi ketegaran dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya.

"Buku ini memperkaya referensi kajian hukum. Selain karena masih banyaknya pekerjaan rumah dalam penegakan hukum, tantangan dalam pembangunan hukum nasional juga selalu berkembang secara dinamis. Karenanya, pembenahan sistem hukum harus menjadi upaya yang berkesinambungan, seiring dinamika zaman," ujar pria yang akrab dipanggil Bamsoet pada peluncuran buku Irman Gusman, sekaligus peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113, diselenggarakan secara virtual oleh Korps Alumni Himpunam Mahasiswa Islam (KAHMI) di Bali, Kamis (20/5/21).

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113 harus dijadikan momentum merefleksi sejauh mana keberhasilan mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang berkeadilan. Merujuk indeks supremasi hukum (*rule of law index*) yang dirilis *World Justice Project* tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 59 dari 128 negara, atau peringkat 9 dari 15 negara di wilayah Asia Timur dan Pasifik.

"Sementara hasil survei Indonesia *Political Opinion* pada Oktober 2020 memperlihatkan, angka ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mencapai 64%. Tertinggi jika dibandingkan bidang lain, seperti ekonomi 57%, politik dan keamanan 51%, serta bidang sosial dan humaniora 50%," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, tingginya angka ketidakpuasan publik terhadap bidang hukum dipicu oleh beberapa faktor. Antara lain, persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, independensi penegak hukum, perlindungan kebebasan berpendapat, kualitas kebijakan, serta beberapa faktor lain yang dinilai tidak menghasilkan kinerja optimal.

"Padahal, dalam konsepsi negara hukum, harus ada penghormatan terhadap pengakuan normatif dan empirik atas prinsip supremasi hukum, prinsip persamaan kedudukan di depan hukum, dan asas legalitas, yaitu penegakan dan penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum," terang Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menekankan, secara filosofis, penegakan hukum yang berkeadilan harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan sila ke-dua Pancasila, yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menempatkan keadilan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Serta sila ke-lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.

"Pasal 1 ayat (3) konstitusi menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi juga mengatur penyelenggaraan peradilan dilaksanakan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1), adanya pengakuan persamaan kedudukan hukum setiap warga negara (Pasal 27 ayat 1), adanya jaminan atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak diskriminatif (Pasal 28D ayat 1) dan pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum sebagai hak asasi (Pasal 28 I ayat 1)," tandas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menambahkan, pembangunan hukum nasional harus menjadi upaya kolektif, karena membutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Dari mulai aparatur penegak hukum, pemerintah, maupun berbagai elemen masyarakat. Baik sebagai abdi hukum hingga sebagai bagian dari sistem pendukung dalam penegakan hukum.

"Penegakan hukum yang berkeadilan juga harus dimaknai bahwa hukum tidak hanya diperlakukan semata-mata sebagai sebuah prosedur yang harus ditaati. Pemenuhan prosedur hukum, pada saat yang bersamaan juga harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum," pungkas Bamsoet. ❑

AWG

28-38 JUN.pmd 38 1/1/2003, 1:09 AM

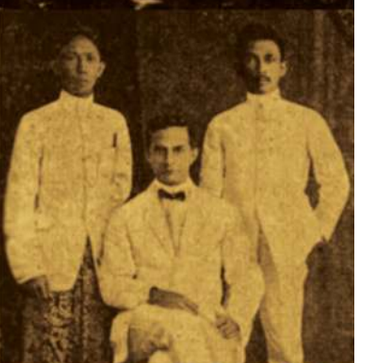

Akibat Tulisan Soewardi

Gara-gara tulisan yang dimuat di De Expres, Soewardi ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Hidup di tengah kaum terdidik dan tercerahkan membuat cucu Paku Alam III itu berani mengkritik keras kepada pemerintah kolonial atas permintaan sumbangan kepada kaum pribumi untuk memperingati hari kemerdekaan Belanda di Hindia-Belanda.

Ia pernah kuliah di STOVIA, di mana di kampus itu tempat lahirnya Boedi Oetomo. Di organisasi kaum Jawa ningrat itu, Soewardi menjadi aktivis sejati.

Bersama dengan Tjipto Mangoenkoesoemo dan Douwes Dekker, Soewardi mendirikan Indische Partij. Ketiga orang ini dalam catatan sejarah disebut sebagai tiga serangkai. Agar stabilitas politik di Hindia-Belanda terjaga, mereka di sekolahkan di Belanda.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

39-49 JUN.pmd 39 1/1/2003, 1:32 AM

PADA tahun 1913, di tanah Jawa, menjelang perayaan hari kemerdekaan Belanda, suasana sangat meriah. Berbagai persiapan, seperti karnaval, parade militer, dan upacara telah dipersiapkan. Umbul-umbul, bendera, dan berbagai atribut serta ornamen dipasang di berbagai tempat, seperti di alun-alun, lapangan, dan jalan-jalan, terutama perempatan dan jalan protokol.

Untuk memeriahkan hari kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis di wilayah Hindia-Belanda pasti dibutuhkan gulden-gulden untuk membiayai. Karena biaya yang dibutuhkan terlalu besar membuat Gubernur Jenderal Hindia-Belanda saat itu, Alexander Willem Frederik Idenburg, merasa kas pemerintahan tidak cukup untuk membiayai perayaan itu. Untuk menutupi kekurangan biaya peringatan hari kemerdekaan, pemerintah mempunyai kebijakan meminta atau memungut sumbangan dana dari seluruh warga, termasuk kaum pribumi, lewat panitia-panitia yang dibentuk oleh pemerintah.

Dalih sumbangan ini bisa jadi tidak menimbulkan sikap reaktif dari kaum terdidik ketika yang diminta hanya dari kalangan orang Belanda. Namun karena kaum pribumi juga diajak *urunan* untuk membiayai peringatan hari kemerdekaan Belanda, kaum terdidik dan tercerahkan pun merasa keberatan dan permintaan sumbangan itu dirasa tidak adil. Bagi kaum pribumi, kebijakan Idenburg seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah dijajah diminta sumbangan pula oleh penjajah, apalagi sumbangan itu untuk perayaan hari kemerdekaan mereka.

Di tengah masa itu, munculah seorang pria yang bernama Soewardi Soerjaningrat. Untuk memprotes kebijakan minta sumbangan, dia menulis beberapa opini. Di antara berjudul *Een voor Allen maar Ook Allen voor Een*. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya *satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga*. Belum puas dengan opini itu, Soewardi menulis kembali dengan judul *Als ik een Nederlander was*, artinya *seandainya aku seorang Belanda*.

Als ik een Nederlander was yang dimuat di Koran De Expres pada 13 Juli 1913 yang akhirnya berbuntut panjang bagi dirinya itu berbunyi: *sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya.*

Soewardi menulis demikian, tentu ia bukanlah orang sembarangan. Dilihat dari darah saja, ia merupakan darah biru. Lahir pada 2 Mei 1889. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Harya (GPH) Soerjaningrat. GPH Soerjaningrat ini juga bukan orang sembarangan. Ia merupakan anak dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Surya Sasraningrat. KGPA Surya Sasraningrat merupakan penguasa atau Raja (Kadipaten) Paku Alam. Dilihat dari silsilah yang ada, para Raja Paku Alam merupakan keturunan dari Sultan Hamengku Buwono I, Sultan Yogya.

***School Tot Opleiding Van Inlansche Artsen* (STOVIA)**

39-49 JUN.pmd 40 1/1/2003, 1:32 AM

Ayah GPH Soerjaningrat dan kakek Soewardi itu merupakan raja ketiga Paku Alaman sehingga ia disebut sebagai Paku Alam III. Dari sinilah ia mempunyai gelar raden mas.

Sebagai keluarga yang terpandang, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, kehidupan Soewardi pastinya lebih dari cukup, bahkan bisa disebut sebagai keluarga yang kaya raya dan tidak kekurangan apapun. Untuk itu, dalam masa pendidikan, Soewardi sangat maju. Kali pertama ia menempuh pendidikan, ia masuk *Eurospeesch Lagere School* (ELS). Awal kali sekolah ini dibuka, sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Belanda. Dalam perkembangan waktu, akhirnya kaum pribumi bisa bersekolah di ELS.

Selepas dari ELS, Soewardi melanjutkan pendidikan ke *Kweek School* (sekolah guru). Tak banyak kesulitan bagi Soewardi untuk menempuh pendidikan di *Kweek School*. Bukan suatu yang mudah pada masa itu seorang kaum pribumi bisa menempuh pendidikan hingga jenjang-jenjang yang ada. Sebagai seorang dari keluarga terpandang, jenjang pendidikan itu dilalui Soewardi tanpa terkendala masalah dana atau biaya.

Pada masa itu, di Batavia, berdirilah *School Tot Opleiding Van Inlansche Artsen* (STOVIA). Suatu sekolah kedokteran pertama yang hadir di Hindia-Belanda. STOVIA pada masa itu merupakan lembaga pendidikan yang elit, disegani, hebat, dan impian bagi kaum pribumi. Mereka yang sekolah di sana pun bukan orang sembarangan. Rata-rata yang menempuh pendidikan di sana adalah anak-anak bupati dan orang kaya.

Boedi Oetomo

Soewardi sebagai sosok yang 'haus' akan ilmu pengetahuan dan pendidikan pun tertarik dan ingin menempuh pendidikan yang gedungnya berada di kawasan Senen, Jakarta, itu. Soal biaya pendidikan kedokteran yang terbilang mahal pada masanya, bukan masalah bagi Soewardi.

Pada masa-masa awal kuliah, Soewardi menikmati pendidikan yang ada. Di STOVIA, mahasiswanya tidak sekadar tekun menuntut ilmu kedokteran, beberapa di antara mereka peduli akan nasib bangsanya. Untuk memperjuangkan nasib bangsanya agar mandiri dan tidak terkekang oleh belenggu penjajahan Belanda, alumni STOVIA dr. Wahidin Soedirohoesodo menggagas suatu organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Sebagai senior di STOVIA, apa yang digagas oleh dr. Wahidin didukung oleh adik-adiknya yang masih menuntut ilmu di sana, seperti Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, dan Soeraji. Maka tepat pada 20 Mei 1908, mereka mendirikan organisasi yang dinamakan *Boedi Oetomo*.

Soewardi yang juga merupakan mahasiswa STOVIA pun tertarik pada *Boedi Oetomo*. Kali pertama organisasi yang anggotanya kaum ningrat Jawa berdiri, dia sudah aktif di sana. Bahkan ia ditunjuk sebagai seksi propaganda. Dalam seksi ini, Soewardi bertugas untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia (terutama Jawa) akan arti pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Saat Kongres I *Boedi Oetomo* yang digelar di Yogyakarta, Soewardi juga terlibat aktif di acara itu.

Dalam perjalanan kuliah di STOVIA, nasib menghendaki lain. Dia sakit. Sakit yang diderita bisa jadi membuat dirinya harus lebih banyak beristirahat di kamar tidur atau di rumah. Hal demikian membuat ia harus lama meninggalkan kuliah, sehingga tertinggal ilmu-ilmu kedokteran yang harus ditempuhnya dalam beberapa tahun. Sakit yang diderita membuat ia tidak

39-49 JUN.pmd 41 1/1/2003, 1:32 AM

bisa menamatkan pendidikan di STOVIA. Gelar dokter yang saat itu dihormati pun gagal diraih.

Meski tidak lulus dari STOVIA tidak membuat Soewardi murung atau putusa asa. Ilmu-ilmu yang didapatnya dari ELS hingga STOVIA selama beberapa semester digunakan untuk terjun ke masyarakat. Pada masa itu dunia jurnalistik atau kewartawanan merupakan media yang bukan hanya sekadar profesi, namun juga sebagai alat perjuangan. Sebagai seorang yang berdarah biru, Soewardi tidak mau hanya enak-enakan hidup di keraton. Ia ingin mengabdikan hidupnya pada nusa dan bangsa. Untuk menyalurkan keinginannya itu, Soewardi menjadi wartawan.

Pada masa itu di Hindia-Belanda sudah banyak koran terbit. Sebagai seorang wartawan, Soewardi berpindah-pindah media. Koran-koran yang pernah menjadi tempat kerjanya adalah *Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer,* dan *Poesara*. Tempat Soewardi bekerja bukanlah koran-koran yang biasa, namun media yang kritis dan berani kepada kekuasaan.

Lihat saja *De Expres*, meski koran ini dipimpin oleh kaum peranakan, Belanda-Indo, namun koran ini rajin dan kritis membahas berbagai masalah politik dan mengupas ide-ide tentang nasionalisme. *De Expres* pernah dipimpin oleh Ernest François Eugène Douwes Dekker. Dekker adalah seorang peranakan di mana selama hidupnya adalah peletak dasar nasionalisme Indonesia awal Abad XX. Sebagai seorang wartawan, ia kritis terhadap kebijakan pemerintah. Di media ini juga ada dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, lulusan STOVIA dan disebut sebagai radikal pribumi.

Pun demikian dengan *Oetoesan Hindia* — di mana (di koran ini) Soewardi pernah bekerja— mulai terbit pada 26 Januari 1913 di Surabaya. Koran ini milik Sarekat Islam, organisasi massa terbesar pada masa itu. Pemimpin redaksi *Oetoesan Hindia* langsung dipegang oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Ia merupakan bapak bangsa. Kolomnis di Oetoesan Hindia, bukan orang sembarangan. Tercatat nama Abdul Muis, H. Agus Salim, Alimin Prawirohardjo, merupakan sosok yang kerap menulis di koran ini.

Soewardi merupakan sosok yang tidak bisa tinggal diam. Meski disibukkan dengan tugas mencari dan meliput berita, namun dia tidak meninggalkan aktivitas berorganisasi. Pada 25 Desember 1912, Soewardi bersama rekannya di *De Expres*, mendirikan *Indische Partij.* Menurut banyak sumber, organisasi ini digagas oleh Dekker. Dekker butuh orang yang radikal dan cerdas, sehingga mengajak Soewardi dan Tjipto Mangoenkoesoemo

Tiga Serangkai

untuk membentuk organisasi itu. Dua orang ini sebelumnya merupakan aktivis *Boedi Oetomo* yang berani. Tujuan *Indische Partij* adalah memajukan rasa kebangsaan, pendidikan, dan ekonomi bagi kaum Hindia-Belanda.

Pengalaman Soewardi yang panjang, hidup dalam lingkungan kaum terdidik dan tercerahkan, membuat dirinya berani menulis opini-opini bernada keras di dalam *De Expres* atau koran lainnya, terutama terkait permintaan sumbangan untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis.

Opininya yang berjudul *Als ik een Nederlander was* membuat pemerintah kolonial tersinggung dan marah, sehingga dia ditangkap. Penangkapan Soewardi bukan penangkapan main-main, sebab selepas 'diborgol', ia hendak diasingkan. Entah ditawari mau diasingkan ke mana atau tidak, Soewardi memilih diasingkan ke Pulau Bangka.

Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan besar-besaran kepada aktivis pro kemerdekaan. Selain dirinya, Tjipto dan Dekker juga mengalami nasib yang sama. Agar stabilitas politik di Jawa terjaga, mereka direncanakan akan diasingkan. Dalam harian *De Expres* ke mana mereka diasingkan jelas tempatnya. Harian yang terbit pada 29 Agustus 1913 itu memberitakan, *Tjipto Mangoenkoesoemo, di Bandung, menunjuk Pulau Banda (Amboina) sebagai tempat tinggal, RM Soewardi Soerjaningrat, di Bandung, menunjuk Pulau Bangka sebagai tempat tinggal, dengan ketentuan bahwa sejak hari keputusan itu diberitahukan kepada mereka, mereka diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan urusan mereka dan mereka diberi kebebasan memilih untuk meninggalkan Hindia Belanda, dalam periode itu, jika mereka melakukannya, maka pelaksanan tindakan yang disebutkan dalam paragraf pertama ditangguhkan sampai mereka kembali ke wilayah ini.*

Sepertinya keputusan itu berubah, sebab sebelum mereka diasingkan, ada pria yang menemui Tjipto. Pria ini menawarkan kepadanya beasiswa sekolah di Belanda dengan uang bulanan sebesar 50 gulden. Mendengar tawaran ini, Tjipto menerima dengan senang hati. Hal serupa juga ditawarkan kepada Dekker.

Sebagai sahabat di *De Expres* dan *Indische Partij,* Tjipto dan Dekker meminta Soewardi juga mendapat beasiswa sekolah di Belanda. Keinginan mereka dikabulkan oleh pemerintah kolonial, sehingga rencana pengasingan di Bangka dibatalkan. Banyak sumber menyebut akhirnya mereka diasingkan ke Belanda, padahal bertiga di sana disekolahkan. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

39-49 JUN.pmd 42 1/1/2003, 1:32 AM

Kehadirannya Selalu Meresahkan Pemerintah

Sejak kuliah di STOVIA hingga mendirikan Taman Siswa, kehadiran Soewardi selalu meresahkan pemerintah kolonial. Sudah diberi beasiswa sekolah di negeri Belanda, namun hal itu tidak membuat dirinya diam. Agar lebih merasa dekat dengan rakyat, ia menggantikan namanya dengan Ki Hadjar Dewantara. Ganjaran dari Presiden Soekarno, Ki Hadjar diangkat jadi pahlawan nasional, gelar bapak pendidikan, dan hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei.

Ki Hadjar Dewantara

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DINGINNYA negeri Belanda, ditambah indahnya kota-kota di negeri orange, rupanya tidak membuat Soewardi menjadi diam atau menghentikan kekritisannya. Di negeri kaya apel itu, tingkah lakunya tidak berubah. Apa yang dilakukan di Batavia juga dilakukan di Belanda.

Ketika tiba di negara kecil di Eropa itu, Soewardi mendengar di sana ada *Indische Vereeniging* (Perhimpunan Pelajar Hindia, ada pula yang menyebut Perhimpunan Indonesia). Organisasi ini kumpulan para mahasiswa Hindia (Indonesia) yang sedang menempuh pendidikan di Belanda. Organisasi ini didirikan oleh Soetan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Soeroto. Soetan adalah pria asal Sumatera yang sudah berada di Belanda sejak 1904. Di Belanda ia sekolah guru di Harleem. Sedang Noto Soeroto adalah pria asal Yogyakarta. Di Belanda Noto Soeroto sekolah atas biaya orangtuanya di Universitas Leiden. Menurut catatan yang ada, organisasi ini dibentuk, selain untuk mengadakan pesta dansa juga buat menggelar pidato-pidato.

Soetan Kasajangan Soripada

Kehadiran Soewardi dan Tjipto Mangoenkoesoemi di Belanda membawa angin perubahan dalam *Indische Vereeniging*. Pelan-pelan organisasi ini meninggalkan kebiasan lama. Kebiasaan lama, seperti dansa, bisa jadi masih terjadi namun anggota organisasi ini mulai memikirkan masa depan tanah asal-usulnya, Hindia-Belanda. Lewat diskusi dan obrolan dikabarkan pentingnya wadah organisasi untuk mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa.

Arah baru untuk menjadikan *Indische Vereeniging* sebagai organisasi perjuangan rupanya diterima oleh para anggotanya. Diskusi tentang kebangsaan mulai berkembang di sana. Kemajuan lain tercapai, yakni mereka mampu menerbitkan buletin yang dinamakan *Hindia Poetera* meski saat itu isinya masih jauh dari hingar bingar politik. Rubrik-rubrik yang ada bisa jadi seputar kegiatan kuliah.

Seperti di Batavia, di mana Soewardi banyak ikut terlibat dalam berbagai organisasi, kebiasaan yang demikian juga dilakukan di Belanda. Meski sudah bergabung dengan *Indische Vereeniging,* namun ia juga mendirikan *Indonesisch Pers-Bureau*. Mendirikan Biro Berita Indonesia di Den Haag, November 1913, merupakan tindakan yang luar biasa dari Soewardi sebab ia baru saja tiba di negeri orang.

Dalam *Wikipedia* disebutkan, berdirinya *Indonesisch Pers-Bureau* merupakan proyek pribadi Soewardi untuk mencari penghasilan tambahan. Ia masih mencari penghasilan tambahan sebab beasiswa yang diterima dari pemerintah Belanda terasa kurang.

Dalam perjalanan waktu, kantor berita itu bukan hanya sebagai proyek pribadi penyalur berita, namun melebar sebagai

39-49 JUN.pmd 43 1/1/2003, 1:32 AM

organisasi propaganda dan perjuangan kaum pergerakan Indonesia di Belanda. Meski beritanya terbilang berani, Buletin yang diterbitkan oleh *Indonesisch Pers-Bureau* tidak beredar di bawah tanah. Buletin itu juga dikirim ke Senat (*Eerste Kamer*) dan Parlemen (*Tweede Kamer*) atau MPR/DPR-nya Belanda. Buletin juga dikirim ke berbagai partai politik yang ada di sana. Dengan membaca buletin itu diharap wakil rakyat dan politisi di sana tahu kondisi di Hindia-Belanda.

Indonesisch Pers-Bureau adalah organisasi yang banyak kegiatan. Pernah bersama dengan *Indische Vereeniging* menggelar adu debat dan gagasan antara mahasiswa Hindia-Belanda dengan Belanda. Tak hanya itu, *Indonesisch Pers-Bureau* juga pernah mengadakan pameran buku. Agar kegiatan yang ada tak selalu serius, pertunjukan seni pun pernah diadakan.

Menggeliatnya *Indonesisch Pers-Bureau* dalam berbagai kegiatan itulah yang disebut membuat *Indische Vereeniging* berubah, tak lagi hanya dansa-dansi, namun juga memikirkan nasib bangsanya.

Tak hanya keberaniannya baru tiba di Belanda lalu membuat organisasi. Soewardi juga berani menggunakan kata Indonesia pada kantor berita itu. Kata Indonesia, menurut catatan yang ada, kali pertama diformalkan oleh Soewardi dalam badan kantor berita itu.

Banyak hal yang dilakukan Soewardi selama di Belanda, selain membentuk *Indonesisch Pers-Bureau*, juga mengubah mental mahasiswa Hindia-Belanda yang awalnya acuh pada nasib bangsanya menjadi sangat peduli, bahkan ikut berjuang.

Meski sibuk berorganisasi dan bekerja sebagai wartawan, namun tidak mengabaikan pendidikan yang ditempuhnya. Sekolah dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ditempuhnya berhasil dilalui dengan gemilang, sehingga dia mendapat *Europeesche Akta*. Akta ini merupakan ijasah pendidikan yang bergengsi. Selama menempuh pendidikan di Belanda, Soewardi menjumpai gagasan dan ide tentang pendidikan dari Friedrich Fröbel (Jerman), Maria Montessori (Italia), dan Debendranath Tagore (India). Metode pendidikan yang

Ki Hadjar Dewantara bersama Presiden Soekarno

mereka kembangkan sampai saat ini masih digunakan di banyak sekolah di dunia.

Setelah masa di sekolahkan atau diasingkan oleh pemerintah Belanda dianggap sudah cukup, pada 6 September 1919 ia dipulangkan ke Hindia-Belanda. Belanda memulangkan Soewardi tanpa syarat atau pernyataan yang harus dibuatnya. Hal demikian diungkapkan sendiri dalam catatan yang ada, terkait dipulangkannya kembali ke Indonesia, ia mengatakan, "*kini, saya telah memperoleh kembali kebebasan saya tanpa suatu janji atau pernyataan apapun juga dari saya. Ini berarti kemenangan bagi saya".*

Sekembali ke Indonesia, apa yang didapat dari Belanda diterapkan dalam kehidupan. Pada 3 Juli 1922, Soewardi mendirikan *Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa* (Perguruan Nasional Taman Siswa). Taman Siswa didirikan, dari literatur yang ada, untuk melakukan perlawanan terhadap sistem pendidikan yang dikembangkan Belanda. Disebut dalam buku *Munculnya Elite Modern Indonesia* (2009) karya Robert Van Niel, pada masa Politik Etis (1901-1916), Belanda menerapkan sistem pendidikan bertingkat sesuai dengan status sosial masyarakat Indonesia. Rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar (SD), sedangkan kaum priyayi dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Bahkan, banyak kaum priyayi yang mendapat akses untuk berkuliah di Eropa (*Kompas,* 21/12/2020).

Perguruan Nasional Taman Siswa

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

39-49 JUN.pmd 44 1/1/2003, 1:32 AM

Dalam *web* itu disebutkan, Taman Siswa mengajarkan dasar-dasar kemerdekaan bagi pribumi. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri. Pendidikan yang dikembangkan dari lembaga pendidikan yang berpusat di Yogyakarta ini adalah menekankan siswa agar tidak bergantung pada orang lain dan berpegang teguh pada prinsip berdikari. Taman Siswa mempunyai tiga semboyan, salah satunya dijadikan semboyan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tiga semboyan itu adalah *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa,* dan *Tut Wuri Handayani.*

Bagi Soewardi, pendidikan itu harus dekat dengan rakyat. Untuk itu, pada 3 Februari 1928, Soewardi (Soerjaningrat) mengganti namanya menjadi Hadjar Dewantara. Gelar *raden mas* yang biasa disematkan di depan mananya diganti dengan *ki*. Sebutan *ki* menurut falsafah Taman Siswa merupakan bentuk egaliterisme, persamaan, dan pelaksanaan demokrasi dalam keseharian. Raden Mas Soewadi Soejaningrat pun akhirnya menjadi Ki Hadjar Dewantara.

Apa yang dilakukan Ki Hadjar diikuti oleh semua yang ada di Taman Siswa. Mereka yang berdarah biru rela melepas gelar kebangsawanannya sehingga tak ada lagi di Taman Siswa, *raden, raden mas, raden roro, raden ajeng, raden ayu,* dan gelar bangsawan lainnya. Sebagai gantinya mereka menggunakan panggilan *ki, nyi,* atau *ni*. Sebutan ini diakui lebih egaliter (sederajat).

Sejak awal aktivitas Ki Hadjar tidak membuat nyaman bagi pemerintah kolonial. Meski sudah disekolahkan dan tidak lagi menulis opini, namun dengan mendirikan Taman Siswa, kehadirannya tetap membuat pemerintah kolonial Belanda gerah.

Taman Siswa dilarang keberadaannya lewat *Wilde Scholen Ordonantie* atau Undang-Undang Sekolah Liar. Undang-undang yang diketok pada 1930 itu memuat pasal-pasal yang membatasi perkembangan pendidikan alternatif di Hindia-Belanda, termasuk Taman Siswa. Pemerintah pun semakin ganas kepada Taman Siswa, dengan dasar undang-undang itu, seluruh kegiatan Taman Siswa ditutup dan membatasi ruang gerak para pengajar.

Meski ditutup, diawasi, dan dihentikan aktivitasnya, namun tidak menyurutkan perjuangan Ki Hadjar Dewantara, para pengajar, dan siswanya. Semua melanjutkan pendidikan dengan cara kucing-kucingan atau sembunyi-sembunyi.

Selepas Indonesia merdeka, Presiden Soekarno menunjuk Ki Hadjar sebagai Menteri Pengajaran Indonesia. Masa jabatan yang diemban terbilang sangat singkat, 2 September 1945 – 14 November 1945. Pada usia 69 tahun, tepatnya 26 April 1959, Ki Hadjar meninggal dunia.

Atas jasa perjuangannya, Soekarno pada 28 November 1959 mengangkat Ki Hadjar sebagai Pahlawan Nasional. Dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959, Menetapkan Ki Hadjar sebagai Pahlawan Nasional, Bapak Pendidikan, dan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Sekolah Sebelum Taman Siswa

Jauh sebelum Taman Siswa berdiri, KH Ahmad Dahlan menyelenggarakan pendidikan secara formal. Sekolah semakin berkembang ketika ia mendirikan Muhammadiyah. Di sekolah yang ada, selain diajarkan agama Islam, juga pengetahuan umum dan paham kebangsaan.

DI TAHUN 1900-an dan sebelumnya, praktik-praktik keagamaan umat Islam dirasa jauh dari tuntunan-tuntunan semestinya. Meski mereka sudah beragama Islam, namun masih mencampurkan dengan kebiasaan dan tradisi yang dianut sebelumnya. Tak hanya itu, ketika umat lain dan para priyayi sudah menikmati pendidikan sekolah yang maju, umat Islam belum banyak yang merasaka hal yang demikian.

Apa yang terjadi itu memunculkan rasa keprihatinan dari Ahmad Dahlan. Pria kelahiran Yogyakarta, 1 Agustus 1868, itu adalah orang yang ahli agama. Ketika umurnya masih 15 tahun, ia sudah pergi ke Makkah untuk berhaji dan menempuh pendidikan di sana. Selepas tinggal di Arab Saudi dan kembali ke Yogyakarta, 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Sebab ia sudah berhaji dan menguasai ilmu-ilmu agama maka sebutan KH (kiai haji) melekat padanya.

KH. Ahmad Dahlan

Ilmu yang sudah diraih di Makkah selama 5 tahun dirasa oleh Dahlan masih kurang sehingga pada 1903 dia kembali ke Makkah, dan di sana belajar agama Islam kembali selama 2 tahun.

Setelah memperdalam ilmu-ilmu agama, Dahlan kembali ke Jawa. Meski ia seorang dari golongan santri, Dahlan adalah seorang yang terbuka. Pada masa itu sudah banyak organisasi yang berlatar kaum priyayi dan

39-49 JUN.pmd 45 1/1/2003, 1:32 AM

KH. Ahmad Dahlan bersama murid muridnya FOTO-FOTO: ISTIMEWA

agama. Dahlan pun pernah aktif di Jam'iyatoel Khair, Boedi Oetomo, dan Syarikat Islam. Pada masa itu, organisasi-organisasi yang ada sangat elit dan terpandang, serta memiliki massa yang melimpah.

Ilmu-ilmu yang diperoleh di Makkah diajarkan kepada masyarakat lewat sekolah-sekolah yang ada. Tercatat dirinya pernah menjadi guru agama Islam di *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) Magelang. OSVIA adalah sekolah untuk mencetak pamong praja yang bekerja untuk pemerintah kolonial.

Untuk mencerdaskan kehidupan umat Islam, bagi Dahlan dirasa kurang kalau hanya sekadar menjadi guru. Untuk itu ia mendirikan sekolah. Dalam *pwmu.co*, merujuk pendapat Guru Besar Pendidikan Islam dari UIN Sunan Kalijaga, Prof Abdul Munir Mulkhan, di sekitar tahun keanggotaannya (Dahlan) dalam Boedi Oetomo, yakni antara 1908-1909, ia mendirikan sekolah yang pertama secara formal yakni *Madrasah Ibtidaiyyah*. Sekolah tersebut dikelola secara modern dengan metode dan kurikulum baru, antara lain diajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang pada awal Abad XX.

***Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA), Magelang**

Dalam *web* itu juga disebutkan pada 1 Desember 1911, Dahlan mendirikan sekolah di rumahnya. Diceritakan oleh KH Muhammad Syoedja, walaupun tidak kurang sempit balai rumah tangganya, namun sekolah itu dilaksanakan juga, sekalipun dengan secara kecil yang tidak dapat menerima murid banyak. Yaitu di ruang kamar tamu yang selebar ± 2,5 x 6 meter, dengan kamar tamunya.

Ruang kelas itu menggunakan tiga meja dan tiga bangku sekolah yang terbuat dari kayu jati putih dari luar negeri. Yaitu, kayu bekas peti kain putih (muslim) serta satu papan *board* dari kayu suren. Murid-murid terdiri sembilan orang anak pada permulaannya. Kalau sudah tambah tiga orang murid, baru ditambah satu meja dan satu bangku sekolah lagi.

Sedikit demi sedikit berjalan terus, menginjak bulan keenam murid sudah mendekati bilangan 20 orang anak. Mulai bulan ketujuh sekolahan itu dapat sumbangan guru umum dari Boedi Oetomo, terdiri dari para aspiran guru tamatan *Kweek School* yang belum menerima penetapan dari *Gouvernement*. Guru bantuan ini saling berganti. Di antaranya ada yang bertugas hanya sebulan, satu setengah bulan, dan yang paling lama adalah dua bulan.

Setelah Dahlan menjadi guru dan mendirikan berbagai sekolah, pada 18 November 1912, dirinya mendirikan Muhammadiyah. Lewat Muhammadiyah itulah sekolah yang didirikan semakin berkembang. Saat Taman Siswa baru berdiri pada tahun 1922, Muhammadiyah sudah memiliki 8 jenis sekolahan dengan 73 guru dan 1.019 orang siswa.

Munir Mulkhan mencatat, sekolah itu adalah *Opleiding School* di Magelang (Jawa Tengah), *Kweek School* di Magelang dan Purworejo, *Normaal School* di Blitar, NBS di Bandung, *Algemeene Midelbar School* di Surabaya, TS di Yogyakarta, Sekolah Guru di Kotagede Yogyakarta, dan *Hoogere Kweek School* di Purworejo. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

39-49 JUN.pmd 46 1/1/2003, 1:32 AM

Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat
Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado

Apresiasi MPR Libatkan Kampus Terkait PPHN

SAYA rasa apa yang dilakukan MPR melakukan kegiatan serap aspirasi, dengan mengajak berdialog segenap elemen masyarakat Indonesia terkait dengan upaya menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) patut diapresiasi tinggi.

Sebab, gagasan besar itu sangat penting buat rakyat dan bangsa Indonesia. Saya lihat gagasan menghidupkan kembali PPHN ini sangat mulia. Salah satu tujuannya bagaimana membuat pembangunan nasional bisa merata, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sudah beberapa kali Pimpinan MPR menyambangi civitas academika Universitas Sam Ratulangi Manado, kami sangat hargai dan kami terima dengan serius.

Ke depan, kami akan melakukan diskusi secara internal di kampus untuk mendiskusikan PPHN ini secara lebih detil. Salah satu bentuknya, kami akan membuat semacam Focus Group Discussion (FGD), selain mengundang para pakar di internal kampus, kami juga akan mengundang kampus-kampus lain, dan Pimpinan MPR juga kami undang sebagai tamu kehormatan. ❑

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Drs. Nasriadi, MM.Pd
Kepsek SMAN 3 Makassar

Anak Didik Butuh Teladan Yang Baik

BANGSA yang maju pasti tergantung dari generasi mudanya yang unggul, itu tidak bisa dipungkiri. Sebab, generasi muda yang saat ini duduk di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas adalah calon-calon pemimpin nasional di masa depan.

Bayangkan, jika calon-calon pemimpin nasional kita itu salah jalan atau salah pergaulan bisa rusak negara kita nanti. Untuk itu, mereka butuh teladan yang baik dari para tokoh bangsa kita.

Saat ini saya sangat mengapresiasi banyak tokoh nasional dan pejabat negara yang tidak lupa almamater sekolahnya. Mereka sering datang dan menengok sekolah, tempat dia dahulu pernah belajar.

Itu sangat bagus, kisah-kisah perjalanan hidup mereka sampai menjadi sukses bisa menjadi teladan dan motivasi para siswa sekarang. Kita butuh generasi muda yang kuat di masa sekarang ini, di saat tantangan bangsa semakin kompleks..

Seperti yang dilakukan Pimpinan MPR Syariefuddin Hasan, beliau adalah alumni SMA Negeri 3 Makassar, dan beliau tidak lupa sekolah ini, itu sangat saya hargai. Saya harap di kesempatan yang akan datang beliau akan berkunjung kembali. ❑

DER

39-49 JUN.pmd 47 1/1/2003, 1:32 AM

Berharap Pada Indonesia Untuk Masa Depan Palestina

Menjelang hari-hari terakhir Ramadan, militer Israel menyerang wilayah Palestina. Akibatnya terjadi perang terbuka antara Israel dan pejuang Palestina. Korban pun berjatuhan, terutama rakyat sipil di pihak Palestina. Beragam reaksi dan komentar mengenai serangan Israel terhadap Palestina ini. Berikut pendapat wakil rakyat terkait nasib bangsa Palestina dan masa depannya.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat

Indonesia Harus Dukung Perjuangan Palestina

SAYA menyesalkan sikap Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dalam merespon persoalan di Palestina. Pasalnya, pemerintah Amerika Serikat terkesan mendukung aksi militer Israel yang telah memakan banyak korban jiwa dengan dalih membela diri. Joe Biden tidak membuka mata dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap rakyat Palestina. Harusnya, Amerika Serikat, sebagai salah satu negara demokrasi besar di dunia, tidak menutup mata terhadap aksi kekerasan Israel yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Dari CNBC International, Kongres AS menyebut bahwa Joe Biden telah menyetujui penjualan senjata berpemandu presisi senilai US$ 735 Juta kepada Israel di tengah kekerasan yang dilakukan terhadap Palestina. Langkah ini secara tidak langsung mendukung aksi-aksi kekerasaan militer Israel terhadap rakyat Palestina.

Agresi militer yang dilakukan oleh Israel telah membuka borok Israel yang ingin mencaplok wilayah Palestina secara keseluruhan. Israel yang awalnya pendatang di Tanah Palestina mencaplok wilayah Palestina sejak 1947 hingga sekarang. Aksi kekerasan militer Israel juga telah membuka mata dunia sehingga memicu demonstrasi di berbagai negara. Militer Israel melancarkan serangan tidak hanya ditujukan kepada pasukan Hamas Palestina, tetapi juga kepada anak-anak dan perempuan Palestina yang tidak berdosa.

Bahkan, Israel juga telah menghancurkan Gedung Al-Jalaa yang menjadi kantor dari beberapa media internasional, seperti Al-Jazeera dan The Associated Press. Israel juga telah menghancurkan dan Kantor Bulan Sabit Merah milik Qatar, Gedung Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Jalur Gaza. Bahkan, Israel juga membombardir Klinik Ar-Rimal, laboratorium pegujian Covid-19 satu-satunya di Jalur Gaza, Palestina.

Saya terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina di kancah Internasional. Indonesia harus mengambil peran besar dalam mendukung perjuangan Palestina, terkhusus dengan posisi Indonesia sebagai

39-49 JUN.pmd 48 1/1/2003, 1:32 AM

negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Palestina dan Indonesia memiliki hubungan emosional yang sangat kuat sejak dulu. Palestina adalah satu dari sedikit negara yang paling pertama mengakui perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Sehingga, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu perjuangan rakyat Palestina.

Saya mengingatkan, isi dari Pembukaan UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai panduan dalam bernegara. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, Indonesia harus aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Kita akan selalu berada pada jalan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Saya atas nama pribadi, Partai Demokrat, dan Pimpinan MPR, akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Kami juga mengecam keras aksi kekerasan dan pencaplokan yang dilakukan oleh militer Israel di Bumi Palestina. ❑

AWG

Abdul Kharis Almasyhari, Anggota MPR Fraksi PKS

Indonesia Harus Kawal Gencatan Senjata Palestina-Israel

MEMINTA Pemerintah Indonesia untuk mengawal melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gencatan senjatan antara Pejuang Hamas dan Jihad Islam dengan Israel, yang mulai berlaku Jumat 21 Mei 2021, pukul 02.00 waktu setempat. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR mengutuk kebiadaban, kekejaman negara apartheid Israel. Gencatan senjata tidak menghapus kejahatan perang Israel di Gaza dan Masjid Al Aqsha. Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus mengawal gencatan senjata ini melalui upaya Internasional di PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Segala tindakan kebiadaban Israel tidak dibenarkan sama sekali, termasuk membombardir Gaza, membunuh anak-anak, perempuan yang sedikitnya 232 warga Palestina diberitakan terbunuh dan ribuan menderita luka, serta kehancuran infrastruktur yang masif dan menyerang jamaah salat di Masjid Al Aqsa oleh polisi Israel tersebut, serta upaya sistematis terus menggusur rumah warga Palestina di Tepi Barat, serta ribuan kejahatan yang terus dilakukan Israel selama pendudukan di bumi Palestina.

Perang ini belum akan usai jika negara Palestina belum merdeka dan masih diduduki Israel. Kita jangan lupa bahwa Palestina adalah satu-satunya negara di dunia modern yang masih diduduki oleh kekuatan kolonial. Semua penderitaan Palestina disebabkan oleh Israel sebagai kekuatan yang menjajah.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Meminta agar Kementerian Luar Negeri terus berupaya maksimal agar di masa gencatan senjata ini mendorong negara OKI bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia telah mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh OKI, antara lain memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI dan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina. Ibu Retno harus menekankan, tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak dalam mendukung Palestina.

Karena itu dalam gencatan senjata ini Indonesia harus terus mendesak OKI untuk bekerja keras, fokus membantu perjuangan Palestina untuk merdeka, antara lain lewat perundingan multilateral demi mewujudkan solusi dua negara.

Meminta agar segera mengirimkan bantuan, baik yang digalang pemerintah maupun masyarakat, agar bisa masuk ke Gaza dan Masjidil Aqsa untuk meringankan beban korban penderitaan rakyat Palestina akibat serangan Israel. Kemerdekaan Palestina adalah hak rakyat Palestina dan Pembukaaan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jelas berada bersama Palestina merdeka. Untuk itu, perlu langkah serius dan sistematis agar bantuan bisa segera masuk ke Gaza dan Masjidil Aqsa, sehingga segala daya upaya kita untuk menolong rakyat Palestina dapat tersalurkan. ❑

AWG

39-49 JUN.pmd 49 1/1/2003, 1:32 AM

Serap Aspirasi di Kolaka

Tujuan Pembangunan Nasional Adalah Kesejahteraan untuk Semua

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pembahasan soal GBHN dan Amandemen UUD mesti mendengarkan aspirasi masyarakat dari berbagai daerah.

WAKIL Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., mengatakan bahwa sebagai negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk 270 juta lebih dengan beragam suku dan budaya, Indonesia membutuhkan rencana dan implementasi pembangunan nasional yang tepat, serta mampu mewujudkan tujuan akhir bernegara, yakni mencapai kesejahteraan bersama.

Untuk mewujudkan semua itu, sistem perencanaan pembangunan nasional mesti memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setiap tahun, sehingga daya beli tinggi dan roda perekonomian berjalan cepat. Dari sinilah lalu muncul wacana besar dari rakyat tentang perlunya bangsa ini menghidupkan kembali GBHN, sebagai pedoman yang memandu penyelenggara negara melaksanakan pembangunan secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat— yang akrab disapa Syarief Hasan— ini dalam acara 'Diskusi dan Serap Aspirasi Pemikiran dari Kalangan Pemerintah Kabupaten Kolaka tentang Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Terkait Dihidupkannya Kembali GBHN', di Auditorium Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/4/2021).

Hadir dalam acara itu Bupati Kolaka Ahmad Safei, Wakil Bupati Muhammad Jayadin, para pejabat di lingkungan Pemkab Kolaka, Forkopimda, dan perwakilan beberapa ormas, serta LSM sebagai peserta.

Di hadapan peserta, Syarief Hasan mengungkapkan, sebenarnya, walaupun Indonesia tidak lagi memiliki GBHN, seperti pada masa Orde Baru, tapi di era dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 sampai 2014, bangsa ini sempat merasakan dampak pelaksanaan pembangunan nasional yang bagus, yakni naiknya income perkapita rakyat Indonesia dari US$ 1.161 per tahun menjadi sekitar US$ 3.475 per tahun. Akibatnya level kemiskinan juga ikut turun dari 16% menjadi 11,25%, serta tingkat pengangguran turun dari 11,2% menjadi 5,7%.

"Semua itu adalah fakta dan tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Artinya, tujuan kita bernegara sebenarnya sudah bisa dicapai dengan menerapkan sistem pembangunan nasional

50-61 JUN.pmd 50 1/1/2003, 2:31 AM

tanpa melakukan amandemen UUD. Tentu saja harus dibarengi kerja-kerja yang baik, konsisten, dan tanpa kenal lelah," ujarnya.

Namun, lanjut Syarief Hasan, sebagai negara demokrasi, rakyat diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, temasuk wacana menghidupkan kembali GBHN, dan itu harus diapresiasi. "MPR sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat berupaya menampung semua pendapat terkait haluan negara ini, kemudian mengkajinya secara mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan," tambahnya.

Untuk kepentingan itulah, MPR gencar melakukan kegiatan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat, antara lain ke kalangan akademisi berbagai perguruan tinggi di Indonesia, tokoh nasional, ormas, organisasi keagamaan, pimpinan partai politik, dan kalangan birokrasi, seperti Pemkab Kolaka ini. Dari diskusi yang diselenggarakan, MPR menampung semua masukan guna memperkaya materi kajian.

"Saya berharap dukungan pemikiran dan moril dari rakyat agar wacana besar ini bisa segera diputuskan. Lalu, apapun keputusannya nanti, apakah GBHN diperlukan atau tidak, pasti yang terbaik untuk rakyat dan negara Indonesia," pungkasnya. ❑

DER

50-61 JUN.pmd 51 1/1/2003, 2:31 AM

Terima Duta Besar Rusia

MPR Dukung Penggunaan Vaksin Sputnik

Rusia dikabarkan berhasil menemukan vaksin Covid-19 yang mampu menimbulkan kekebalan tubuh mencapai 90 %.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad dan Lestari Moerdijat melakukan pertemuan dengan Duta besar Rusia untuk Indonesia H.E. Mr. Lyudmila Vorobyova. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (3/6/2021). Ikut hadir perwakilan perusahaan BUMN di bidang farmasi.

Pada pertemuan itu, Fadel Muhammad menyampaikan hasil kunjungannya ke Rusia beberapa waktu lalu. Fadel menceritakan keberhasilan negara tersebut dalam menangani Covid-19. Menurut mantan Gubernur Gorontalo itu, Rusia terlihat sudah terbebas dari Covid-19. Masyarakat di sana hidup normal seperti sebelum terjadi pandemi. Tidak ada lagi orang mengenakan masker, rumah sakit juga sudah tidak lagi merawat para penderita Covid.

"Selain karena sarana kesehatan yang lebih bagus, vaksin yang digunakan juga dipercaya mampu melindungi warga negara Rusia sehingga terbebas dari serangan Covid. Dan, itu membuat kita kagum. Nama vaksin itu adalah *Sputnik*, dan diproduksi sendiri oleh Rusia," kata Fadel.

Menurut keterangan pihak-pihak yang berkompeten menangani Covid di Rusia, kata Fadel, kemampuan Sputnik melindungi masyarakat dari Corona mencapai 90 %.

50-61 JUN.pmd 52 1/1/2003, 2:31 AM

Artinya, sangat baik untuk memberikan kekebalan dari virus Corona. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa Sputnik sudah digunakan di berbagai negara, termasuk negara-negara berpenduduk muslim, seperti Mesir, Pakistan, Palestina, dan negara Timur Tengah lainnya.

"Salah satu yang menggembirakan dari kunjungan kami ke Rusia adalah kemauan pemerintah negeri pecahan Uni Soviet itu untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan akan vaksin. Apalagi, kebutuhan vaksinasi di Indonesia sangat besar, dan itu perlu dukungan semua pihak," ujar Fadel lagi.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Menurut Lestari, pemandangan di Rusia terlihat semakin Indah, karena negara tersebut sudah terbebas dari Covid. Apalagi, di sana juga semakin sulit menemukan orang mengenakan masker di jalanan dan tempat terbuka.

"Yang lebih membahagiakan, konon harganya lebih murah dibanding vaksin lain yang sudah ada selama ini. Karena itu, peluang ini harus dimanfaatkan, apalagi kesempatan memperoleh vaksin memang sangat terbatas," kata Rerie, begitu Lestari Moerdijat biasa disapa.

Mendengar pengalaman tersebut, Duta besar Rusia untuk Indonesia Mr. Lyudmila Vorobyova berjanji akan memberi dukungan penuh jika Indonesia benar-benar akan menjadikan Sputnik sebagai vaksin Covid. Ia juga berjanji memberi kemudahan kepada seluruh pejabat pemerintah yang berkepentingan untuk melakukan kajian serta penelitian terkait vaksin Sputnik. ❑

MBO

50-61 JUN.pmd 53 1/1/2003, 2:31 AM

Kunjungan BPP PHRI

Bamsoet Dorong Pemerintah Berikan Dukungan Kongret

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, agar usaha perhotelan dan restoran tetap hidup di tengah badai pandemi Covid-19 maka pemerintah perlu memberi dukungan konkret, antara lain berupa modal kerja dan restrukturisasi kredit.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) sedang mengalami masalah berat akibat pandemi Covid-19. Menyebabkan lebih dari 2.400 hotel dan 1.033 restoran tutup, serta lebih dari 400 ribu tenaga kerja dirumahkan. Para pekerja yang masih bertahan juga mengalami kesulitan ekonomi. Akibat turunnya pendapatan serta keharusan tetap membayar pinjaman ke bank, hotel dan restoran terpaksa melakukan penyesuaian gaji terhadap para karyawannya.

"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, juga tidak bisa menjawab berbagai persoalan yang dihadapi PHRI. Jika Kementerian Keuangan tidak bisa menyikapinya, Indonesia tidak hanya akan menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi saja, melainkan juga bersiap menghadapi krisis sosial," ujar Bamsoet usai menerima Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), di Jakarta, Jumat (28/5/21).

Turut hadir para pengurus BPP PHRI, antara lain: Ketua Umum Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Bidang Hotel Iswandi Said, Sekretaris Jenderal Maulana Yusran, Anggota Bidang Hotel Vivi Herlambang dan Ahmad Zulfikri, serta Anggota Bidang Restoran Endah Ansoroeddin.

50-61 JUN.pmd 54 1/1/2003, 2:31 AM

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, PHRI juga mengeluhkan ketidakmampuan para pembantu presiden menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo yang sudah menekankan agar suku bunga kredit tetap dikisaran 6%. Karena faktanya, para anggota PHRI tetap membayar bunga dikisaran 11%.

"Agar usaha perhotelan dan restoran tetap hidup di tengah badai pandemi Covid-19, mereka memerlukan dukungan konkret dari pemerintah, antara lain berupa modal kerja dan restrukturisasi kredit," ujar Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet menyatakan, dukungan modal kerja dibutuhkan agar pemeliharaan properti tetap bisa berjalan, sekaligus tetap bisa menggaji karyawan secara layak. Sementara restrukturisasi kredit dibutuhkan agar jangan sampai ada anggota PHRI yang dibangkrutkan perbankan karena tidak sanggup bayar. "Karenanya perbankan, khususnya yang bergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perlu memberikan masa tenggang pembayaran kredit kepada para anggota PHRI," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang 2020 tercatat sekitar 4,02 juta kunjungan. Anjlok 75,03% dibandingkan 2019 yang tercatat sekitar 16,1 juta kunjungan. Tingkat hunian kamar hotel klasifikasi bintang secara bulanan di sepanjang 2020 juga selalu lebih rendah dibandingkan bulan sama tahun 2019. Misalnya, tingkat penghunian kamar pada Desember 2020 sebesar 40,79%, turun dibandingkan Desember 2019 sebesar 59,39%. PHRI memperkirakan, rata-rata tingkat okupansi perhotelan sepanjang awal tahun 2021 ini masih berada di bawah 20%.

"Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha hotel dan restoran mengalami dilema. Di satu sisi mengalami kesulitan finansial, di sisi lain mereka tetap ingin bertahan, termasuk berusaha agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai imbauan pemerintah. Menjawab dilema tersebut, perlu peran dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, PHRI juga meminta pemerintah pusat segera membuka destinasi wisata di berbagai daerah, yang warganya sudah divaksin dan mencapai herd immunity. Seperti halnya di Bali, yang laju vaksinasinya termasuk tertinggi di Indonesia. Bahkan per 20 Mei 2021, Bali sudah mendapatkan 2,6 juta dosis vaksin Covid-19, hampir setengah dari target 6 juta dosis.

"Percepatan vaksinasi di Bali juga dilakukan agar ekonomi masyarakat Bali segera pulih. Mengingat di setiap kuartal di sepanjang 2020, pertumbuhan ekonomi Bali selalu negatif. Kuartal 1/2020 minus 1,2%, kuartal II/2020 minus 11,06%, kuartal III/2020 minus 12,32%, dan di kuartal IV/2020 minus 12,21%. Sementara pada kuartal I/2021, juga minus 9,85%," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umun Partai Golkar ini menambahkan, vaksinasi terhadap para pekerja pariwisata di sektor hotel dan restoran juga harus lebih digalakkan. Mengingat hotel dan restoran merupakan bagian dari ujung tombak dalam mata rantai ekonomi pariwisata, sehingga para pekerjanya juga harus terlindungi dari penyebaran Covid-19.

"Vaksinasi untuk pekerja hotel dan restoran masih belum maksimal karena baru menyasar sekitar 130 lebih pekerja. Tenaga kerja sektor hotel dan restoran merupakan bagian dari tenaga kerja sektor pariwisata dan pelayanan publik, yang vaksinasinya merupakan tanggungjawab pemerintah, bukan dibebankan melalui vaksinasi gotong royong yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan," pungkas Bamsoet. ❑

50-61 JUN.pmd 55 1/1/2003, 2:31 AM

Tata Kelola Vaksinasi Covid-19

Harus Cermat Cegah Terhambatnya Program Vaksinasi Nasional

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mengingatkan, tata kelola vaksinasi nasional harus diterapkan secara cermat dan terukur, mencegah terhambatnya vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KITA semua menyadari vaksin memiliki masa pakai yang terbatas. Di sisi lain masyarakat di Tanah Air belum sepenuhnya menerima program vaksinasi Covid-19 ini, sehingga perlu pengaturan yang terukur dalam pengaplikasian vaksin secara nasional," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/5).

Indonesia kedatangan lagi vaksin Covid-19 tahap ke-13, sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku (bulk) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Cengkareng, Banten, Selasa (25/5). Dengan penambahan tersebut, total vaksin Covid-19 yang dimiliki Indonesia saat ini mencapai 83,9 juta dosis vaksin.

Menurut Lestari, jumlah tersebut belum sepenuhnya aman, mengingat target masyarakat yang akan divaksinasi direncanakan 181,55 juta orang. Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan dua dosis vaksin serta memerhatikan panduan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk menyiapkan 15% vaksin cadangan, pemerintah memperkirakan total vaksin yang diperlukan sekitar 426 juta dosis.

Meski begitu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, penambahan pasokan vaksin Covid-19 secara reguler dari berbagai produsen vaksin dengan prosedur pengawasan yang ketat oleh pemerintah merupakan langkah yang patut diapresiasi, di tengah kebutuhan vaksin Covid-19 dunia yang sangat tinggi di setiap negara.

Menurut Rerie, yang tidak kalah penting dalam proses vaksinasi Covid-19 secara nasional ini adalah kesiapan dari masyarakat dan para pelaksana vaksinasi tersebut. Karena, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, ketidaksiapan masyarakat dan para pelaksana vaksinasi Covid-19 itu berpotensi menghambat proses vaksinasi dan kegagalan pencapaian target.

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada akhir Maret lalu mencatatkan, persentase warga DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 paling tinggi di Indonesia, yakni 33%. Disusul Jawa Timur dengan 32%, lalu Banten 31%. Sementara persentase terendah penolakan untuk divaksin ditemukan di Jawa Tengah, yakni 20%.

Belum lagi, jelas Rerie, mulai terjadi penyimpangan para pelaksana vaksinasi di lapangan yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah.

Menurut Rerie, pengadaan vaksin harus sejalan dengan upaya untuk mempersiapkan masyarakat dan petugas pelaksana vaksinasi agar program tersebut berjalan sesuai rencana. Untuk mewujudkan hal itu, Rerie berpendapat, langkah sosialisasi terkait vaksinasi harus masif dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dari para pelaksana vaksinasi di lapangan harus secara konsisten dilakukan.

Keraguan masyarakat terhadap tingkat keamanan vaksin, menurut Rerie, masih menjadi alasan yang sering dilontarkan masyarakat saat menolak vaksinasi Covid-19. Pemberitaan terkait dampak vaksinasi Covid-19, ujarnya, harus mendapatkan klarifikasi yang memadai sehingga masyarakat benar-benar paham bahwa vaksinasi aman.

Rerie menegaskan, dengan seimbangnya antara kelancaran pasokan vaksin dan pemahaman serta kepatuhan masyarakat dan petugas pelaksana vaksinasi Covid-19, diharapkan pencapaian kekebalan kelompok bisa terbentuk sesuai rencana, dan Covid-19 di Tanah Air bisa segera terkendali. ❑

50-61 JUN.pmd 56 1/1/2003, 2:31 AM

Kunker SMA Negeri 3 Makassar

Karakter Siswa dan Keteladanan Guru serta Alumni

Karakter siswa Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa mesti dibangun sejak dini.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

NEGARA Indonesia adalah negara besar dengan keragaman yang sangat kompleks. Untuk itu, dibutuhkan generasi muda, pelajar dan mahasiswa, sebagai calon pemimpin yang handal, memiliki karakter kebangsaan yang bagus, sehingga mampu membuat bangsa ini tetap bersatu dan kemudian maju di masa depan.

Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA., mengungkapkan hal itu saat mengunjungi SMA Negeri 3 Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/4/2021). Hadir dalam acara itu Kepala Sekolah Drs. Nasriadi, M.M.Pd., dan para guru SMA Negeri 3 Makassar, Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, pimpinan MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan, untuk memunculkan karakter anak didik atau siswa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa harus dibentuk dengan berbagai cara, antara lain melalui teori yang diajarkan di kelas dan keteladanan yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik, serta para alumninya.

Perilaku guru yang baik, menurut Syarief Hasan – begitu dia biasa disapa—akan membekas di diri para siswa sehingga akan membentuk jati diri mereka. Sedangkan kemajuan dan kehebatan para alumni akan memotivasi siswa untuk makin giat belajar dalam menggapai cita-citanya. Dua hal ini, jelas Syarief Hasan, sangat penting ada pada diri siswa agar terwujud generasi muda Indonesia, selain berkarakter kebangsaan yang kuat juga memiliki potensi besar di masa depan.

"Makanya saya ingin agar di sekolah dibuat semacam database yang bisa diakses para siswa, yang isinya kumpulan para alumni yang sudah menjadi tokoh nasional, seperti Mantan Wapres RI Jusuf Kalla dan saya yang juga alumni SMA Negeri 3 Makassar ini. Selain membuat rasa bangga karena satu almamater dengan tokoh nasional, para siswa akan semakin terpacu untuk sukses mengikuti para seniornya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Syarief Hasan berdialog dengan para siswa secara online. Dalam dialognya, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mendorong siswa untuk rajin dalam menuntut ilmu, agar bangsa ini memiliki banyak sumber daya manusia yang unggul.

"Kalian mesti bersyukur bisa menempuh pendidikan di salah satu sekolah yang berkualitas di Indonesia. Untuk itu kalian harus memanfaatkan betul-betul, jangan disia-siakan dan jangan malas. Kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh serta konsisten, saya yakin kalian akan mudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mungkin saja kalian bisa mengikuti jejak saya, bahkan lebih," tandasnya.

Di sesi akhir, Syarief Hasan mengajak para guru untuk membimbing anak didiknya dengan baik, penuh semangat demi masa depan negara. Dan, untuk para siswa agar selalu patuh pada para guru, serap semua ilmu yang diberikan dengan kesungguhan hati, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kemudahan dalam menempuh pendidikan. ❑

DER

50-61 JUN.pmd 57 1/1/2003, 2:31 AM

Aduan Masyarakat Adat Batak

Menyoal Izin Konsensi Pengunaan Lahan PT. Toba Pulp Lestari

Berdasarkan aduan masyarakat. kehadiran PT. Toba Pulp Lestari justru menyebabkan berbagai persoalan yang tidak berkesudahan. Antara lain, terkait perampasan hak atas dasar sumber kehidupan, perampasan hak atas lingkungan aman dan lestari, perampasan hak atas pekerjaan, dan perampasan hak atas rasa nyaman.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencabut izin konsesi penggunaan lahan PT. Toba Pulp Lestari. Mengingat kehadiran PT. Toba Pulp Lestari (TPL), yang dahulu bernama PT. Inti Indorayon Utama, selama lebih kurang 30 tahun di Tapanuli, Sumatera Utara, justru menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Batak.

Berdasarkan aduan masyarakat yang masuk, kehadiran PT. Toba Pulp Lestari justru menyebabkan berbagai persoalan yang tidak berkesudahan. Antara lain terkait perampasan hak atas dasar sumber kehidupan, perampasan hak atas lingkungan aman dan lestari, perampasan hak atas pekerjaan, dan perampasan hak atas rasa nyaman.

PT. Toba Pulp Lestari pada awalnya mendapatkan izin konsesi seluas 269.060 dari negara, berdasarkan SK No.493 KPTS-II/Tahun 1992. Setelah mengalami delapan kali revisi, yang terakhir SK 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020, izin konsesi menjadi 167.912 hektar. Fakta di lapangan, wilayah konsesi bersinggungan dengan wilayah masyarakat adat. Menyebabkan akar konflik agraria yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan hingga saat ini.

"Pemerintah harus memproses hukum pelanggaran yang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari baik kehutanan, lingkungan hidup, dan pencemaran/Pengaringan Kawasan Pertanian dan Danau Toba, termasuk pemukulan terhadap masyarakat," ujar Bamsoet menanggapi aduan masyarakat adat, di Jakarta, Selasa (25/5/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, PT Inti Indorayon Utama secara resmi berdiri pada 26 April 1983. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Pada 31 Oktober 1984, Gubernur Sumatera Utara mengabulkan permohonan lokasi pabrik PT. Inti Indorayon Utama seluas 200 ha di Sosor Ladang Porsea. Pada 19 November 1984, PT. Inti Indorayon Utama memperoleh Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 180.000 ha yang hutan alam dan hutan pinus merkusi di Sumatera Utara.

Selanjutnya, Bamsoet menjelaskan, pada 20 Mei 1985, Prof. Dr. Otto Soemarwoto mengirim surat ke BPPT menolak ikut bertanggung jawab atas keputusan rapat 'ilmiah' pada 17 Mei 1985. Alasannya, tidak cukup data untuk mengambil keputusan secara ilmiah. Data ilmiah yang disajikan tim peneliti dari USU sangat kurang. Tidak memadai untuk mengambil kesimpulan ilmiah. Para ahli ekologi juga tidak setuju dengan pendirian pabrik PT. Inti Indorayon Utama di hulu sungai/pegunungan, karena memicu berbagai bencana ekologis. Pada 21 Mei 1985, Otorita Pengembangan Proyek Asahan (OPPA) menolak ikut bertanggung jawab atas lokasi pabrik dengan suratnya kepada Menristek/Ketua BPPT.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, dalam praktiknya, PT. Toba Pulp Lestari seringkali memaksa masyarakat adat yang sudah lama mendiami berbagai wilayah konsesi untuk menerima bahwa merekalah yang berhak menguasai dan mengelola wilayah adat tersebut. Sikap arogansi perusahaan ditunjukkan dengan berbagai upaya penggusuran yang selalu melibatkan aparatur dan instansi pemerintahan.

"Kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat adat di wilayah konsesi kerap

50-61 JUN.pmd 58 1/1/2003, 2:31 AM

terjadi hingga saat ini. Konflik paling besar antara masyarakat adat dengan PT. Toba Pulp Lestari berawal pada 2000, yang mengakibatkan seorang mahasiswa, Panuju Manurung, dan Siswa SMK bernama Hermanto, meninggal dunia. Pada 18 Mei 2021, masyarakat Adat Natumingka mendapatkan tindakan kekerasan dan kriminalisasi. Terdapat 12 warga yang mendapat luka cukup serius," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, saat ini, sekitar 23 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten Kawasan Danau Toba turut berkonflik dengan PT. Toba Pulp Lestari. Total wilayah adat yang diklaim sepihak sebagai konsesi perusahaan sekitar 20.754 hektar.

Menurut Bamsoet, sepanjang tahun 2020-2021, sebagaimana disampaikan KSPPM Parapat, PT. Toba Pulp Lestari melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap warga. Antara lain, pada 4 September 2020, security dan utusan PT. Toba Pulp Lestari mengintimidasi masyarakat adat Natinggir. Pada 9 Oktober 2020, sekitar 150 orang security dan Humas PT. Toba Pulp Lestari kembali mendatangi masyarakat yang sedang berladang, sekitar 30 orang masyarakat mengalami tindak kekerasan. Pada 27 November 2020, PT. Toba Pulp Lestari melarang masyarakat adat Ompu Panggal Manalu di Aek Raja menanam di wilayah adatnya. Tanaman kopi dan pisang masyarakat dirusak security PT. Toba Pulp Lestari.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, pada 21 Desember 2020, PT. Toba Pulp Lestari menerbitkan surat larangan kepada masyarakat Natinggir untuk membangun rumah di atas wilayah adatnya. Dilanjutkan pada Januari 2021, PT Toba Pulp Lestari melaporkan masyarakat adat Op. Ronggur Simanjuntak ke Polres Tapanuli Utara, karena tetap berladang di areal konsesi, padahal korban jelas berladang di tanah adat mereka. Pada 20 April 2021, warga Parbulu melakukan aksi protes terkait limbah pembibitan PT. Toba Pulp Lestari yang mencemari sawah mereka yang dijadikan lokasi pembibitan. Pdt. Faber Manurung sampai dibawa paksa polisi.

Selanjutnya, papar Bamsoet, pada 30 April 2021, PT. Toba Pulp Lestari didampingi polisi desa dan Babinsa menghentikan aktivitas penanaman warga dan memicu konflik. Sedangkan pada 18 Mei 2021, PT. Toba Pulp Lestari mengancam dan melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat Natumingka, sebanyak 12 warga mengalami luka-luka akibat dipukul dan dilempari oleh security, humas dan karyawan PT. Toba Pulp Lestari. "Aparatur kepolisian harus menindak dan memproses hukum tindakan kekerasan yang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari terhadap masyarakat adat," pungkas Bamsoet. ❑

50-61 JUN.pmd 59 1/1/2003, 2:31 AM

Validitas DTKS

HNW Desak Agar Diperbaiki

Puluhan juta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditengarai tidak akurat, dan harus segera diperbaiki.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mendesak Kementerian Sosial untuk menindaklanjuti teguran Presiden Joko Widodo terkait rendahnya akurasi data yang disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah 2021 pada Kamis (27/5/2021).

Teguran tersebut disampaikan Presiden karena adanya temuan BPKP, BPK, dan KPK pada 2020 yang mendapati puluhan juta data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak valid. Hidayat meminta Presiden tidak hanya menyinggung masalah sengkarut data, namun juga harus serius mengawal jajarannya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, lantaran sejak awal periode kepemimpinannya di 2014 belum ada penyelesaian yang sistematik dan menyeluruh.

"Pengelolaan DTKS oleh Kemensos pertama kali dijalankan di 2016, yakni pada periode pertama Presiden Jokowi, sesuai amanat UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Sayangnya hingga hari ini Presiden dan jajarannya belum bisa menciptakan sistem pengelolaan data terpadu yang baik sehingga banyak data tidak valid," demikian disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

Hidayat yang juga anggota DPR-RI Komisi VIII menjelaskan, pada rapat kerja terakhir dengan Kemensos (24/5/2021) Menteri Risma melaporkan, terdapat sekitar 21 juta data dalam DTKS yang ditidurkan. Data tersebut kemudian ditambahkan sebagian data dari penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Keluarga Harapan. Wajarnya, dengan "ditidurkannya" 21 juta data maka data DTKS baru berkurang, atau tidak banyak berubah secara jumlah dari DTKS sebelumnya.

Namun, pada New DTKS yang diputuskan oleh Menteri Sosial pada 1 April 2021 terdapat penambahan data menjadi 139 juta dari sebelumnya yang berjumlah 97 juta data individu. Hidayat mempertanyakan validitas 42 juta data yang ditambahkan tersebut, sekaligus meminta Komisi Pemberantas Korupsi untuk turut memeriksa hal ini. Apalagi, dari 139 juta data tersebut hanya 100 juta data yang sudah padan dengan Dukcapil, sehingga sisanya dikhawatirkan sebagai data siluman, sebagaimana 97 juta data siluman terkait ASN yang ditemukan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga mengingatkan Presiden Jokowi bahwa strategi Kementerian Sosial hari ini yang melakukan verifikasi dan validasi data secara terpusat potensial bermasalah. Pasalnya, sesuai UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang pendataan dan verivali tingkat 1 terdapat di Pemerintah Daerah.

Menurut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, pelibatan Pemda dalam upaya sistematik verivali akan menciptakan pembaruan data berkelanjutan, bukan hanya perbaikan temporal yang dilakukan Kemensos saat ada temuan dari BPKP maupun KPK. Potensi bermasalah dari verivali terpusat yang dijalankan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini terbukti dengan adanya temuan dari KPK berupa inefisiensi anggaran dari kebijakan tersebut senilai Rp 581 Miliar.

HNW meinta, jangan sampai data terpadu hanya serius dibenahi ketika muncul temuan ke publik. Apalagi, Komisi VIII DPR-RI telah membantu menyediakan kenaikan anggaran validasi data hingga Rp 1,2 Triliun. Mensos harusnya bisa menggunakan anggaran itu untuk bantu verivali di daerah, bukan justru digunakan untuk hal yang malah memunculkan inefisiensi anggaran, di tengah merosotnya pendapatan Negara akibat Covid-19.

"Presiden Jokowi seharusnya juga memastikan tidak terjadinya inefisiensi seperti ini, agar APBN yang ada bisa dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya membantu warga terdampak covid-19," pungkas Hidayat. ❑

MBO

50-61 JUN.pmd 60 1/1/2003, 2:31 AM

Demokrat Kritis Bukan Kaum Tidak Move On

Di tengah masyarakat ada kelompok yang percaya kepada demokrasi, namun mereka kritis, terus mengkritik, dan merasa tidak puas pada keadaan yang ada. Jangan anggap mereka orang yang tidak move on. Justru mereka adalah kaum yang terdidik, bahkan disebut sebagai kaum demokrat yang tidak puas.

ISI dari buku berjudul *Kaum Demokrat Kritis, Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi* itu tak perlu diragukan lagi. Buku yang diterbitkan oleh *KPG (Kepustakaan Popular Gramedia)* ini disusun oleh akademisi yang tak perlu diragukan mengenai ilmu, pengetahuan, pengamatan, dan wawasannya dalam dunia politik di Indonesia. Mereka adalah Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi.

Latar belakang dari ketiga serangkai (penulis) itu sudah banyak diketahui. Saiful Mujani, misalnya. Seperti disebutkan di halaman 325, *Tentang Penulis*, Saiful Mujani adalah asosiate Profesor Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dia adalah intelektual dan pendiri perusahaan penelitian politik SMRC. Nama perusahaannya ini diambil dari nama dirinya, yakni *Saiful Mujani Research and Consulting*.

Sedang R. William Liddle, dalam hal 326, disebut Profesor Emiritius di Ohio State University. Dalam masa hidupnya, pria yang akrab disapa Liddle itu telah mencurahkan seluruh karier akademiknya untuk meneliti, mengamati, dan menganalisis perpolitikan di Indonesia. Sementara Kuskridho Ambardi adalah dosen senior di Universitas Gadjah Mada dan merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia.

Buku setebal xiii + 326 hlm itu yang mengangkat tema dan topik yang sudah banyak dikupas oleh banyak akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri. Yakni peta perpolitikan di Indonesia, mulai dari (Pemilu) tahun 1955 hingga Pemilu 2014. Seperti buku berjudul *PPP dan Politik Orde Baru* (1991) yang ditulis oleh Syamsuddin Haris.

Untuk membaca buku itu pastinya membutuhkan kesabaran, sebab apa yang diulas dan dikupas padat data, apalagi mengenai pemilu beserta tahapannya, dari masa ke masa, yang setiap pemilu pastinya banyak peristiwa dan kejadian menarik. Pengalaman riset dan survei yang mereka lakukan mewarnai setiap ulasan. Bahkan, dalam buku yang cetakan pertama pada April 2019 itu penuh ulasan hasil survei, seperti dipaparkan oleh para surveyor di televisi-televisi.

Dari 6 Bab buku ini berisi kupasan dan ulasan mengenai peta politik dan peran kaum demokrat kritis, semua berakhir pada Bab 7, yakni *Kesimpulan*. Dari jutaan kata yang tertuang dalam buku yang bersampul gambar kotak-kotak suara itu, tersimpul: Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbaru di dunia yang rakyatnya telah menumbangkan kediktatoran Orde Baru selama tiga decade yang dipimpin Presiden Soeharto, pada 1998. Sejak saat itu, empat pemilu telah digelar di tingkat nasional, pada 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Terkait kaum demokrat kritis, disimpulkan: meski sebagaian besar warga negara merasa puas dengan bagaimana demokrasi dijalankan, warga yang terdidik secara lebih baik cenderung negatif dalam penilaian mereka atas kinerja demokrasi. Mereka memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan komitmen tersebut diikuti dengan tuntutan atas penerapan demokrasi yang lebih baik. Dalam buku itu, mereka disebut sebagai kaum demokrat kritis, 'warga negara kritis', kaum demokrat yang tidak puas'. Sebutan ini diambil dari terminologi Pippa Norris (1999, 2011).

Norris lebih gamblang menuturkan, kelompok ini menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ideal, namun pada saat yang sama mereka tetap sangat skeptis ketika mengevaluasi bagaimana demokrasi berjalan di negara mereka sendiri (2011:5). *Skeptis* mempunyai arti kurang percaya, ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran dan sebagainya).

Dari sinilah penulis buku mengatakan, karena warga Indonesia menjadi makin terdidik, kami memprediksi bahwa komitmen warga negara terhadap demokrasi akan menjadi makin besar, namun demikian juga dengan ketidakpuasaan mereka. ❑

AWG

50-61 JUN.pmd 61 1/1/2003, 2:31 AM

Sosialisasi di STT Pelalawan

Bamsoet
PPHN Diperlukan untuk Menyatukan Visi Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, komposisi kepemimpinan di MPR 2019-2024 sudah menyentuh seluruh kepentingan politik, terdapat keterwakilan sembilan partai politik dan satu unsur kelompok DPD. Dengan komposisi seperti ini menjadikan konsolidasi politik sekaligus konsolidasi sosial kemasyarakatan lebih mudah dilakukan. Sehingga mempermudah kinerja MPR saat ini dalam menjalankan rekomendasi dua periode kepemimpinan MPR sebelumnya (2009-2014 dan 2014-2019) untuk melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945, guna mengembalikan wewenang MPR menetapkan pedoman pembangunan nasional 'model GBHN', yang dalam rekomendasi MPR 2014-2019 disebut dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Euforia reformasi menggantikan GBHN dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, di mana penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berlandaskan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih, justru menimbulkan ketidakpastian kesinambungan pembangunan. Tidak heran jika publik setuju agar MPR bisa kembali menyusun dan menetapkan haluan negara," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (STTP), di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat (4/6/21).

Turut hadir, antara lain Direktur Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan Detri Karya, Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, Bupati Pelalawan Zukri Misran, Wakil Bupati Pelalawan Nasaruddin, Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin, Wakapolres Pelalawan Kompol Raden Edi Saputra, dan Dandim 0313/KPR Letkol Inf Leo Octavianus Sinaga.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, dorongan kuat agar MPR kembali memiliki wewenang menetapkan haluan negara, antara lain datang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, dan berbagai Organisasi Keagamaan mulai dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu. Serta berbagai civitas akademika, antara lain Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Universitas Warmadewa Bali, dan Universitas Mahasaraswati Bali.

"Hakikat pembangunan merupakan proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan perspektif yang

62-71 JUN.pmd 62 1/1/2003, 12:48 AM

sama. Karenanya, haluan negara tidak hanya penting dalam memastikan pembangunan telah berjalan pada arah dan jalur yang benar, tetapi juga untuk menyatukan visi kebangsaan. Melalui keberadaan PPHN, visi misi presiden, gubernur, bupati dan walikota akan terangkum dalam satu kesatuan sebagai visi misi negara," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, seiring masih dalam suasana hari peringatan kelahiran Pancasila, dia menegaskan bahwa terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditetapkan setiap tanggal 1 Juni, pada akhirnya, dan sudah seharusnya, mengakhiri polemik mengenai hari lahir Pancasila. Keputusan Presiden tersebut diterbitkan dengan merujuk pada fakta sejarah.

"Pertama, bahwa pertama kali Pancasila diperkenalkan sebagai Dasar Negara adalah pada 1 Juni 1945. Kedua, bahwa rumusan Pancasila, baik yang disampaikan Soekarno sejak 1 Juni 1945, rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, maupun rumusan final 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses, dan satu tarikan nafas lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara," pungkas Bamsoet. ❑

62-71 JUN.pmd 63 1/1/2003, 12:48 AM

Temu Tokoh Nasional di Riau

Pengorbanan Para Pahlawan, Teladan bagi Generasi Muda

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menegaskan, Yang Dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Kasim II Raja ke-12 Kesultanan Siak, memiliki tempat tersendiri di hati bangsa Indonesia. Berkat perjuangan dan pengorbanannya, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, makin bermakna.

Pasalnya beberapa bulan setelah Proklamasi, Sultan Syarif Kasim II berkirim kabar kepada Bung Karno. Saat itu Sultan Syarif Kasim II menyatakan bahwa kesultanan yang dipimpinnya siap bergabung bersama NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ia juga merelakan wilayah kerajaannya menjadi bagian dari NKRI. Bahkan Sultan Syarif Kasim juga menyerahkan mahkota kerajaan yang berhias batu permata. Serta menyumbang dana sebesar 13 juta Golden setara dengan Rp 1 triliun untuk pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, ia juga mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk mendukung NKRI.

"Sebelum proklamasi, Sultan Syarif memang sudah dikenal sebagai pendukung kemerdekaan. Ia kerap membantu para pejuang. Ia juga membangun masyarakatnya melalui pendidikan. Pada 1917, Sultan Syarif mendirikan Madrasah Taufiqiyah Al Hasyimiah. Kemudian pada 1926 beliau juga mendirikan sekolah khusus untuk perempuan," kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid.

HNW menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada acara Temu Tokoh Nasional, yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Rengat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Acara yang berlangsung di Wisma Happy, Pematang Reba, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, itu membahas tema: "Membangkitkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Desa." Selain HNW, hadir sebagai pembicara anggota MPR Fraksi PKS H. Syahrul Aidi Maqzat, Lc., M.A.

Mengingat jasa-jasanya yang begitu besar, menurut HNW, pantas jika bangsa Indonesia memberikan penghargaan kepada Sultan Syarif, meski saat ini namanya diabadikan menjadi nama Bandara Internasional di Pekanbaru.

Secara spesifik, HNW menyebutkan, Sultan Syarif adalah teladan. Ia adalah tokoh daerah yang berhasil membangun wilayahnya, kemudian berkontribusi dalam pembangunan di pusat. "Ini harus menjadi panutan bagi kita semua, khususnya generasi muda," ungkap HNW.

Sesungguhnya banyak tokoh terdidik dari daerah, lalu menjadi aktivis dan terpanggil untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. HNW menunjuk contoh para pejuang yang tergabung dalam BPUPK, PPKI, dan Panitia Sembilan. Di kalangan anggota perlemen misalnya, dikenal sosok M. Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi. Berkat Mosi Integral Natsir pada 3 April 1950 Indonesia kembali menjadi NKRI, setelah sebelumnya berbentuk negara RIS.

Sementara itu, anggota MPR Fraksi PKS, H. Syahrul Aidi Maqzat, Lc., M.A., menyatakan, saat ini dunia, termasuk Indonesia, berada pada era disrupsi atau percepatan. Pada era ini kompetitor usaha muncul dengan sangat cepat. Karena itu, masyarakat dituntut memproduksi sendiri kebutuhan yang diperlukan agar bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena kalau kebutuhan tersebut masih dipenuhi orang lain, niscaya kita akan terus terjajah.

"Tidak usah berfikir soal mobil atau kendaraan, tapi cukup kebutuhan sehari-hari. Apa yang dimakan dan dipakai, itu perlu kita cukupi sendiri," kata Syahrul. Karena, potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri sangat besar. Apalagi saat ini ada jaringan sangat luas, seperti di Kemendes dan Bumdes. Dan, itu harus dimanfaatkan sebaik- baiknya. ❑

MBO

62-71 JUN.pmd 64 1/1/2003, 12:48 AM

Sewindu Wafatnya Bapak Empat Pilar MPR RI

Warisan Empat Pilar MPR RI Taufiq Kiemas Berhasil Merajut Keberagaman

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, sekalipun Taufiq Kiemas sudah meninggal dunia, namun berbagai peninggalannya akan tetap abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Terutama warisan tentang pentingnya memasyarakatkan (sosialisasi) Empat Pilar Kebangsaan, yang kemudian diubah menjadi Empat Pilar MPR RI.

"Tidak berlebihan kiranya jika segenap komponen bangsa Indonesia memberikan penghargaan kepada almarhum Taufiq Kiemas sebagai Bapak Empat Pilar MPR RI. Warisan Empat Pilar MPR RI tersebut sangat berguna bagi menjaga keberlangsungan masa depan Indonesia. Sehingga tidak terpecah belah akibat suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Empat Pilar MPR RI merajut keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia, bukan sebagai sumber pertikaian," ujar Bamsoet mengenang Sewindu Wafatnya Taufiq Kiemas, di Jakarta, Rabu (9/6/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai landasan konstitusional. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus bentuk kedaulatan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam kemajemukan bangsa.

"Memasyarakatkan Pancasila, pada hakikatnya adalah menumbuhkan keyakinan tentang kebenaran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekaligus melakukan aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari," jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan, memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan agar konstitusi negara memiliki makna dan membawa manfaat yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi harus dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh elemen masyarakat, sebagai 'konstitusi yang hidup', yang mampu menjawab tantangan zaman. Serta 'konstitusi yang bekerja' untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial.

"Memasyarakatkan NKRI diselenggarakan dalam kerangka membangun komitmen kebangsaan, untuk memaknai negara sebagai 'rumah bagi kemajemukan,' yang mengakomodir berbagai aspirasi dan arus pemikiran, dengan tetap menempatkan ikatan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai landasan berpijak dan bertindak," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, memasyarakatkan Bhinneka Tunggal Ika meniscayakan setiap orang untuk mawas diri, dan sadar diri, bahwa pada hakikatnya keberagaman adalah fitrah kebangsaan yang harus diterima, diakui, dan dihormati. Menghormati perbedaan adalah wujud keberanian dan kedewasaan untuk melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat dibangun kesepahaman yang menyatukan.

"Bapak Taufiq Kiemas juga termasuk tokoh yang menginisiasi Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sebab pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, Bung Karno pertama kali berpidato menyampaikan gagasannya tentang 5 dasar atau pokok pegangan bernegara. Berkat gaya diplomasi beliau yang lembut, akhirnya seluruh komponen bangsa bisa menerima gagasan tersebut. Hingga akhirnya negara mengakui secara resmi tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2016," pungkas Bamsoet. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

62-71 JUN.pmd 65 1/1/2003, 12:48 AM

Mukernas Garda Bangsa

Dapatkan Kekuasan Secara Santun dan Beradab

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN ratusan politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid SQ., MA., mengingatkan, dalam praktik politik ada saja pihak yang suka menempuh segala macam cara untuk mendapatkan kemenangan. Termasuk menggunakan cara-cara yang tidak benar, tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan kekuasaan.

Gus Jazil, begitu Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB ini biasa disapa, menjelaskan bahwa memperoleh kekuasaan menggunakan segala cara ini dipopulerkan oleh Niccolo Machiavelli. Dia adalah seorang ilmuan yang pertama kali berhasil membaca fenomena menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh kekuasaan di ranah politik.

Selain praktik menghalalkan segala cara, seperti dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli, di dalam dunia politik juga dikenal filosofi: "Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan perangmu. Seribu kali kau berperang, seribu kali kau menang." Filosofi ini diciptakan oleh Sun Tzu. Filosofi Sun Tzu ini sudah berumur ribuan tahun, tetapi masih relevan sampai sekarang.

Bagi kita bangsa yang ber-Pancasila, kata Gus Jazil, tentu filosofi Sun Tzu lebih bisa diterima dibanding praktik politik menggunakan segala cara (Niccolo Machiavelli). Karena meraih kemenangan dengan menghalalkan segala cara jelas tak sesuai dengan Pancasila. Terlebih menggunakan agama sebagai alat politik, demi kepentingan kekuasaan. "Apalagi, pengikut Machiavelli tak jarang menggunakan cara-cara bertentangan dengan norma-norma, asal tujuan politiknya tercapai," ujar Gus Jazil.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan peserta Muskernas Dewan Koordinasi Nasional (DKN) dan Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Gerakan Pemuda Kebangkitan (Garda) Bangsa. Acara tersebut berlangsung di Hotel Amanuba Rancamaya Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (3/4/2021).

Melihat banyaknya praktik melanggar norma untuk mendapatkan kekuasaan maka Gus Jazil mengajak politisi PKB untuk memenangkan pemilihan dengan cara yang lebih baik dan beradab. "Bukan dengan cara memecah belah, memanfaatkan agama sebagai alat politik, ataupun menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kemenangan," tegas Gus Jazil.

Pada kesempatan itu, Jazilul Fawaid juga mengingatkan, mereka yang terjun ke ranah politik sebaiknya mereka yang sudah selesai dengan kehidupan pribadinya. Agar, mereka bisa memperjuangkan aspirasi rakyat, tanpa berfikir keuntungan apa yang akan diperolehnya secara pribadi. "Mereka juga harus memahami UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi, yang berfungsi sebagai penunjuk arah perubahan dan kemajuan. Ini penting agar mereka paham apa yang hendak dicapai dalam pembangunan ini," tegas Gus Jazil.

Selain itu, menurut Gus Jazil, seorang politisi juga harus mengenal UU, yang menjadi petunjuk praktis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jangan sampai mereka melupakan UU, sehingga perjuangannya membela masyarakat malah bertentangan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. ❑

MBO

62-71 JUN.pmd 66 1/1/2003, 12:48 AM

Diskusi Wawasan Kebangsaan

Tes Wawasan Kebangsaan Lumrah Bagi Calon ASN

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN puluhan wartawan parlemen, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku prihatin munculnya kegaduhan akibat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Menurut Syarief Hasan, pelaksanaan TWK merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu diributkan. Tetapi, semestinya hasil TWK bukan menjadi satu-satunya penentu kelulusan pegawai KPK menjadi ASN.

Selain hasil TWK, kelulusan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya juga mempertimbangkan komponen yang lain. Seperti, integritas, loyalitas, prestasi serta pendidikan. Jadi, bukan semata-mata bergantung pada hasil TWK.

"Mestinya ada skoring yang jelas dari semua komponen, bukan hanya hasil TWK semata. Agar tidak terjadi kasus pegawai yang minim prestasi diangkat menjadi ASN. Sementara pegawai lain yang prestasinya besar, memiliki integritas dan loyalitas, serta pendidikan baik, malah tidak diangkat menjadi ASN hanya karena tidak lulus TWK," ujar Syarief Hasan.

Pernyataan itu disampaikan Syarief Hasan saat menjadi narasumber diskusi Empat Pilar MPR RI, yang diselenggarakan Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI.

Acara yang berlangsung di Media Center MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021) itu membahas tema: "Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN." Selain Syarief Hasan, diskusi itu juga menghadirkan dua pembicara lain, yaitu: Anggota Fraksi PKB MPR RI Dr. Yanuar Prihatin, dan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau Cak Nanto.

Pada kesempatan itu, Syarief Hasan mempertanyakan TWK yang dilaksanakan terhadap pegawai KPK, apakah didahului dengan sosialisasi atau tidak. Seperti dalam sekolah formal, semestinya setelah dilakukan pendidikan, beberapa waktu kemudian dilakukan ujian. Artinya, apa yang sudah diberikan, itulah yang diujikan.

"Ada baiknya, tugas sosialisasi Wawasan Kebangsaan itu diserahkan kepada BPIP. Apalagi, lembaga tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara Presiden adalah atasan bagi seluruh ASN," kata Syarief Hasan lagi.

Pernyataan serupa disampaikan Dr. Yanuar Prihatin. Anggota MPR Fraksi PKB ini merasa aneh orang meributkan masalah wawasan kebangsaan. Karena wawasan kebangsaan itu adalah sesuatu yang fundamental, penting, dan hakiki bagi bangsa Indonesia. Yanuar makin bingung karena masalah wawasan kebangsaan ini baru diributkan sekarang. Yaitu, ketika berkaitan dengan pegawai KPK.

"ASN beserta TNI dan Polri adalah pilar yang wajib memahami dan menghayati wawasan kebangsaan. Apa jadinya negara Indonesia bila mereka tidak menghayati wawasan kebangsaan. Demikian juga masyarakat pada umumnya," ujar Yanuar.

Sementara Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, wawasan kebangsaan yang sedang diributkan akhir-akhir ini adalah persoalan yang sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa. Hanya saja, ada beberapa oknum masyarakat yang mencoba mempersoalkannya lagi, karena tidak ingin bangsa Indonesia membahas soal kemajuan.

"Inilah oknum yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia mengalami kemajuan, sehingga mengulang-ulang persoalan yang sudah dibahas dan diselesaikan oleh para pendiri bangsa," kata Cak Nanto. ❑

MBO

62-71 JUN.pmd 67 1/1/2003, 12:48 AM

Pelantikan Pejabat Fungsional

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono, melantik lima orang pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Acara yang digelar di Kompleks MPR, Senayan, Jaakarta, pada 11 Mei 2021 itu dihadiri beberapa pejabat eselon II dan III.

Dalam pesannya, kepada pejabat yang baru dilantik, Sesjen MPR mengatakan agar amanah yang dipercayakan tersebut dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hal itu mesti dilakukan agar MPR secara keseluruhan bisa menjadi lembaga yang bisa dibanggakan secara internal dan berkontribusi secara baik buat negara dan bangsa. ❑

DER

62-71 JUN.pmd 68 1/1/2003, 12:48 AM

RDP MPR dengan Komisi III

PERWAKILAN Sekretaris Jenderal MPR menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI mengenai pembahasan Rencana Kerja Anggaran K/L dan Rencana Kerja Pemerintah K/L Tahun 2021, pada Rabu (2/6/2021), bertempat di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II.

Acara RDP ini dibuka oleh Pimpinan Komisi III DPR RI, Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum., serta dihadiri oleh anggota komisi III DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Setjen MPR memaparkan secara komprehensif rencana kerja dan anggaran Setjen MPR tahun 2021 serta rencana kerja dan anggaran tahun 2022.

Sebagai Pimpinan Rapat, Adies Kadir memberikan beberapa masukan kepada MPR terkait pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran. ❑

DER

Rapat Konsultasi Renja MPR

DI RUANG GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021), digelar Rapat Konsultasi Pembahasan Rencana Kerja (Renja) MPR RI Tahun Anggaran 2022 dengan para mitra DJA Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Rapat konsultasi ini digelar untuk semakin mengefisienkan tugas-tugas dan kerja-kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, sehingga ke depannya bisa maksimal dalam melakukan pelayanan kepada Pimpinan MPR, dan mampu mencapai prinsip reformasi birokrasi dengan baik. ❑

DER

62-71 JUN.pmd 69 1/1/2003, 12:48 AM

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Mardani Ali Sera, Anggota MPR RI

Sistem Keamanan Database Harus Diperkuat

MASYARAKAT Indonesia belum lama ini dihebohkan dengan kebocoran data penduduk Indonesia. Jumlah data yang bocor tidak main-main, yaitu 279 juta data penduduk. Informasi awal tentang terjadinya kebocoran data itu bersumber dari dunia maya. Di jagat maya, website dengan nama user Kotz mengiklankan penjualan data penduduk Indonesia. Data pribadi 279 juta penduduk Indonesia itu dijual secara online di forum hacker Raids Forums. Informasi itu tersebar di jagat maya sejak Kamis, 20 Mei 2021.

Iklan tersebut memberikan link sampel data yang bisa di-download. Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor induk kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, NPWP, email, no HP, dan lainnya, termasuk besar gaji. Sampel data itu valid. Data tersebut terdapat dalam NOKA atau nomor kartu BPJS Kesehatan. Berdasarkan informasi, pemilik data menjual kumpulan data ini dengan harga 0,15 bitcoin atau setara Rp 87 juta.

Kebocoran data 297 penduduk Indonesia itu langsung mengundang reaksi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk anggota dewan. Menanggapi kebocoran data itu, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Berikut perbincangan dengan anggota Komisi II DPR yang juga Ketua DPP PKS. Petikannya.

Data 297 penduduk Indonesia bocor. Data ini diperjualbelikan di dunia maya. Ada dugaan data penduduk Indonesia yang bocor itu adalah data dari BPJS Kesehatan. Apa tanggapan Bapak atas bocornya jutaan data penduduk Indonesia itu?

Pertama, kebocoran data penduduk Indonesia ini adalah sebuah bencana. Coba Anda bayangkan, data ini bukan jatuh ke tangan penjahat atau kriminal, tetapi jatuh ke negara lain. Apalagi negara itu mempunyai kepentingan untuk menginvasi atau merusak kependudukan Indonesia. Tentu ini sangat mengerikan bagi Indonesia.

Kedua, kebocoran data penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Mengapa saya mengatakan sebuah keniscayaan? Sebab, data base penduduk Indonesia dilakukan secara sentralisasi. Artinya, ada database penduduk Indonesia secara sentral. Dengan sentralisasi database maka kita mestinya menyadari kemungkinan adanya kebocoran.

Sekarang dari info yang beredar, data 297 juta penduduk Indonesia yang bocor itu adalah data dari BPJS Kesehatan. Bukan tidak mungkin kebocoran data bisa terjadi di tempat lain, misalnya di Kementerian Dalam Negeri atau Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ini bisa saja terjadi kalau kita tidak menjaga atau memiliki keamanan (security) database kita.

Secara pribadi saya melihat Indonesia itu sangat bhinneka tunggal ika. Karena itu, sebenarnya kita tidak cocok melakukan sesuatu secara sentralisasi. Biarkanlah dilakukan pengelolaan secara desentralisasi. Misalnya, data kependudukan dilakukan di tingkat provinsi saja. Contohnya, Amerika Serikat sebagai sebuah negara besar tidak mempunyai sistem identifikasi kependudukan (atau di sini kita sebut KTP) secara terpusat. Masing-masing negara bagian

62-71 JUN.pmd 70 1/1/2003, 12:48 AM

mempunyai database kependudukan sendiri.

Jika demikian, memang sangat riskan untuk melakukan sentralisasi data kependudukan?

Sangat bahaya sekali. Kita tidak menyadari bahwa perang di masa depan bukanlah perang fisik melainkan perang cyber. Dalam perang cyber ini, database menjadi sangat penting. Kita akan mudah dikalahkan dalam perang cyber jika database kita berantakan. Lihat saja sekarang, kita tidak punya sistem yang jelas dikaitkan dengan pengeluaran paspor kita. Banyak sekali lubang-lubangnya dan kelemahan dalam sistem pengeluaran paspor kita.

Misalnya, hanya dengan satu kartu identitas, seperti KTP, kita bisa membuat paspor. Seharusnya, ada syarat lain untuk mendapatkan paspor, misalnya dengan surat keterangan dari RT atau RW, atau surat keterangan lainnya. Sekarang ini untuk membuat KTP tidak perlu surat keterangan RT dan RW. Karena itu kita tidak mengetahui sudah berapa banyak WNI yang mendapatkan KTP dan kemudian dengan KTP itu bisa memiliki paspor. Dan, paspor itu digunakan untuk berbagai keperluan. Tentu ini sungguh merepotkan sekali.

Dengan sentralisasi data akibat penerapan e-KTP maka konsekuensinya sistem keamanan database kita seharusnya makin kuat. Kasus kebocoran data ini menunjukkan bahwa database kita sangat rentan dan berbahaya. Karena itu, keputusan sentralisasi data mesti diikuti dengan keamanan data yang super kuat.

Bukankah apa yang terjadi sekarang ini juga bergantung pada regulasi yang dibuat DPR bersama pemerintah. Jika ada regulasi yang menjadi payung hukum tentu tidak terjadi kesemrawutan database kita?

Oleh sebab itu, kita di dewan sedang mengusulkan RUU Kewarganegaraan. Sekarang ini soal kewarganegaraan masih belum jelas. Contohnya, seorang calon bupati di NTT yang menang dalam Pilkada. Dia mengaku masih menjadi WNI, tetapi memiliki paspor Amerika Serikat. Sementara itu, kita tidak mengakui adanya dwikewarganegaraan. Itu baru satu contoh. Mungkin saja kasus seperti itu banyak terjadi, namun tidak terekspose.

Kasus kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia juga menjadi cermin lemahnya perlindungan data pribadi. Kasus ini sekaligus menegaskan pentingnya menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Sebab, sampai saat ini belum ada UU yang mengatur soal pengamanan data pribadi tersebut. Dan, perlu diingat bahwa data pribadi saat ini sudah menjadi komoditas strategis, baik oleh publik, swasta, maupun pemerintah sendiri.

Jadi, apakah soal data kependudukan Indonesia masih belum rapi dan tingkat keamanannya juga masih bisa ditembus?

Data kependudukan kita memang belum rapi dan keamanannya pun masih bisa ditembus. Saya beri contoh lagi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan ada puluhan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digaji, padahal mereka sebenarnya tidak bekerja bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Sejak kemerdekaan kita baru dua kali melakukan audit ASN. Nah, karena itu semua database ini segera dirapikan. Pemerintah sebagai eksekutif harus memberikan perhatian soal masalah ini untuk mengajukan UU, program, anggaran, sampai mengeksekusinya hingga selesai.

Apa yang harus dilakukan dengan terjadinya kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia ini?

Kita harus mengakui bahwa kebocoran data penduduk Indonesia yang menurut info adalah data BPJS Kesehatan merupakan sebuah kejadian yang mengerikan. Sebab, dampak dari kebocoran ini sangat luar biasa. Apalagi data yang bocor itu meliputi data yang lengkap dan jumlah data yang lebih banyak. Terjadinya kebocoran data ini harus ditelurusi mengapa bisa bocor. Ini merupakan PR besar dari BPJS Kesehatan, karena kebocoran data ini merupakan kejadian luar biasa. Pelakunya mesti dihukum.

Agar tidak terulang lagi di kemudian hari maka harus dilakukan penelusuran bagaimana terjadinya kebocoran itu, dan bagaimana modus operandinya. Dengan mengetahui modus operandinya maka akan membuat kita dapat memperbaiki sistem keamanan data kita ke depan. ❑

62-71 JUN.pmd 71 1/1/2003, 12:48 AM

Percepatan Pemulihan Bali Butuh Dukungan MPR

PANDEMI Covid-19 membuat Gubernur Bali, **I Wayan Koster**, pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak, ekonomi rakyat Bali terpuruk gara-gara pandemi ini. “Bali memang tergantung wisatawan, begitu penerbangan dibatasi, bahkan ditutup, ya sudah, ekonomi luruh,” katanya awal Juni lalu.

Berbagai upaya dilakukan, termasuk vaksinasi kepada 70% rakyat Bali. Untuk melaksanakan program itu, Bali butuh total 6 juta vaksin. “Kami harap kerjasama pemerintah melalui Kemenkes,” tambahnya.

Jika program ini berhasil, I Wayan Koster yakin, Bali akan menjadi zona hijau, dan penerbangan internasional dibuka. “Untuk itu, kami butuh dukungan berbagai pihak, termasuk MPR, agar Bali cepat pulih,” ucapnya. ❑

DER

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

I Wayan Koster

72-82 JUN.pmd 72 1/1/2003, 12:53 AM

Prihatin Konflik di Palestina

MENDENGAR berbagai pemberitaan soal konflik Palestina-Israel membuat hati artis cantik **Zaskia Mecca** sedih. “Ini adalah bencana kemanusiaan, bayangkan berapa banyak manusia tak berdosa, termasuk anak-anak, menjadi korban,” katanya.

Sebagai bentuk keprihatiannya, model berdarah campuran Aceh dan Sunda ini tuang dalam bentuk foto dan video soal Palestina di media sosial. “Sebenarnya enggak kuat juga melihat berbagai dampak buruk perang itu, tapi ini demi kemanusiaan, ini dilakukan agar semua orang mengetahui betapa buruk dan kejinya Israel,” ujarnya.

Zaskia berharap agar masyarakat Indonesia turut dalam kampanye kekejian terhadap kemanusiaan tersebut. “Supaya jadi pelajaran juga buat kita semua betapa berbahaya dan sengsaranya akibat peperangan,” imbuhnya. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Zaskia Mecca

Indri Petani Bule

Dukung Kemajuan Petani Indonesia

PROFESI petani sepertinya dianggap remeh. Bagi **Mba Bule,** anggapan seperti itu meresahkan. Soalnya, pemilik nama asli Indri Septinawati ini telah melakoni kegiatan sebagai petani sejak tujuh tahun silamu. Menariknya, mantan sosialita dan selegram ini awalnya menjadikan halaman rumahnya di Jakarta sebagai lahan pertanian.

Wanita berdarah campuran Betawi, Belanda, dan Jerman ini mengaku memang sangat menyukai pertanian. Dia mengawali pekerjaan sebagai petani dengan menanam singkong di daerah Bogor Barat. Namun, kini luas lahannya sekitar 3,5 hektar. Dan. yang ditanam bukan hanya singkong, tapi juga terong, ubi dan lainnya.

“Saya terjun langsung ke lahan lho, tapi tetap dengan style saya,” katanya dalam perbincangan di *Channel Youtube* Bambang Soesatyo, Mei lalu. Dan, Mba Bule berharap, sektor pertanian di Indonesia jangan diabaikan. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini pertanian malah harus lebih ditingkatkan lagi. ❑

DER

72-82 JUN.pmd 73 1/1/2003, 12:53 AM

Gara-gara Pandemi Covid-19 Pesta Kelulusan

Berlangsung dalam Kesunyian

SEBELUM pandemi Covid-19 terjadi, pada Mei-Juni, biasanya bulan sibuk untuk kegiatan di sekolahan. Bulan-bulan ini merupakan masa sibuk bagi para siswa. Mereka melakukan berbagai persiapan untuk menandai berakhirnya tahun ajaran lama, sebelum memasuki tahun ajaran baru. Bagi siswa kelas VI, IX, dan XII, saatnya serius mempersiapkan prosesi perpisahan dengan adik-adik kelasnya, dan tentunya juga dengan para guru.

Tetapi di tahun kedua masa pandemi Covid-19, kesibukan yang lazim terjadi pada bulan Mei-Juni ini tidak terlihat. Hampir semua sekolah menahan diri dari keramaian prosesi perpisahan ataupun upacara wisuda kelulusan, seperti yang sudah bertahun-tahun dilakukan.

Kali ini, tidak ada hiruk pikuk dan kegembiraan yang diekspresi para siswa atas keberhasilan belajarnya. Tidak ada suara musik, seperti sering dilakukan mengiringi acara perpisahan. Juga tidak ada tangis haru maupun foto bersama yang akan menjadi kenangan sepanjang masa. Yang ada hambar dan kehampaan, dan itu terjadi hampir di setiap sekolahan, tak terkecuali di SMA Lazuardi Global Compassionate School, Depok, Jawa Barat.

Pada kondisi normal, setidaknya ada tiga

acara yang dilaksanakan di SMA Lazuardi, yang bisa menjadi ajang unjuk kebolehan para siswa. Yaitu, Lazuardi Festival, Last Day, dan Wisuda. Namun, sejak terjadi pandemi Covid-19, ketiga acara tersebut praktis tidak bisa dilaksanakan. Bahkan pada tahun pertama pandemi (2020), pihak sekolah benar-benar meniadakan ketiga acara tersebut.

"Tahun ini kami coba adakan acara Last Day secara online. Memang, tidak bisa sepenuhnya mengobati rasa rindu para siswa untuk beraktivitas bersama teman-temannya, atau bertemu dengan para guru. Tetapi setidaknya ada usaha yang dilakukan agar tidak terasa hambar, lantaran tahun kemarin kami tidak melaksanakan acara apapun, sesuai himbauan pemerintah," kata Ivan Nur Ramadhan, penanggung jawab kegiatan Last Day SMA Lazuardi tahun 2021, saat dihubungi majalah ini beberapa waktu lalu.

Dalam acara tersebut seluruh siswa SMA Lazuardi hadir melalui gawai atau computer di rumah masing-masing. Demikian juga para guru dan pihak yayasan. Tetapi, tidak seperti acara serupa yang dilakukan secara *offline,* Last Day 2021 kali ini sangat minim kontribusi, baik dari para siswa maupun guru-guru. Bahkan, para siswa yang ikut dalam acara tersebut mengenakan pakaian

72-82 JUN.pmd 74 1/1/2003, 12:53 AM

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

seadanya. Tidak memakai seragam, maupun baju tertentu sesuai tema kegiatan.

Siswa kelas X dan XI yang mewakili angkatannya untuk terlibat dalam acara tersebut tidak bisa menampilkan kreativitas-nya, sebagaimana biasa dilakukan sebelum terjadinya pandemi. Mereka hanya bisa memberikan pesan dan kesan, atau menyampaikan kata-kata berisi semangat dan kalimat perpisahan dengan kakak-kakak kelasnya. Padahal, di luar masa pandemi aktivitas ini dilakukan penuh kejutan dan hentakan energi, laiknya anak-anak remaja.

Untuk menyegarkan ingatan, pihak sekolah menampilkan video kegiatan yang diselenggarakan sebelum pandemi. Berbagai aktivitas diabadikan dalam video tersebut. Mulai dari kegiatan ekstra kurukuler hingga berbagai acara unjuk kebolehan, serta kreativitas para siswa. Juga suasana sekolah dan asrama siswa SMA Lazuardi.

Acara yang digelar pada bulan Ramadan 2021 itu diakhiri dengan doa. Pada momen ini, baik para guru maupun siswa, tampak khusuk mangamini doa yang dipanjatkan seorang guru. Terlebih karena doa itu banyak diperuntukkan bagi siswa kelas XII yang akan meninggalkan sekolah. Juga doa buat kelancaran pendidikan bagi siswa kelas X dan XI. Termasuk doa mohon kesehatan dan keselamatan yang diperuntukkan bagi keluarga besar SMA Lazuardi khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Prokes

Larangan berkumpul yang diterapkan pemerintah, menurut Ivan, membuat pihaknya menahan diri. Tidak melakukan kegiatan yang sewajarnya dilaksanakan di akhir tahun ajaran. Bahkan, untuk acara kelulusan yang sangat ditunggu oleh para siswa, SMA Lazuardi menyelenggarakannya penuh kehati-hatian. Semua harus melewati cek suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun, dan tidak ada kerumunan.

“Siswa dan orangtuanya hanya diberi kesempatan sekitar sepuluh menit, mulai dari turun mobil, berjalan menuju stage penyerahan ijasah, menerima ucapan selamat, hingga foto bersama dengan kepala sekolah dan pihak yayasan. Setelah itu langsung pulang untuk digantikan siswa lainnya,” tutur Ivan.

Ivan sadar, banyak yang tidak puas dengan kondisi saat ini. Tetapi, sesuai anjuran pemerintah, pihak sekolah tidak mau melanggar protokol kesehatan. Dan, ingin berkontribusi dalam upaya menghentikan penularan Covid-19.

“Beberapa saat kita sudah melalui new normal, tampaknya kondisi itu masih akan bertahan hingga corona betul-betul hilang dari bumi Indonesia, dan dunia internasional pada umumnya,” ujar Ivan.

Ketidakpuasan terhadap pembatasan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 juga disampaikan Sri Harini, Kepala Sekolah SMP Negeri I Girimulyo, Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta. Menurut Rini, sapaan Sri Harini, para siswa membutuhkan penanda kalau mereka naik kelas, atau sudah tamat dari pendidikan yang dijalaninya.

Ketiadaan acara perpisahan atau kelulusan membuat penanda keberhasilan yang dinantikan para pelajar menjadi sirna. Padahal penanda keberhasilan itu hanya diperoleh sekali seumur hidup. Karena itu, menurut Rini, pihaknya berusaha agar prosesi perpisahan dan kelulusan siswa bisa tetap dilaksanakan.

“Kami terpaksa menunda acara prosesi kelulusan, dengan harapan hingga saatnya para penyintas Covid-19 berkurang drastis, dan kerumunan dengan prokes bisa dilakukan. Tetapi, kalau masih tidak dibolehkan maka kami tunduk pada anjuran pemerintah,” katanya. ❑

MBO

72-82 JUN.pmd 75 1/1/2003, 12:53 AM

H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH.

Politik Itu Pengabdian

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JUNI adalah bulan Pancasila. Karena 1 Juni sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomer 24 tahun 2016, sebagai Hari Lahir Pancasila. Penetapan 1 Juni menjadi hari Lahir Pancasila mengabadikan momentum pidato Bung Karno tentang dasar dan ideologi Pancasila di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945.

Hingga kini, banyak yang memanfaatkan momentum hari lahir Pancasila untuk membahas eksistensi sila-sila Pancasila, termasuk aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali masalah lambang Negara, yaitu Burung Garuda. Apalagi, tuntutan agar gelar pahlawan diberikan kepada Syarif Abdul Hamid Alkadrie, Sultan Kasultanan Pontianak, sebagai perancang Lambang Negara Burung Garuda tak kunjung diberikan.

Padahal, sudah sejak lama masyarakat Kalimantan Barat, tempat Kasultanan Pontianak berada, dan provinsi asal Syarif Abdul Hamid Alkadrie atau Sultan Hamid II dilahirkan meminta agar jasa salah satu putera terbaik Kalbar itu tidak dilupakan. Harapan tersebut salah satunya disampaikan H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH., (55), Pimpinan Fraksi Partai Nasdem MPR RI.

Menurut Bang Doel, begitu Syarif Abdullah Alkadrie biasa disapa, berkat jasa-jasanya maka Sultan Hamid II pantas mendapat penghargaan sebagai pahlawan. Namun, hingga kini aspirasi tersebut belum juga terlaksana. Pasalnya, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyangkut kelayakan gelar penghormatan diberikan kepada Sultan Hamid II.

"Ada anggota Dewan Gelar yang masih mempermasalahkan hukuman yang sempat diterima Sultan Hamid II. Padahal, banyak juga pahlawan yang pernah dihukum, tetapi mereka direhabilitir. Seperti, Sutan Sjahrir, Tan Malaka, dan juga Mohammad Natsir. Jadi, saya melihat, persoalan yang mengganjal pemberian gelar pahlawan kepada Sultan Hamid II adalah persoalan politik," ungkap Bang Doel kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Bang Doel menceritakan bahwa Sultan Hamid II memang pernah didakwa terlibat dalam Angkatan Perang Ratu Adil. Karena dugaan tersebut dia dihukum. Tetapi, di tingkat pengadilan, dakwaan itu tidak terbukti. Artinya, Sultan Hamid II telah dihukum tetapi dakwaannya tidak terbukti di pengadilan. Dengan kata lain, tidak bersalah namun dihukum.

Karena itu, ada yang mengusulkan agar dimintakan rehabilitasi ke Mahkamah Agung atau melakukan Peninjauan Kembali (PK). Tujuannya adalah meluruskan fakta bahwa Sultan Hamid II pernah dihukum, tetapi tidak memiliki kesalahan. Namun, cara itu belum ditempuh, karena hampir pasti proses PK di MA membutuhkan waktu yang tidak cepat.

Meski permohonan penganugerahan gelar pahlawan kepada Sultan Hamid II masih terganjal, tetapi secara de vacto pemerintah mengakui bahwa Sultan Hamid II telah berjasa, menggagas lambang negara Burung Garuda. Ini sesuai dengan SK Kemendikbud No 204/M/2016 yang mengakui bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara Burung Garuda.

"Sekarang kami terus mengumpulkan bahan-bahan yang dapat mendukung aspirasi masyarakat agar pemerintah mau memberikan gelar pahlawan kepada Sultan Hamid II," ujar Bang Doel yang juga sepupu dari Sultan Hamid II.

Sebagai politisi Partai Nasdem asal Kalimantan Barat, Bang Doel

72-82 JUN.pmd 76 1/1/2003, 12:53 AM

72-82 JUN.pmd 77 1/1/2003, 12:53 AM

memiliki perhatian cukup besar terhadap penganugerahan gelar pahlawan kepada Sultan Hamid II. Apalagi, mantan Politisi Partai Golkar dan PKB ini masih memiliki hubungan darah dengan Sultan Hamid II.

Tapi, terlepas dari hubungan saudara dengan Sultan Hamid II, Bang Doel memang sangat menaruh perhatian dengan masalah-masalah yang timbul di Kalbar. Dalam kasus pandemi Covid-19 misalnya, dia merasa prihatin terhadap peningkatan kasus penyebaran virus korona di Kalbar, khususnya di Kabupaten Melawi paska libur lebaran.

"Di samping karena minimnya jumlah sarana rumah sakit, paska lebaran jumlah penyintas covid di kabupaten Melawi melonjak tinggi. Akibatnya, rumah sakit tidak mampu untuk menampung semua pasien yang terpapar korona," kata Bang Doel.

Ormas Nasional Demokrat

H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH., adalah politisi yang sudah banyak makan asam garam dunia politik nasional. Sepak terjangnya di dunia politik bahkan lebih lama dibanding Partai Nasdem, yang kini menjadi tunggangannnya di ranah politik praktis.

Sebelum menjadi politisi, Syarif Abdullah Alkadrie dikenal sebagai aktivis organisasi kepemudaan, *underbow* Partai Golkar, yaitu: Kosgoro dan AMPI. Selain itu, ia juga aktif di organisasi Kepramukaan, sebelum akhirnya bergabung menjadi salah satu pengurus Golkar Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dari 1987 hingga 1997.

Saat reformasi bergulir, bersamaan dengan lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syarif Abdullah Alkadrie yang berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) diminta bergabung dengan partai bentukan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. Di PKB, Abdullah Alkadrie dipercaya menjadi Ketua DPW PKB Kalimantan Barat. Melalui PKB, Bang Doel kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar selama dua periode (1999-2004 dan 2004-2009).

Sebagai pendukung KH. Abdurrahman Wahid, Bang Doel tidak bisa menerima ketika Gus Dur dilengserkan dari PKB. Ia memilih meninggalkan PKB, dan kembali ke kampus, juga menekuni usaha lamanya sebagai kontraktor.

Tetapi, masa istirahatnya dari kegiatan politik tak berlangsung lama. Pada 2011, alumni SD Negeri Tanjung Saleh, Sungai Kakap, ini terlibat dalam pendirian ormas Nasional Demokrat (Nasdem). Bahkan, dia ditunjuk menjadi Ketua DPW Ormas Nasional Demokrat, Kalbar.

Ketika ormas Nasional Demokrat berubah menjadi partai politik, pria kelahiran Kubu Raya, 14 Juni 1966, ini ditetapkan menjadi Ketua Umum DPW Partai Nasdem Kalbar. Melalui Nasdem, Bang Doel meneruskan kiprahnya di partai politik dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dapil Kalimantar Barat I.

"Bagi saya politik itu pengabdian atau amaliah. Karena itu, saat ada panggilan dan kesempatan kembali ke politik, saya mengiyakan," kata ayah tiga anak dari pernikahannya dengan Khatijah Fitriyah.

Prinsip seperti itu sudah menjadi pegangan Bang Doel sejak ia menjabat sebagai anggota DPRD. Saat itu, ia memperjuangkan agar anggaran pesantren dan madrasah masuk ke dalam APBD. Meski tidak besar, dia berkeyakinan dengan memasukkan anggaran madrasah dan pesantren ke dalam APBD membuktikan bahwa negara hadir di pesantren dan madrasah.

Wakaf Tanah

Kemampuan Bang Doel terjun dan menaklukkan dunia politik menurun dari Syarief Ahmad Alkadrie -- yang tak lain adalah bapaknya sendiri. Bapaknya (Ahmad Alkadrie) adalah seorang

72-82 JUN.pmd 78 1/1/2003, 12:53 AM

kepada desa di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dia bukanlah penduduk asli desa itu, dan selalu mendapat ancaman dari penjajah Jepang. Untuk menghindari kejaran pemerintah Jepang yang hendak menangkap dan memenjarakannya, dia pun pergi dari Pontianak, ibukota Provinsi Kalimantan Barat.

Diwarnai kisah-kisah itulah Bang Doel terus berjuang untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Sampai kemudian dia berhasil menguasai dunia legislatif, DPR RI. Ini terhitung sukses sangat besar untuk seorang Bang Doel. Terlebih jika mengingat masa kecilnya hidup di daerah terpencil, di Desa Tanjung Sale, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Saat Bang Doel masih belia, di Desa Tanjung Sale belum memiliki sekolahan. Prihatin akan masa depan pendidikan anaknya, kedua orang tuanya (Ahmad Alkadrie dan Sahra) mewakafkan sebidang tanah untuk didirikan sekolah. Dan, sekolah pun berdiri. Maka, di sekolah inilah Bang Doel kecil belajar dengan kondisi seadanya, tanpa sepatu dan baju seragam. Bahkan, saat duduk di bangku kelas enam, siswanya hanya dua orang, salah satunya Bang Doel (Abdullah Alkadrie).

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sebagai anak keturunan Ahlul Bait, Bang Doel kecil sudah banyak mendapat pelajaran agama. Pagi dia sekolah, sore dan malam hari mengaji. Bahkan, sejak kecil, beberapa kitab yang lazim dipelajari di pesantren pun sudah dipelajari. Antara lain, Nahwo Shorof, Imriti, Safina, hingga Sulam.

Lulusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura ini sangat mensyukuri apa yang sudah didapatnya selama ini. Ia tidak memiliki target dan obsesi apapun di dunia politik, selain mengalir mengikuti nasib yang akan membawanya. Ia tidak bernafsu menjadi gubernur, dan tak tergiur dengan jabatan politis lainnya.

Kesibukan menjadi wakil rakyat telah menyita waktu kebersamaanya dengan keluarga. Namun, ketika berada di tengah-tengah keluarga, tentu ia manfaatkan dengan kualitas pertemuan yang baik. Keluarganya sudah memahami kesibukan Bang Doel sebagai wakil rakyat sejak masih menjadi anggota DPRD Kalbar. Bila tak ada kesibukan dengan konstituen di dapilnya, ia selalu ada bersama keluarga.

Di rumah, Bang Doel tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Ada Hadijah Fitriah, istri tercinta, yang setia mendampingi keseharian mantan Komisaris PT. Bumi Persada Khatulistiwa ini. Dari pernikahannya dengan Hadijah, ia dikaruniai tiga buah hati. Ada dua puteri cantik di rumahnya, Nabila Mardiyah Alkadrie, dan Najwa Ulfa Alkadrie. Tak ketinggalan ada si bungsu yang gagah Syarief Ahmad Naufal.

Soal destinasi wisata favorit, Bang Doel kerap mengajak keluarganya berwisata religi dengan mengunjungi makam para aulia. Sesekali juga berwisata ke Yogyakarta dan kota-kota lainnya yang unik dan nyaman. “Kadang kala kami melakukan umrah sekeluarga, meskipun tidak setiap tahun. Jika ada waktu yang cocok, ya pergi,” ungkap pehobi badminton dan bersepada itu.

Sebagai orangtua, mantan dosen Universitas Panca Bhakti, Pontianak, ini tak mengarahkan putera puterinya mengikuti jejak dirinya sebagai politisi. Ia membebaskan pilihan profesi bagi ketiga buah hatinya itu. “Saya hanya memfasilitasi saja apa yang mereka butuhkan. Menurut saya, kalau ingin jadi apapun harus dijalani dulu prosesnya, sehingga hasilnya bisa tumbuh dengan baik. Tidak bisa instan. Saya berpesan agar anak-anak terus termotivasi melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya,” katanya. ❑

MBO

72-82 JUN.pmd 79 1/1/2003, 12:53 AM

Memperkokoh Nasionalisme dan Soliditas Kebangsaan

PEMIKIRAN visioner dari sekumpulan pelajar Indonesia yang tergabung di dalam *School Tot Opleiding Van Inlands Artsen* (STOVIA) dengan membentuk organisasi bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 telah menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (*nation-state*). Pembentukan Budi Utomo merupakan pemantik bagi munculnya nasionalisme Indonesia sehingga lahirlah sekuensi penting lainnya dalam sejarah bangsa, seperti Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hingga berdiri tegaknya Indonesia hari ini sebagai sebuah negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Begitu pentingnya kelahiran Budi Utomo sehingga Presiden Soekarno pada 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta menetapkan hari lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Hari ini (20 Mei 2021-*red*), segenap bangsa Indonesia memperingati kembali 113 tahun lahirnya organisasi tersebut. Tema yang diusung oleh pemerintah adalah "Bangkit! Kita Bangsa yang Tangguh!". Pemilihan tema tersebut tentu saja berkorelasi erat dengan sirkumstansi yang dihadapi Indonesia saat ini, yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama lebih dari satusetengah tahun belum berakhir, dan masih membutuhkan penanganan yang komprehensif di segala lini kehidupan.

Bencana alam datang silih berganti sejak awal tahun hingga kini, termasuk beberapa kecelakaan alat transportasi sipil dan militer yang menelan banyak korban jiwa. Aksi-aksi terorisme dan separatisme yang dimotori oleh oknum-oknum yang hendak merusak persatuan dan kesatuan bangsa belum sepenuhnya bisa ditumpas. Oleh sebab itu, peringatan hari kebangkitan nasional tahun ini menjadi sarat makna. Spirit nasionalisme yang muncul 113 tahun silam melalui kelahiran Budi Utomo perlu dihidupkan kembali untuk mengatasi beragam permasalahan bangsa tersebut.

Napak Tilas

Ada tiga hal penting mengapa segenap bangsa Indonesia perlu menapaktilasi kembali spirit nasionalisme yang hidup pada rentang kelahiran Budi Utomo tersebut. Pertama, terlepas dari kritik bahwa Budi Utomo merupakan organisasi yang masih bersifat primordial, namun organisasi ini telah membuka khazanah baru perjuangan bangsa bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja. Perjuangan kemerdekaan secara fisik dan sporadis cenderung mudah ditumpas oleh penjajah. Oleh sebab itu, dibutuhkan perjuangan terorganisir dengan mengandalkan kekuatan ide dan pikiran yang mampu memompa persatuan dan kesatuan.

Kedua, perjuangan kemerdekaan melalui wadah organisasi lebih mampu menyatukan fragmentasi kebangsaan. Melalui organisasi, beragam perbedaan seperti strategi dan cara pandang bisa

72-82 JUN.pmd 80 1/1/2003, 12:53 AM

Oleh:
Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.
Wakil Ketua MPR RI

dijembatani sehingga segenap anggota benar-benar fokus dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ketiga, kelahiran Budi Utomo merupakan pemantik utama lahirnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya, seperti Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, dan Indische Partij sehingga perjuangan kemerdekaan memiliki daya dobrak yang lebih besar.

Selain ketiga hal tersebut, hal lain yang tidak bisa dinegasikan adalah kejelian para pendiri Budi Utomo untuk memosisikan perjuangan mereka pada gerakan apolitik. Mereka sangat menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan sarat kepentingan politik, baik pemenuhan syarat di level domestik (pemerintah, rakyat, dan wilayah) maupun pengakuan kedaulatan dari negara lain. Namun, mereka memahami bahwa kepentingan politik tersebut tidak akan tercapai apabila digagas dari sebuah gerakan yang berdimensi politik. Kekuatan kolonial dan imperial tentu saja akan serta-merta memberangus pergerakan mereka. Oleh sebab itu, organisasi yang mereka gagas bergerak pada tataran ekonomi dan sosial budaya yang menyentuh persoalan mendasar di masyarakat, sembari menanamkan bibit-bibit nasionalisme dan perjuangan yang lebih cerdas melawan penjajah. Dalam konteks ini, pembelajaran (lesson learned) penting yang bisa diambil oleh bangsa Indonesia hari ini adalah kepentingan politik negara tidak harus melulu dicapai melalui gerakan politik.

Nasionalisme dan Soliditas Kebangsaan

Saat ini, bangsa Indonesia hidup dalam milieu yang berbeda dengan masa tersebut. Tantangan dan persoalan yang dihadapi juga jauh berbeda. Yang dihadapi bukanlah kekuatan kolonial dan imperial seperti yang diperagakan oleh Kongsi Dagang Belanda (VOC) dan Jepang pada masa silam. Yang dihadapi adalah ancaman multidimensi dalam bentuk ancaman militer, non-militer, hingga hibrida. Semakin kompleks tatkala ancaman tersebut bersifat asimetris: sulit diukur dan dipetakan. Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini tidak hanya datang dari kekuatan eksternal saja, seperti pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara oleh Tiongkok dan berbagai kejahatan transnasional, tapi juga oleh kekuatan domestik melalui gerakan-gerakan ekstremisme, radikalisme, terorisme, serta upaya-upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai persoalan domestik kebangsaan juga tak jarang digoyang oleh oknum-oknum tertentu untuk menciptakan instabilitas politik dan keamanan.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-113 tahun ini menjadi momen penting untuk menggugah kesadaran dan menyalakan kembali spirit nasionalisme di hati segenap anak bangsa. Tidak dipungkiri bahwa bangsa Indonesia saat ini mengalami gejala fragmentasi dan segregasi nasional sebagai ekses residu kontestasi politik dan ketidakpuasan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Hal inilah yang membuat problematika kebangsaan yang dihadapi menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Dengan menapaktilasi perjuangan Budi Utomo dalam menggapai kemerdekaan diharapkan dapat tumbuh kesadaran bahwa segala permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini akan dapat diselesaikan dengan mengedepankan semangat gotong royong, meletakkan kepentingan bersama yang lebih besar di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dengan demikian akan tumbuh soliditas kuat yang menjembatani segala perbedaan dan fragmentasi yang ada, serta kecintaan yang kuat terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme hanya dapat hidup di sebuah negara yang bangsanya memiliki kehendak untuk hidup bersama, berjuang bersama, dan meraih tujuan yang ditetapkan bersama. Nasionalisme hanya dapat tumbuh subur pada bangsa yang berkomitmen untuk mengatasi segala perbedaan demi tujuan dan kepentingan bersama. Selamat Hari Kebangkitan Nasional! ❑

72-82 JUN.pmd 81 1/1/2003, 12:53 AM

Buku "Cegah Negara Tanpa Arah"

Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, tanpa PPHN, Indonesia tak ubahnya kapal besar berlayar di tengah samudra, namun tak memiliki kompas sebagai penunjuk arah.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku "Cegah Negara Tanpa Arah". Buku ke-19 yang dia tulis ini berisi penjelasan lengkap tentang perlunya restorasi haluan negara dalam paradigma Pancasila, sekaligus reposisi haluan negara sebagai wadah aspirasi rakyat. Melalui buku ini, Bamsoet – begitu dia biasa disapa— menggambarkan pentingnya Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah, yang memberikan kepastian keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, serta antara satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya.

"Tanpa PPHN, Indonesia tidak ubahnya seperti kapal besar yang sedang berlayar di tengah samudra, namun tidak memiliki kompas sebagai penunjuk arah. Sehingga tidak jelas mau berlabuh ke mana, tidak jelas juga apa yang mau dicapainya. Karena itu, diperlukan PPHN, agar tujuan Indonesia sebagaimana diamanatkan konstitusi, yakni terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, bisa segera terwujud," ujar Bamsoet dalam peluncuran buku "Cegah Negara Tanpa Arah," di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat (28/5/21).

Turut hadir menjadi narasumber, antara lain: Rektor Institut Pertanian Bogor sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria; Ketua Dewan Pakar Brain Society Center, Didin Damanhuri; dan Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, keberadaan PPHN akan menggambarkan capaian besar yang ingin diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan. Presiden, gubernur, bupati/walikota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN. Dengan demikian, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/walikota akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara.

"Tidak ada lagi proyek mangkrak, atau proyek pembangunan yang dikerjakan serampangan. Seperti beberapa hari ini dikeluhkan Presiden Joko Widodo, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat. Misalnya, ada pembangunan waduk, tetapi tidak ada irigasinya. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada akses jalan," jelas Bamsoet.

Rektor IPB sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria, menjelaskan, pada proses transisi demokrasi, isu mendesak yang perlu diselesaikan Indonesia adalah terkait arah pembangunan nasional. Dia melihat perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah Pusat belum sinkron. Karena daerah memiliki visi misi sendiri yang berbeda-beda.

"Singapura yang negara kecil saja memiliki perencanaan pembangunan yang matang. Bahkan mereka menargetkan, pada

2030 nanti bisa memenuhi sendiri 30% kebutuhan pangannya. Padahal mereka tidak memiliki lahan pertanian memadai. Sebuah hal yang kelihatannya mustahil, namun mereka bisa menjawabnya," jelas Arif Satria.

Ketua Dewan Pakar Brain Society Center, Didin Damanhuri, menerangkan, pola pembangunan yang saat ini mengandalkan visi misi presiden terpilih, yang dituangkan dalam RPJMN, menjadikan tingkat comprehensiveness, partisipasi stakeholder, dan legitimasi mandat rakyat terhadap platform pembangunan menjadi rendah. Untuk itu, perlu pola pembangunan mengacu yang mengacu kepada PPHN. "Sehingga akan jauh lebih mendalam content-nya. Jauh lebih luas partisipasi para elite strategisnya serta jauh lebih legitimate mandat rakyatnya terhadap platform pembangunan," terang Didin Damanhuri.

Sebagai catatan, selain buku "Cegah Negara Tanpa Arah," Bamsoet juga telah menerbitkan berbagai buku. Antara lain: Mahasiswa Gerakan dan Pemikiran (1990); Kelompok Cipayung, Pandangan dan Realita (1991); Ekonomi Indonesia 2020 (1995); Skandal Gila Bank Century (2010); Perang Perangan Melawan Korupsi (2011); Pilpres Abal-Abal Republik Amburadul (2011); dan Republik Galau (2012).

Buku berikutnya adalah Skandal Bank Century di Tikungan Terakhir (2013); Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni (2013); 5 Kiat Praktis Menjadi Pengusaha No.1 (2013); Indonesia Gawat Darurat (2014); Republik Komedi 1/2 Presiden (2015); Ngeri Ngeri Sedap (2017); Dari Wartawan ke Senayan (2018); Akal Sehat (2019); Jurus 4 Pilar (2020); Solusi Jalan Tengah (2020); dan Save People Care for Economy (2020). ❑

72-82 JUN.pmd 82 1/1/2003, 12:53 AM